

**KEWARISAN AHLI WARIS PENGANTI DAN Z/AWI< AL-ARH}A>M  
(KAJIAN MENURUT KHI DAN HUKUM ISLAM)**

**T E S I S**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister Syari`ah  
dalam Bidang Hukum Islam pada Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau



**OLEH :**

**MUHAMMAD ZEN, S.Ag**

**NIM: 0907 S2 901**

**PRODI HUKUM ISLAM / KONSENTRASI FIQIH  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2011**

## ABSTRAK

Muhammad Zen, S. Ag, "Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan  $Z\{awi < al-arh\}a > m$  (Kajian Menurut KHI dan Hukum Islam)" Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

Kata kunci : Ahli Waris Pengganti,  $Z\{awi > Al-Arh\}a > m$ , KHI, Hukum Islam.

Sistem kewarisan dalam hukum waris Islam didasarkan pada kitab suci Al Qur'an, yaitu menganut sistem individual, dimana setelah pewaris meninggal dunia, harta peninggalannya dapat dibagikan kepada para ahli warisnya, baik pria maupun wanita sesuai dengan haknya masing-masing. Agama Islam telah mengatur pembagian tersebut sudah secara rinci dalam Al Qur'an dan Hadist agar tidak terjadi perselisihan di antara para ahli waris.

Dalam Hukum Kewarisan Islam tidak mengenal adanya ahli waris pengganti, tetapi yang ada ialah ahli waris  $z\{awi < al-arh\}a > m$ , yaitu Keluarga mayit yang tidak termasuk  $z\{awi < al-Furu > d$  dan juga bukan termasuk  $as\}a > bah$ ", secara sederhana bisa dikatakan bahwa  $z\{awi < al-arh\}a > m$  hanya diperuntukkan bagi kerabat dari jalur perempuan, baik itu laki-laki maupun perempuan.

Hukum waris Islam di Indonesia baru mengenal adanya ahli waris pengganti setelah dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991. Hal ini tertuang secara jelas dalam Pasal 185 ayat 1 dan 2.

Adapun produk dari KHI tentang  $z\{awi < al-arh\}a > m$  adalah ahli waris pengganti yang menjadikan kedudukan cucu baik laki-laki maupun perempuan mendapat hak atas harta pusaka sebagai ahli waris pengganti orang tuanya, sebab cucu pewaris masih mempunyai hubungan darah dengan pewaris sehingga termasuk dari kategori kerabat. karena di kalangan masyarakat Indonesia banyak terjadi kasus yang meniadakan hak waris cucu ketika orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga dirasa tidak adanya keadilan terhadap anak yang ditinggalkan orang tuanya, padahal ketika orang tuanya hidup mendapat bagian harta pusaka. Hal tersebut dapat dipahami karena di dalam Al Qur'an sendiri tidak secara tegas mengatur mengenai ketentuan ahli waris pengganti.

Melihat hal tersebut, ada indikasi yang menunjukkan bahwa ketentuan KHI yang mencoba memposisikan  $z\{awi < al-arh\}a > m$  termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan harta pusaka sebagai bentuk tawaran konsep keadilan dan kemaslahatan bagi ahli waris  $z\{awi < al-arh\}a > m$  yang disebut dengan ahli waris pengganti.

Rumusan masalah yang hendak dicari jawabanya dalam penulisan tesis ini adalah: 1) Apa yang dimaksud dengan Ahli Waris Pengganti dan  $Z\{awi < al-arh\}a > m$ ; 2) Bagaimana pola kewarisan Ahli Waris Pengganti dan  $Z\{awi < al-arh\}a > m$ ; dan 3) Kenapa ada hak waris bagi Ahli Waris Pengganti dalam KHI.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Ahli Waris Pengganti dan  $Z\{awi < al-arh\}a > m$ ; bagaimana pola kewarisannya dan mengetahui dasar hak waris bagi Ahli Waris Pengganti dalam KHI.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam memberikan pemahaman kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama

tentang kewarisan yang berkaitan dengan ahli waris pengganti dan *Z/awi< al-arh}a>m* dalam KHI dan Hukum Islam serta untuk memperluas wawasan pengetahuan penulis dan sebagai kontribusi pemikiran dalam bidang hukum kewarisan Islam. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini merupakan studi komparatif yaitu perbandingan konsep ahli waris pengganti dan ahli waris dalam pandangan KHI dan Hukum Islam.

Adapun data primer yang disusun gunakan adalah *al-Mawa'ri<s\ fi< asy-Syari<'ah al-Isla>miyyah fi< D{au'il Kita>bi< wa as-Sunnah* oleh Muhammad 'Ali< as-S{a>bu>ni, *Tas-hilul Fara-idh* oleh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang kewarisan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Depag 1991/1992 ditambah buku-buku pendukung lainnya yang ada kaitannya dengan sumber di atas. Metode yang dipakai dalam menganalisis data adalah *Content Analysis*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan persamaan dan perbedaan Ahli Waris Pengganti dengan *Z/awi< al-Arh}a>m*. Kesamaannya bahwa keduanya tidak golongan ahli waris *z\awi< al-Furu>d* dan *as}a>bah*. Mereka dianggap sebagai keluarga "jauh" dari pewaris. Namun posisi Ahli Waris Pengganti dengan *Z/awi< al-Arh}a>m* lebih dekat kepada pewaris, bila dibandingkan dengan seorang tuan dengan maulanya dan *bait al-ma>l*. Pada kondisi, pewaris tidak meninggalkan ahli waris *z\awi< al-Furu>d* dan *as}a>bah* atau harta yang diwariskan masih bersisa setelah dibagikan kepada ahli waris *z\awi< al-Furu>d* dan *as}a>bah*, maka posisi ahli waris berikutnya adalah *z\awi< al-arh}a>m*, *mawali*, dan *bait al-ma>l*.

Adapun perbedaannya adalah; *pertama*, Ahli Waris Pengganti meliputi pihak kerabat dari jalur laki-laki dan perempuan. Sedangkan *z\awi< al-arh}a>m* hanya diperuntukkan bagi kerabat dari jalur perempuan, baik itu laki-laki maupun perempuan. *Kedua*, Ahli Waris Pengganti menganut prinsip *bilateral*. Sedangkan *z\awi< al-arh}a>m* menganut prinsip *patrilineal*. *Ketiga*, kewarisan Ahli waris pengganti bukanlah alternatif bila harta warisan masih tersisa, namun ditetapkan sebagai pengganti bagi ahli waris yang meninggal sebelum pewaris, sedangkan kewarisan *z\awi< al-arh}a>m* bisa jadi mendapatkan warisan yang tersisa setelah dibagikan kepada ahli waris *z\awi< al-Furu>d* dan *as}a>bah*.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBARAN PENGESAHAN .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
PERSETUJUAN KETUA PRODI .....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
ABSTRAK .....	xv
DAFTAR ISI .....	xvii
 <b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan .....	13
D. Telaah Pustaka .....	13
E. Kerangka Teoretik .....	14
F. Metode Penelitian .....	22
G. Sistematika Penulisan .....	24
 <b>BAB II. KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN AHLI WARIS PENGGANTI.....</b>	 <b>27</b>
A. Deskripsi Formal.....	27
B. Deskripsi Material .....	57
C. Ahli Waris Pengganti dalam KHI.....	67
 <b>BAB III. DESKRIPSI TENTANG KEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM.....</b>	 <b>79</b>
A. Macam-macam Ahli Waris.....	79
B. Sabab-sebab waris mewarisi dalam Islam.....	94
C. Penghalang Hak Waris (Al-Hajb).....	95

D. Bagian masing-masing ahli Waris .....	100
E. Kewarisan $Z/awi < al-arh\{a\} > m$ .....	111

#### **BAB IV. KEWARISAN AHLI WARIS PENGGANTI DAN $Z/A WI < AL-ARH\}A > M$**

##### **DALAM KHI DAN HUKUM ISLAM..... 123**

A. Persamaan dan perbedaan ahli waris pengganti dengan $z\{awi < al-arh\{a\} > m$ .....	123
B. Pola pembagian ahli waris pengganti dan $z\{awi < al-arh\{a\} > m$ .....	126
C. Faktor-faktor yang Mendasari Adanya Hak Waris bagi ahli waris pengganti dan $z\{awi < al-arh\{a\} > m$ .....	135
1. Faktor Yuridis.....	135
2. Faktor Sosiologis.....	151

#### **V. KESIMPULAN DAN SARAN ..... 161**

A. Kesimpulan .....	161
B. Saran .....	162

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **RIWAYAT HIDUP PENULIS**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Suatu kematian yang dialami oleh setiap manusia menimbulkan upaya pengaturan lebih lanjut tentang kedudukan harta kekayaan seseorang dan kepemilikan harta tersebut.<sup>1</sup> Harta yang ditinggalkan tersebut terjamin dari orang lain yang tidak berhak, sehingga memerlukan pengaturan atau landasan tentang siapa yang berhak menerima warisan, berapa jumlahnya/ kadar masing-masing ahli waris dan bagaimana cara mendapatkannya.

Salah satu ketentuan Islam yang mengatur peralihan ataupun pembagian harta pusaka tersebut kepada ahli warisnya dalam suatu disiplin ilmu tersendiri, dengan sebutan '*Ilm Mawa>ri<s\, Fara>'id\*', *Wari<s\*<sup>3</sup> dan Kewarisan<sup>4</sup>. Perumusan ilmu waris ini didasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber pokok hukum Islam.

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 225.

<sup>2</sup> Kata *Mawa>ri<s\* merupakan bentuk *jama'* dari kata *mira>s\* yang berarti *mauru>s\*, harta yang diwarisi, jadi bahasannya melihat harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup sebagai objek dari hukum itu. Selain itu, disebut juga *Fara>'id\* merupakan *jama'* dari kata *fari<d{ah* yang mempunyai arti *mafru>dah* atau *muqaddarah*, suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Kedua term diatas secara istilah tidak berbeda, yakni ilmu untuk mengetahui bagian-bagian *tirkah* yang harus diberikan kepada ahli waris. Lihat Muhammad Muhyiddin Abd al Hamid, *Ah}ka>m al-Mawa>ri<s\ fi< asy-Syari<'ah al-Isla>miyyah 'ala> Maz\>hib li A'immati al-Arba'ah*, cet. ke-1 (Bairut: Da>r al-Kutub, 1984/1404), hlm. 7.

<sup>3</sup> Kata ini, yang menjadi titik beratnya adalah subjek hukum yakni orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang meninggal. Adapun warisan lebih pada objek hukumnya, yakni harta yang ditinggalkan oleh si *mayyit*. Lihat pada Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 1008.

<sup>4</sup> Diambil dari kata "waris" dengan tambahan awal 'ke' dan akhiran 'an', mempunyai dua pemaknaan. *Pertama*, hal ihwal orang yang menerima harta warisan. *Kedua*, hal ihwal peralihan harta dari yang mati kepada yang masih hidup. Kedua makna tersebut lebih pada proses dalam hal waris atau warisan. Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 6.

Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Wirjono Prodjodikoro berpendapat mengenai pengertian waris, yaitu : *“Waris itu merupakan masalah mengenai apa dan bagaimanakah segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta atau kekayaan seseorang pada saat ia meninggal dunia yang akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”*. Atau dengan kata lain yaitu waris merupakan suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang.<sup>5</sup>

Dengan demikian hukum kewarisan Islam merupakan ketentuan syara' yang diatur secara jelas dan terarah, baik tentang orang yang berhak menerima bagian-bagiannya serta cara membaginya. Adapun hal-hal lain yang masih memerlukan penjelasan atau persoalan baru muncul setelahnya, bersifat merinci atau menegaskan, dijelaskan lebih lanjut dalam *as-Sunnah*. Ketika suatu hal baru muncul dan tidak ditemukan dalam kedua rujukan atau sumber pokok hukum Islam maka sudah menjadi tugas ulama untuk berijtihad dalam menjawab persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat.<sup>6</sup>

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya. Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh seseorang, karena kematian merupakan akhir

---

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1995), hlm. 12

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Op. Cit, hlm. 3-4.



dari perjalanan hidup seorang manusia. Jika orang yang meninggal dunia yang dikenal dengan pewaris meninggalkan keluarga dan harta kekayaan yang disebut warisan, dengan cara apa akan diselesaikan atau dibagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris serta hukum apa yang akan diterapkan untuk membagi warisan tersebut. Hukum yang membahas tentang peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, diatur dalam hukum kewarisan.

Sistim kewarisan dalam hukum waris Islam didasarkan pada kitab suci Al Qur'an, yaitu menganut sistim individual, dimana setelah pewaris meninggal dunia, harta peninggalannya dapat dibagikan kepada para ahli warisnya, baik pria maupun wanita sesuai dengan haknya masing-masing. Adapun hak atau bagian-bagian tersebut sudah ditentukan secara tegas di dalam Al Qur'an dan Hadist.

Agama Islam dengan kesempurnaannya telah mengatur pembagian warisan secara rinci dalam Al Qur'an dan Hadist agar tidak terjadi perselisihan di antara para ahli waris. Islam menghendaki agar pemindahan kepemilikan tersebut berlangsung sesuai dengan jiwa syari'at yang mengedepankan prinsip keadilan, sehingga harta yang diterima oleh ahli warispun akhirnya menjadi harta yang halal, baik, dan mengandung berkah. Segala permasalahan yang timbul dalam hal pembagian waris bagi kalangan masyarakat yang beragama Islam pada umumnya diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Al Qur'an dan Hadist.

Di Indonesia, sebelum diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, para hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara mengenai kewarisan tidak mempunyai satu dasar hukum yang

baku dan seragam. Para hakim tersebut mengacu pada buku-buku fiqh Islam yang beragam, sehingga ada kemungkinan dua orang hakim di dua tempat yang berbeda memeriksa dan memutus suatu perkara waris yang sama namun menghasilkan putusan yang berbeda. Selain itu, sebagian besar hakim-hakim Pengadilan Agama di Indonesia pada waktu sebelum diberlakukannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991, pada umumnya masih menggunakan buku-buku fiqh yang bersumber pada maz\hab Sya>fi'i.

Sedangkan ilmu kewarisan masuk dalam kategori pembahasan hukum *mu'amalah*. Hukum *mu'amalah* sendiri sangat terkait erat dengan aspek realita sosial maka perumusan dan penerapannya banyak mengacu pada fenomena sosial tersebut. Keterkaitan dengan fenomena sosial dapat terlihat saat penetapan atau pembentukan hukum kewarisan. Diantaranya ketika membicarakan tentang konsep ahli waris pengganti dan  $z\backslash awi < al-Arh\}a > m$ .

Hukum Kewarisan Islam tidak mengenal adanya ahli waris pengganti, tetapi yang ada ialah ahli waris  $z\backslash awi < al-arh\}a > m$ . Secara etimologis  $z\backslash awi < al-Arh\}a > m$ , terdiri dari dua kata yang mempunyai satu arti.  $Arh\}a > m$  merupakan bentuk *jama'* dari *rah\}i < m* artinya tempat berdiamnya janin dalam kandungan ibu. Sedangkan secara terminologis berarti kerabat, baik yang mempunyai hubungan darah dari jalur ayah maupun ibu.<sup>7</sup>

Adapun pengertian  $al-Arh\}a > m$  menurut Istilah Ilmu Fara>'id} adalah," Keluarga mayit yang tidak termasuk  $z\backslash awi < al-Furu > d$  (ahli waris yang berhak mendapat bagian tertentu dalam al-Qur'an dan as-Sunnah) dan juga bukan termasuk

---

<sup>7</sup> Muhammad 'Ali < as-S{a>bu>ni <, *al-Mawa>ri < s\ fi < asy-Syari < 'ah al-Isla > miyyah fi < D{au' al-Kita > b wa as-Sunnah*, cet.ke-1 (Makkah: Da>r al-H > {adis\, 1388 H), hlm. 177.

*as}a>bah*”, seperti saudara perempuan ayah, saudara laki-laki ibu, saudara perempuan ibu, anak saudara perempuan, cucu dari anak perempuan dan seterusnya.<sup>8</sup>

*Z\awi< al-Arh}a>m* menurut istilah ahli *fiqh* adalah pengakuan seseorang akan keterkaitan dengan orang lain sebagai kerabat, baik kerabat dari pihak *as}h}a>b al-Furu>d}*, *as}a>bah* atau orang lain.<sup>9</sup>

Berbeda halnya, di kalangan ulama *sunni*<sup>10</sup> hanya dikhususkan penggunaannya dalam kewarisan pada orang-orang yang mempunyai hubungan keturunan dan tidak disebutkan *furu>d}*-nya dalam al-Qur’an dan tidak pula termasuk pada kelompok *as}h}a>b al-furu>d}*, *as}a>bah*.<sup>11</sup> Dengan demikian secara sederhana bisa dikatakan bahwa *z\awi< al-arh}a>m* hanya diperuntukkan bagi kerabat dari jalur perempuan, baik itu laki-laki maupun perempuan.

Mulailah muncul pertentangan, apakah *z\awi< al-arh}a>m* dalam pembagian harta pusaka termasuk golongan yang berhak memperoleh atau tidak berhak memperoleh atas harta pusaka. Terdapat dua pendapat ulama, mereka yang menolak keberadaan *z\awi< al-arh}a>m* dalam mengambil ketetapan hukumnya bersumber dari firman Allah SWT, dan bagi mereka yang mengakui adanya keberadaan *z\awi< al-arh}a>m* berdasar surat al-Anfa>l: 75 dan an-Nisa>’ : 7.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 178

<sup>9</sup> H{usnain Muhammad Makhluḥ, *al-Mawa>ri<s\fi< asy-Syari<’ah al-Isla>miyyah*, cet. ke-4 (ttp: Mat}ba’ah al-Madany, 1976/1396), hlm. 131.

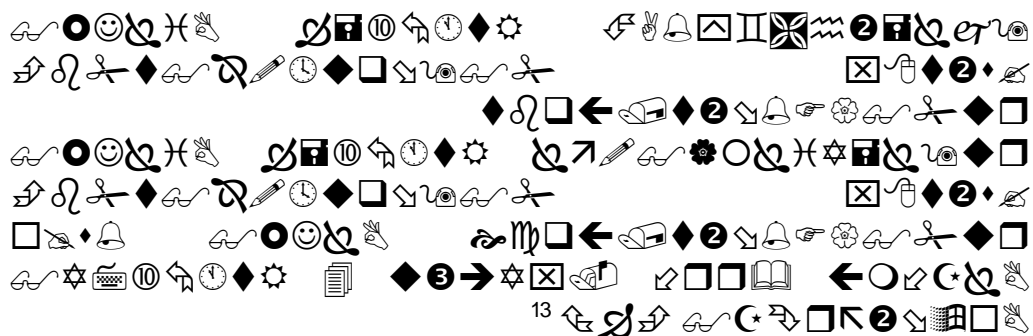
<sup>10</sup> *Sunni<* merupakan nama dari berbagai kelompok atau mazhab *fiqhiyyah* yang mempunyai kesepakatan akan pandangannya tentang tradisi Rasul dan sahabat sebelum terjadinya kemelut yakni terpecahnya Islam menjadi tiga golongan yakni Ahl as-Sunnah, Khawarij dan Syi’ah. Mereka disebut juga *Ahl as-Sunnah wa al-Jama>’ah*, yang termasuk di dalamnya dan masih bertahan ajarannya sampai sekarang adalah Ima>m Abu> Hani<fah (Hanafiyyah), Ima>m Ma>lik (Malikiyyah), Ima>m asy-Sya>fi’i< (Syafi’iyyah), Ima>m Ahmad bin Hambal (Hanabilah). Lihat Muchtar Adam, “Perbandingan Mazhab dalam Islam dan Permasalahannya”, dalam *Hukum Islam di Indonesia; Pemikiran dan Praktek*, Eddi Rudiana Arief dkk (peny), cet. ke-2, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hlm. 212-216. Dan Al-Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertailan Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Imam Mazhab* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 1.

<sup>11</sup> Muhammad ‘Ali< as-S{a>bu>ni<, *al-Mawa>ri<s\fi...*, *Op.Cit*, hlm. 178.



“Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.”(QS. al-Anfa>l: 75)

Kedatangan Islam khususnya dalam masalah kewarisan telah membuktikan konsep *rah}matan li al-‘a>lami>n*. Wanita pada masa jahiliyah hampir tidak mempunyai hak apapun, keberadaannya hanya menjadi pelengkap keberadaan laki-laki. Diskriminasi tersebut berlanjut sampai pada keturunan garis perempuan. Pandangan diskriminatif itu kemudian ditumbangkan oleh Islam dengan turunnya al-Qur’an surat An-Nisa>’ ayat 7, yang berbunyi:



“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”(QS. an-Nisa>’ : 7).

Golongan *pertama*, pendapat Zaid ibn S|a>bit yang menolak adanya hak kewarisan, apabila tidak ada *z\awi< al-furu>d}* dan ‘*as}a>bah* atau jika adanya

<sup>12</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm.274

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 116

kelebihan dari *z\awi< al-furu>d}*, harta pusaka diserahkan kepada *Bait al-Ma>l*.

Pendapat ini diikuti oleh Ima>m Ma>lik, Ima>m Sya>fi'i< dan Ibn Hazm.<sup>14</sup>

Golongan *kedua*, pendapat *jumhur sahabat*, yaitu: 'Umar, 'Ali< bin Abi< Tho>lib, Ibn Mas'u>d, Mu'a>z ibn Jaba>l dan Ibn 'Abba>s, yang menetapkan *z\awi< al-arh}a>m* berhak mewarisi apabila ahli waris *z\awi< al-furu>d}* dan 'as}a>bah tidak ada. Pendapat ini diikuti oleh Ima>m Abu> Hani<fah, Abu> Yusu>f, M. Asy Syaiba>ni<.<sup>15</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, akhir abad ke-3 dan abad ke-4 H, hukum memberikan warisan kepada *z\awi< al-arh}a>m* telah menjadi hukum yang disepakati oleh keempat maz\hab. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah menggunakan pendapat Ima>m Abu> Hani<fah dan Hanabila tentang ahli waris *z\awi> al-arh}a>m* termasuk yang berhak mendapatkan harta pusaka walaupun berbeda dengan pendapat imam mereka, dikarenakan *Bait al-Ma>l* tidak lagi dikelola dengan baik atau teratur disebabkan masyarakat kacau dan *kez\aliman* para penguasa.<sup>16</sup>

Dengan sifat keumumannya, Al Qur'an bisa mengimbangi setiap kepentingan, keadaan dan memberikan ketentuan hukum terhadap semua peristiwa dengan cara yang tidak keluar dari dasar-dasar syari'at dan tujuan-tujuannya.<sup>17</sup> Atas dasar itu pula Al Qur'an memberi kesempatan bagi yang memenuhi syarat untuk berjihad terhadap suatu peristiwa hukum, baik yang sudah ada ketentuan nashnya yang bersifat *z\anny* (samar-samar) maupun yang belum ada *nas}s}nya* sama sekali, sepanjang itu dilakukan semata-mata dengan tujuan kemaslahatan umat.

<sup>14</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. ke-2 (Bandung: al-Ma'arif, 1994), hlm. 352.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 353.

<sup>16</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 227-228.

<sup>17</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 56

Hukum waris Islam di Indonesia baru mengenal adanya penggantian tempat baru setelah dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Hal tersebut dapat dipahami karena di dalam Al Qur'an sendiri tidak secara tegas mengatur mengenai ketentuan ahli waris pengganti. Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, perkembangan sosial, politik, ekonomi dan budaya yang cukup signifikan bukanlah ada dengan sendirinya, melainkan suatu proses pemaknaan terus-menerus dan tiada henti. Begitupun dalam menjalankan *Syari'ah* atau hukum Islam, selalu mengalami benturan-benturan dengan keberagaman adat dan kebudayaan masyarakat. Akibatnya banyak bermunculan hukum yang hidup di tengahnya sesuai kepercayaan dan keberagaman masyarakat setempat. Kebiasaan masyarakat seperti itu telah mendarah daging dan dijiwai dalam setiap sendi-sendi kehidupan.

Kedatangan Islam khususnya dalam masalah kewarisan telah membuktikan konsep *rahmatan li al-'alamina*. Kini, masyarakat Indonesia yang beragama Islam tidak hanya memiliki UU No.1 Thn 1974 tentang perkawinan tapi juga telah memiliki KHI yang berlaku di seluruh Indonesia sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Tujuannya adalah untuk mengakomodir hukum-hukum yang telah lama hidup di masyarakat dengan harapan membantu kerja para hakim, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama, dalam memutuskan perkara-perkara bagi orang Islam.

Sekurang-kurangnya terdapat tiga hal yang dapat dikemukakan dalam kaitannya dengan tatanan hukum nasional. *Pertama*, konsistensi KHI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dijadikan rujukan. *Kedua*, Kelayakan KHI untuk dijadikan pedoman oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang membutuhkan tentang masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan. *Ketiga*, kelayakan pelaksanaan KHI untuk umat Islam dalam masyarakat-bangsa yang mejemuk.<sup>18</sup>

Dengan begitu, keseragaman tentang ketentuan-ketentuan hukum Islam pada setiap keputusan Pengadilan Agama akan lebih terjamin. Adapun harapan yang lain adalah untuk menampilkan corak khas *fiqh* Indonesia sesuai dengan masyarakat muslim Indonesia.

Islam tidak menafikan sama sekali sebuah praktek dan kebiasaan yang terjadi secara berulang-ulang atau hal-hal positif dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai kebiasaan yang mengikat. Tetapi penerimaan kebiasaan tersebut melalui seleksi ketat, dalam artian tidak keluar dari nilai-nilai fundamental *Syari'ah*, guna menuju terwujudnya kemaslahatan dalam masyarakat.<sup>19</sup> Dengan tersusunnya KHI sebagai hukum positif dan unikatif, menjadikan hukum perdata Islam bersifat publik dan dapat dipaksakan penerapannya.

KHI merupakan hasil konsensus (*ijma'*) ulama Indonesia dan berbagai golongan dari lapisan elemen masyarakat yang telah mendapat legitimasi dari kekuasaan Negara melalui Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

---

<sup>18</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 28.

<sup>19</sup> Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 33.

Materi KHI diambil dari berbagai sumber berupa 13 kitab *fiqh*<sup>20</sup> dari berbagai maz\hab, kitab-kitab yurisprudensi, wawancara dengan berbagai ulama dan melakukan studi komparatif ke negara-negara Islam lainnya.

Pengadilan Agama sebelumnya hanya berkuat dalam pendapat-pendapat imam maz\hab yang ada dalam kitab-kitab *fiqh*. Karena belum tersusunnya buku pedoman hukum perdata Islam bagi hakim, itulah kemudian menjadi pengambilan putusannya mengalami *disparitas* yang cukup tinggi antara satu pengadilan dengan pengadilan lain atau antara hakim satu dengan yang lain. Dengan kata lain, *different judge different sentence*. Dengan begitu fungsi KHI sebagai jembatan problematika yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama sebagai hukum materil dan hukum formil dalam penyelesaian masalah (perkawinan, hibah, wasiat, wakaf dan waris). Tidak hanya sebagai penserasi dalam penegakan hukum tetapi juga mempercepat proses *Taqarru>b Bayn al-Ummah* ke arah minimalisasi pertentangan, menolak *khila>fiyah*, dan mengubah cara pandang masyarakat Islam selama ini tentang nilai-nilai hukum Islam yang selalu dianggap merupakan urusan pribadi.<sup>21</sup>

Pendekatan yang digunakan KHI dalam kompromisasi dengan hukum adat masyarakat Indonesia yang terkenal heteroginitasnya melalui pemahaman sumber-

---

<sup>20</sup> Kesemua kitab-kitab *fiqh* tersebut sebelumnya telah menjadi bahan rujukan para hakim Agama dengan dikeluarkannya Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958. Diantara kitab-kitab itu adalah *al-Ba>ju>ri<*, *Fath} al-Mu'in*, *Syarqawi< 'ala> Tah}ri<r*, *Qalyu>bi</Mahalli<*, *Fath} al-Wa>hab wa Syarh}u>hu*, *Tuh}fah*, *Targhi<b al-Musytaq*, *Qawa>ni<n asy-Syari<'ah li Sayyid Usman ibn Yahya*, *Qawa>ni<n asy-Syari<'ah li Sayyid Sada>qah Dahlan*, *Syamsuri< fi< al-Fara>'id*, *Bughyah al-Musytarsyidi<n*, *al-Fiqh 'ala> Maz\ahib al-Arba'ah*, dan *Mughni al-Muh}ta>j*. Ketika dalam perumusan KHI, ke-13 kitab *fiqh* tersebut ditambah, kurang lebih kesemuanya 38 kitab dari berbagai mazhab, sebagai bahan pertimbangan yang nantinya akan dilokakaryakan dengan berbagai elemen masyarakat. Lihat Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Akademik Pressindo, 2007), hlm. 22.

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, "Materi Kompilasi Hukum Islami", dalam *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Moh. Mahfud Md (ed), cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 60-66.



sumber hukum Islam terhadap budaya masyarakat setempat. Hal ini menuntut adanya pembaharuan (*tajdid*) hukum Islam yang dikontekskan dengan norma-norma hukum adat yang telah hidup subur di tengah masyarakat. Dengan kata lain, mengislamisasi hukum adat sekaligus berupaya mendekatkan hukum adat ke dalam Islam.<sup>22</sup> Akhirnya KHI sebagai produk pembaharuan hukum Islam Indonesia menghasilkan tiga kitab hukum salah satu pokok bahasannya adalah Hukum Waris.

Adapun produk dari KHI tentang ahli waris pengganti yang menjadikan kedudukan cucu baik laki-laki maupun perempuan mendapat hak atas harta pusaka. Adanya pasal 185 ini, KHI melihat di kalangan masyarakat Indonesia banyak terjadi kasus yang meniadakan hak waris cucu ketika orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga dirasa tidak adanya keadilan terhadap anak yang ditinggalkan orang tuanya, padahal ketika orang tuanya hidup mendapat bagian harta pusaka.

Berbicara mengenai ahli waris pengganti yang di atur di dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam memang merupakan suatu hal yang baru di dalam hukum waris Islam. Di Negara-negara Islam lainnya tidak mengenal adanya ahli waris pengganti. Mereka lebih menekankan konsep wasiat wajibah bagi seorang kakek untuk memberikan bagian anaknya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu kepada keturunannya, dengan bagian maksimal 1/3 harta peninggalan/warisan.

Sedangkan dalam kewarisan Islam adanya golongan yang keberhakannya menerima harta pusaka ketika tidak bersamaan dengan ahli waris atau disebut dengan ahli waris pengganti. Dalam hal ini, yang

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 76.

termasuk dalam  $z\backslash awi < al-arh\}a > m$  adalah ahli waris yang tidak mendapat bagian pokok ( $z\backslash awi < al-furu > d\}$ ) atau menerima sisa ( $as\}a > bah$ ) atau bisa dikatakan kerabat yang mempunyai hubungan darah dari jalur perempuan. Ketika ini dihadapkan pada suatu kasus kewarisan dirasa kurang membawa keadilan dan kemaslahatan. Seperti pewaris meninggalkan seorang anak laki-laki dan anak perempuan, anak perempuan meninggal lebih dahulu dari pada pewaris dan ia mempunyai seorang anak laki-laki dan anak perempuan (cucu pewaris). Dengan begitu anak laki-laki pewaris mendapatkan harta seluruhnya karena termasuk ' $as\}a > bah$  dan kedua cucu pewaris tidak mendapat hak apapun karena adanya anak laki-laki tersebut.

Berbeda menurut KHI mengenai permasalahan tersebut, sebab cucu pewaris masih mempunyai hubungan darah dengan pewaris sehingga termasuk dari kategori kerabat. KHI memandang kedua anak dari anak perempuan (cucu pewaris) tersebut mempunyai hak atas harta pusaka melalui jalur sebagai ahli waris pengganti orang tuanya. Hal ini tertuang secara jelas dalam Pasal 185 ayat 1 dan 2. Pada ayat (1) disebutkan: *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.* Dalam ayat (2) nya disebutkan: *"Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti".*<sup>23</sup>

Melihat hal tersebut, ada indikasi yang menunjukkan bahwa ketentuan KHI yang mencoba memposisikan  $z\backslash awi < al-arh\}a > m$  termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan harta pusaka sebagai bentuk tawaran konsep keadilan dan

---

<sup>23</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag 1991/1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Bandung: Humaniora-Anggota Ikapi, 1993), hlm.77

kemaslahatan bagi ahli waris  $z\backslash awi < al-arh\}a > m$  yang disebut dengan ahli waris pengganti.

Hal inilah, yang membuat penyusun tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh mengenai ahli waris pengganti dan  $z\backslash awi < al-arh\}a > m$ . Dengan judul “Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan  $Z\backslash awi < al-arh\}a > m$  (Kajian Menurut KHI dan Hukum Islam)”.

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang hendak dicari jawabanya dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan Ahli Waris Pengganti dan  $Z\backslash awi < al-arh\}a > m$  ?
2. Bagaimana pola kewarisan Ahli Waris Pengganti dan  $Z\backslash awi < al-arh\}a > m$  ?
3. Kenapa ada hak waris bagi Ahli Waris Pengganti dalam KHI ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui maksud dari Ahli Waris Pengganti dan  $Z\backslash awi < al-arh\}a > m$ .
2. Untuk mengetahui bagaimana pola kewarisan Ahli Waris Pengganti dan  $Z\backslash awi < al-arh\}a > m$ .
3. Untuk mengetahui dasar hak waris bagi Ahli Waris Pengganti dalam KHI.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam memberikan pemahaman kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama tentang kewarisan yang berkaitan dengan ahli waris pengganti dan  $Z\backslash awi < al-arh\}a > m$  dalam KHI dan Hukum Islam.

2. Untuk memperluas wawasan pengetahuan penulis dan sebagai kontribusi pemikiran dalam bidang hukum kewarisan Islam.
3. Menambah khazanah pustaka Islam terutama dalam bidang hukum kewarisan Islam.

#### D. Telaah Pustaka

Sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang mengkaji tentang Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan  $Z\backslash awi < al-arh \} a > m$  (Kajian Menurut KHI dan Hukum Islam). Beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema ini , antara lain: tesis dengan judul *Dimensi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, yang ditulis oleh Hajar M; *Kedudukan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam*, yang ditulis oleh Taufiq Tri Kusnanto; *Hak-hak Kewarisan Ahli Waris yang Melakukan Euthanasia*, yang ditulis oleh Moch. Nasir Cholis, Namun tidak membahas permasalahan ini.

Sementara itu, ada beberapa penelitian yang mengkaji secara khusus ahli waris  $z\backslash awi < al-arh \} a > m$ , di antaranya dalam bentuk artikel yang ditulis oleh Hajar M, *Dimensi Hak Kewarisan Ahli Waris Zul Arham dalam Perspektif Ulama*,<sup>24</sup> pokok bahasannya lebih pada cara pembagian harta ahli waris  $z\backslash awi < al-arh \} a > m$  dalam lingkup kewarisan Islam.

#### E. Kerangka Teoritis

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan pangkal dari sistem berfikir dalam Islam. Di dalamnya terdapat ketentuan hukum yang diperlukan untuk mengatur kehidupan

---

<sup>24</sup> Hajar M, "Dimensi Hak Kewarisan Ahli Waris Zul Arham dalam Perspektif Ulama," *Jurnal An-Nida'*, No CXXIV Thn XXII (Agustus-September, 1998), hlm 18.

manusia. Karena masih bersifat universal, perlu adanya pemahaman baru yang berkaitan dengan nilai-nilai filosofis demi kemaslahatan manusia.

Syari'ah Islam mengatur akan suatu hukum, ada yang masih bersifat umum dan ada yang bersifat terperinci atau detail, seperti halnya kewarisan Islam, menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar ataupun kecil bagiannya dan lain sebagainya. Ketetapan tersebut secara langsung tertulis dalam al-Qur'an yang kemudian dijelaskan dengan *as-Sunnah*.<sup>25</sup> Dengan begitu waris merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan benar oleh Allah SWT.

Walaupun telah dijelaskan ketetapan hukum waris dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, masih dimungkinkan adanya penafsiran yang beragam, karena terbentur dengan perubahan ruang dan waktu (kondisi sosial, ekonomi, politik). Para Ulama berbeda pendapat tentang kewarisan *al-arh{a>m*. Para Ima>m Muja>hid sebagaimana halnya para sahabat Nabi Muhammad saw- berbeda pendapat tentang kewarisan *al-arh{a>m*. Secara garis besar, perbedaan tersebut terbagi menjadi dua pendapat:

- 1) Ima>m Ma>lik, Ima>m Sya>fi'i, Za>id ibn S|a>bit dan mayoritas Ulama Amsar< bahwa ahli waris *al-arh{a>m* tidak dapat menerima warisan, Dari kalangan sahabat dan *Tabi'>in* yang berpendapat demikian adalah Ibn 'Abba>s, Sa'id ibn al-Musayyab, Sa'ad ibn Jubair, S|ufyan al-Sauri, al-Auza>'I dan

---

<sup>25</sup>J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein, cet.ke-1(Yogyakarta, Tiara wacana, 1994), hlm. 71.

diikuti Ibn Hazm al-Andalusy. Harta peninggalan *al-Mawarris* diserahkan kepada *Bait al-Ma'la*.

Argumentasi yang mereka kemukakan adalah *pertama*, ayat-ayat mawaris hanya menentukan hak-hak waris *zawid al-furu* dan *asabah*. Hak-hak waris *zawid al-arh* tidak dijelaskan secara rinci. *Kedua*, Rasulullah saw sendiri pada suatu saat minta petunjuk kepada Allah perihal status ahli waris bibi dari bapak (*al-'ammah*) dan bibi dari ibu (*al-Khalah*) yang mana mereka tidak berhak mendapatkan warisan. *Ketiga*, harta yang diserahkan kepada *Bait al-Ma'la* akan memberi manfaat yang luas dan dapat digunakan secara umum oleh umat Islam.

- 2) Sahabat Abu Bakar, 'Umar al-Khatthab, 'Usman ibn 'Affan, 'Ali bin Abi Tholib, Ibn 'Abbas dalam satu pendapatnya yang *masyhur*, Ibn Mas'ud dan Mu'az ibn Jabbar berpendapat bahwa ahli waris *zawid al-arh* dapat menerima warisan, apabila *al-mawarris* tidak mempunyai ahli waris *zawid al-furu* dan *asabah*. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Syuraih, Ibn Sirin, Ata' dan Muja'hid. Dari kalangan Ulama mazhab adalah Imam Abu Hani' dan Ahmad bin Hanbal, Abu Yusuf, Muhammad, Ibn Abi Laila dan umumnya Fuqaha' Irak, Kufah dan Basrah.

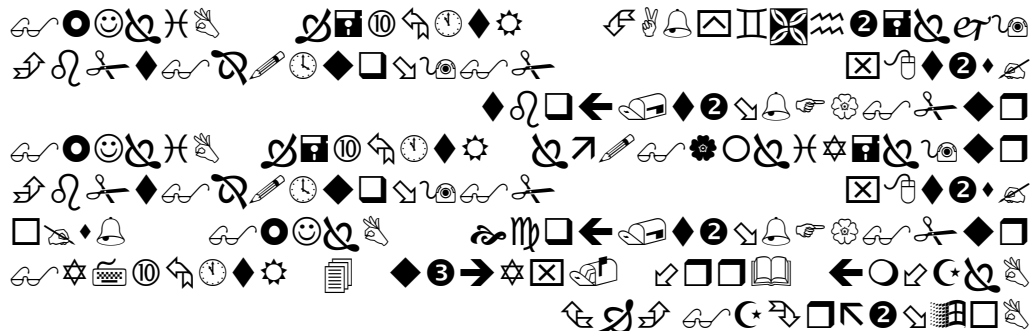
Mereka merujuk kepada Firman Allah SWT, surat al-Anfal ayat 75 yang memberikan petunjuk (*dalah*) umum bahwa keluarga dekatlah yang berhak menerima warisan. Jadi, meskipun tidak secara rinci ayat tersebut mengaturnya, hak-hak waris mereka telah tercakup dalam pengertian *al-arh* dalam ayat

tersebut di atas. Pendapat yang terakhir inilah yang diikuti oleh Mayoritas (Jumhu>r) ‘Ulama>.<sup>26</sup>

Bisa dilihat hasil produk hukum (*fiqh*) sebagai bentuk kedinamisan hukum Islam, terlihat dalam pengambilan *istimba>t} al-hukm* yang bertlainan mengenai pemahaman dalil dari *mas}a>dir al-hukm*, begitu pula yang terjadi pada pembahasan ahli waris *z\awi< al-arh}a>m*, adapun landasan dalil dari *nas}s} al-Qur’an* sebagai berikut:



“Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.” (QS. al-Anfa>l (8) : 75).<sup>27</sup>



“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

(QS.An-Nisa>' (4) : 7)<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, cet ke-4 (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm.79-81.

<sup>27</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op.Cit, hlm. 274

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 116

*Nas* di atas termasuk dalil yang bersifat *zanni* karena masih memerlukan penta'wilan lebih lanjut akan lafad *arh* *a* *m* dan *qara* *bah* yang masih bermakna umum. Sehingga dimungkinkan adanya suatu makna dibalik *nas* atau adanya kemungkinan mengandung suatu pengertian lain.

*Abu* *Zahrah* <sup>29</sup> membagi beberapa kategori akan dalil *nas* yang tidak jelas dari segi bahasa, lafad *arh* *a* *m* dan *qara* *bah* termasuk kata yang *mujmal* karena mengandung pengertian yang banyak. Sehingga harus memilih makna yang di antara makna tersebut, mengetahuinya dengan ditafsiri, diteliti dan dipikir secara mendalam.

*Zawi* *al-arh* *a* *m* bisa dimasukkan sebagai kerabat, menurut fuqaha' lebih menitikberatkan pada jalur perempuan dalam segi istilah. Keumuman lafad *qara* *bah* menjadikan adanya indikasi semua yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris mempunyai hak atau tidak sama sekali dalam pembagian harta pusaka. Baik itu, kerabat laki-laki atau perempuan, dari jalur ke bawah, samping ataupun atas, sesuai dengan besar kecilnya bagian sebagaimana yang telah di-*nas*-kan dalam al-Qur'an.

Sehubungan dengan penyelesaian masalah kewarisan, al-Qur'an dan as-Sunnah telah memberikan garis hukum yang jelas dan terperinci. Hukum kewarisan merupakan sebuah pernyataan tekstual yang tercantum dalam al-Qur'an merupakan suatu hal yang absolut dan universal bagi setiap muslim dan mengandung nilai-nilai

---

<sup>29</sup> *Abu* *Zahrah*, *Usjul al-Fiqh*, ([http : Daar al-Fikr al-'Araabi, tt.](http://Daar al-Fikr al-'Araabi, tt.)), hlm. 131.



yang bersifat abadi dan unsur yang berguna untuk senantiasa siap mengatasi segala kesulitan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu.<sup>30</sup>

Terbukanya ruang untuk berijtihad tatkala tidak diketemukan dalil-dalil pada sumber hukum yakni al-Qur'an dan as-Sunnah. Ijtihad akan menghasilkan produk hukum (*fiqh*) yang relevan dan mampu menjawab permasalahan baru kewarisan sesuai dengan konteks masyarakat tersebut. Dari situ, bisa diukur akan sejauh mana kontekstualisasi *fiqh* berkembang beriringan di tengah kehidupan riil masyarakat.

Sungguhpun demikian, hendaknya *ijtiha>d* dilakukan dalam batas yang telah digariskan oleh *syara'*, yakni tetap memegang nilai-nilai universal yang tertulis di dalam *nas*}s} al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebagai upaya manusia menggali makna-makna tersirat di dalamnya, sehingga memunculkan *istimba>t} al-hukm*. *Istimba>t} al-hukm* memunculkan formulasi-formulasi hukum terapan, *fiqh* merupakan konsep fungsional mencoba memahami, menyikapi terhadap *syara'* yang bersifat luas dan dinamis.<sup>31</sup>

Sesuai konteks keadaan di atas, seiring berjalannya waktu, bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hukum Islam. Hal ini mendasari akan hukum Islam yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia, sebagai hukum nasional. Adanya langkah konkrit yang dilakukan ke arah *Da>ru> at-Taqni<n* (periode perundang-undangan),<sup>32</sup> yang kemudian lahirnya KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai

---

<sup>30</sup> Idris Djafar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 1-2.

<sup>31</sup> A. Masa'id Ghufiran, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 121-122.

<sup>32</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial; dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 121-122.

*reinterpreta*si dari pemahaman hukum Islam klasik kepada pembaharuan hukum Islam yang sesuai dengan konteks Indonesia.

Pada pasal 185 KHI yang menentukan bahwa ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh keturunannya. Hal ini dapat berarti anak dari ahli waris yang meninggal tersebut dapat mewaris dan memperoleh bagian sebagaimana bagian yang akan diterima oleh orang tuanya bila masih hidup, tanpa mempersoalkan jenis kelamin. Mungkin ketentuan dalam Pasal 185 KHI tersebut untuk menghilangkan diskriminasi terhadap ahli waris perempuan. Karena pada prinsipnya hanya keturunan dari anak laki-laki saja yang bisa menggantikan kedudukan orang tuanya untuk menerima bagian warisan, sedangkan keturunan dari anak perempuan tidak bisa menerima warisan.

Ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam untuk melengkapi hukum-hukum yang telah ada dan juga bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris. Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pewaris, sehingga dia tampil menggantikannya.<sup>33</sup> Jadi bagian ahli waris pengganti sebesar bagian ahli waris yang digantikannya, untuk itu ahli waris pengganti perlu dikembangkan dalam hukum kewarisan Islam. Apalagi hal ini tidak akan merugikan ahli waris lainnya.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu pembaharuan dalam Hukum Kewarisan Islam. Dikatakan demikian karena Kompilasi Hukum Islam telah memberikan suatu jalan keluar untuk mengatasi

---

<sup>33</sup> Ahmad Zahari, *Hukum Kewarisan Islam* (Pontianak: FH.Untan Pres, 2008), hlm. 148

masalah yang timbul akibat penggantian kedudukan dalam mewaris. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam lebih memberikan rasa keadilan bagi umat Islam dalam hal mewaris, dan hal ini sesuai dengan asas *bilateral* sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Qur'an.

Dengan memahami *Syari'ah* sebagai kemajuan dan perkembangan yang kontinu dalam berbagai realitas dan peristiwa, menjadikan *Syari'ah* senantiasa tetap *autentik, up to date* dan *modern*.<sup>34</sup> Sehingga mendapatkan rumusan hukum yang lebih matang dan berdimensi rasional, praktis dan aktual. Al-Qur'an sendiri memuat semangat *legislasi* ke arah *realisasi progresif* dari nilai-nilai fundamental tentang kebebasan dan tanggung jawab dalam *legislasi* baru, sebagai *legislasi* aktual dengan menerima kondisi sosial sebagai rujukan.<sup>35</sup>

Menjadi titik tolak akan perlunya pertimbangan dan kajian ulang, manakala terjadi perubahan waktu (kondisi sosial, budaya, ekonomi dan politik), dengan tanpa merubah dalil *nas* yang baku, melainkan *interpretasi kontekstual* dari *nas* tersebut mengacu ke alam pikiran dalam konteks Indonesia. Sebagaimana yang terjadi dalam hal kewarisan Islam bersanding dengan berbagai model kewarisan adat di Indonesia yang sangat beragam sesuai dengan lingkungan adat masing-masing.

Kehidupan sosial dan keberagaman kebudayaan masyarakat Indonesia dalam memahami hukum Islam sebagai kebiasaan dan menjadikan suatu tradisi. Hukum Islam sebagai hukum bawaan mengalami titik temu dengan hukum adat masyarakat, yang kemudian berjalan beriringan dalam sendi-sendi kehidupan. Bagi masyarakat Indonesia, agama Islam merupakan agama mayoritas yang dipeluk kebanyakan

---

<sup>34</sup> Muhammad Said al-Asymawi, *Usul asy-Syari'ah*, alih bahasa Lutfi Thomafi, dengan judul "Nalar Kritik Syari'ah", cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 90.

<sup>35</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa M. Ahsin, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 45.

penduduk dan mereka sering diklaim sebagai muslim yang bermaz\hab Sya>fi'i< tetapi sebenarnya tidak menafikan pemikiran hukum di masyarakat dengan maz\hab lain.

Dalam perumusan hukum waris pada KHI harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat Indonesia, dengan menggunakan metode mengislamisasikan hukum adat sebagai hukum yang tidak bertentangan dengan *Syari<'ah* Islam. Sebagaimana ketika melihat kerabat sebagai orang yang berhak menerima harta pusaka atau tidak.

Metode pembaharuan hukum Islam seperti ini sering diketahui melalui *isti<sla>h* dan *'urf* dalam disiplin ilmu *us}u>l fiqh*. Keduanya dipandang mampu sebagai alat untuk menetapkan hukum, karena memberikan kesempatan yang luas untuk berijtihad dan secara jelas menemukan pada tujuan hukum Islam, yakni keadilan dan kemaslahatan.

*Isti<sla>h* atau *mas}la>h{ah*, merupakan pengambilan hukum demi kemaslahatan, karena tidak diketemukan dalil *juz\'}i>* yang menunjukkan ketetapan atau larangan menggunakan *istiqla'* atau induksi dari sejumlah ayat.<sup>36</sup> Kemaslahatan sebagai dasar bagi pembaharuan hukum Islam haruslah bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan. Sehingga hukum yang ditetapkan benar-benar bermanfaat dan sekaligus menghindari atau menolak kerusakan.

Selain itu, *mas}la>h{ah* tersebut menyangkut kepentingan orang banyak dan bukan untuk kepentingan individu atau kelompok kecil tertentu. Berdasarkan hal ini, maka dikembangkan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* sebagai kerangka praktis untuk mencapai kemaslahatan sebagai berikut :

---

<sup>36</sup> Abdul Wa>hab Khalaf, *'Ilm Us}u>l al-Fiqh*, cet. ke-12 (Kuwait: Da>r al-Qala>m, 1978/1398), hlm. 84.

Sedangkan *'urf* merupakan suatu hal yang positif, telah dikenal orang banyak dan telah menjadi adat kebiasaan serta telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat, baik itu berbentuk perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan.<sup>38</sup> *'Urf* digunakan bila tidak ada *nas*}*s*} secara tegas menjelaskan ketentuan hukum suatu masalah atau peristiwa.

## F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah menganalisis data-data yang diperoleh maka diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dan mendukung penyusunan tesis ini, adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan tesis ini, jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian kepustakaan yang diarahkan atau difokuskan pada penelaahan dan pembahasan teori-teori yang diterima kebenarannya dalam *literatur*, yang ada relevansinya dengan masalah yang hendak dikaji (ahli waris pengganti dan *zawī al-Arḥam*) lebih lanjut guna mencari landasan pemikiran sebagai upaya pemecahan masalah, baik berupa buku-buku maupun jurnal-jurnal yang mendukung kajian.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>37</sup> Ahmad Nazawi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, cet. ke-1 (Damaskus: Da'ir al-Qala'm, 1986/1406 H), hlm. 145.

<sup>38</sup> Abu Zahrah, *Usūl al-Fiqh*, Op.Cit, hlm. 90.

Penelitian ini merupakan studi komparatif terdiri dua kata, “studi” dan “komparatif”. Studi berarti “kajian atau telaah ilmiah”<sup>39</sup>. Dalam penelitian studi dimaknai sebagai metode atau pendekatan dalam melakukan penelitian. Komparatif (*comparative*) berarti “berkenaan dengan perbandingan”<sup>40</sup>. Studi jenis ini merupakan salah satu dari tiga jenis penelitian; studi deskriptif, studi korelasi dan studi komparatif.

Suharsimi Arikunto dengan mengutip Aswari Sudjud menjelaskan bahwa studi komparatif dilakukan untuk “menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja”.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini akan dibandingkan konsep ahli waris pengganti dan zawi al-arham dalam pandangan KHI dan Hukum Islam.

### 3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datanya adalah dengan membaca, menelaah, memahami dan mempelajari referensi-referensi yang ada kaitannya dengan permasalahan atau pembahasan. Dalam hal ini, data primer yang penyusun gunakan adalah *al-Mawarits fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah fi Daul Kita bi wa as-Sunnah* oleh Muhammad 'Ali as-Sabuni, *Tas-hilul Fara'idh* oleh Muhammad bin Salih bin al-'Usaimi, *Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang kewarisan* oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag

---

<sup>39</sup> Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Ttp: Gita Media Press, tt), hlm. 721.

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm, 445.

<sup>41</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, Cet. Ke-12, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 236.

1991/1992. Sedangkan data sekunder adalah buku-buku pendukung, serta jurnal-jurnal atau majalah-majalah yang ada kaitannya dengan sumber di atas.

#### 4. Analisis Data

Metode yang dipakai dalam menganalisis data adalah *Content Analysis*. Berbagai pengertian dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya, Weber mendefinisikan *content analysis* sebagai “metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen”<sup>42</sup>. Sedangkan Holsti mendefinisikan bahwa *content analysis* adalah teknik apa pun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis<sup>43</sup>.

Dari kedua pengertian di atas terlihat yang menjadi subjek penelitian adalah buku-buku yang menjadi sumber primer penelitian ini atau dokumen lainnya. Dalam hal ini adalah Kitab-kitab Fiqh Mawaris dan KHI, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

#### G. Sistematika Penulisan

Langkah-langkah dalam pembahasan penelitian ini agar lebih terarah dan memberikan gambaran jelas, penyusun membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab.

Bab pertama, berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pembahasan bab ini

---

<sup>42</sup> Weber seperti dikutip oleh Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 220.

<sup>43</sup> Holsti seperti dikutip oleh Lexy J. Moleong. *Ibid*.

dimaksudkan mampu memberikan gambaran akan permasalahan dan signifikansi adanya penelitian ini.

Bab kedua, pembahasannya lebih mengarah pada Kompilasi hukum Islam dan ahli waris pengganti, sebagai landasan untuk membantu dalam menganalisa bab empat nantinya. Adapun pembahasan bab ini meliputi; Deskripsi Formal, Deskripsi Material dan ahli waris pengganti dalam KHI.

Bab ketiga, pada bab ini lebih mengarah terhadap deskripsi tentang kewarisan menurut Hukum Islam yang meliputi; Macam-macam ahli waris, sebab-sebab waris mewarisi dalam Islam, penghalang hak waris (Al-Hajb) dan bagian masing-masing ahli waris.

Bab keempat, dalam pembahasan bab ini merupakan analisa terhadap permasalahan penelitian yakni, Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan *Z/awi < al-arh/a>m* dalam KHI dan Hukum Islam yang meliputi; Persamaan dan perbedaan ahli waris pengganti dengan *z\awi < al-arh/a>m*, Pola pembagian ahli waris pengganti dan *z\awi < al-arh/a>m*, Faktor-faktor yang Mendasari Adanya Hak Waris bagi ahli waris pengganti dan *z\awi < al-arh/a>m* yang terdiri dari; Faktor Yuridis seperti; Nash Umum dan Nash Khusus, Ahli Waris Pengganti dalam KHI adalah Ijma' ulama Indonesia, Kewarisan *Z/awi > al-arh/a>m* Menurut Mazhab Shahabi, Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan *Z/awi < al-arh/a>m* Menurut 'Urf, Kemashlahatan Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan *Z/awi < al-arh/a>m* dan Faktor Sosiologis seperti; Hubungan Kekkerabatan Lebih Utama Mendapatkan Warisan, Baitul Mal dan Tanggung jawab Negara terhadap Kesejahteraan Rakyat .



Bab kelima, penutup sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti, sebagaimana yang diuraikan di atas, memuat tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian. Dan terdapat saran-saran kepada pihak-pihak yang berkenaan dengan penelitian ini.

## BAB II

### KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN AHLI WARIS PENGANTI

#### A. Deskripsi Formal

Untuk memperoleh gambaran tentang “Kompilasi Hukum Islam” yang disingkat dengan KHI, tentu terlebih dahulu harus diketahui apa itu kompilasi. Abdurrahman mengungkapkan dalam bukunya “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, bahwa istilah kompilasi memang belum meluas dan kurang populer dalam masyarakat, bahkan dalam praktek dan kajian hukum sekalipun. Dalam kamus-kamus dan ensiklopedi Indonesia serta buku-buku hukum berbahasa Indonesia tidak ditemukan uraian tentang apa itu kompilasi, bagaimana kedudukannya, dasar keabsahannya dan sebagainya, berarti kata “kompilasi” masih belum diterima secara meluas dalam bahasa Indonesia.<sup>1</sup>

Dalam pembentukan kitab undang-undang manapun secara resmi biasanya melalui suatu prosedur yang bersifat khusus dan selalu mengacu dalam bentuk formal yang sudah tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Hal ini menunjukkan perbedaan dengan kompilasi yang mempunyai makna hampir sama, namun mencakup bahan hukum yang beraneka macam dan tidak dibuat dengan maksud mengacu pada satu bentuk tertentu dari produk hukum, misalnya seperti di Indonesia ia dapat berbentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, bahkan juga dapat dibuat secara tidak resmi dalam artian tidak ditetapkan oleh pemerintah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), Cet. ke-5, hlm. 9

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 10

Istilah *kodifikasi* berasal dari bahasa Latin. Begitu juga “Kompilasi” berasal dari bahasa Latin yang diambil dari perkataan “*compilare*” yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan yang tersebar berserakan di mana-mana. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi “*Compilation*” dalam bahasa Inggris atau “*Compilatie*” dalam bahasa Belanda. Selanjutnya istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi “Kompilasi” yang berarti terjemahan langsung dari kata *Compilation* dan *Compilatie*.

Dalam Kamus Lengkap Inggris Indonesia – Indonesia Inggris yang disusun oleh S. Wojowasito dan WJS Poerwadarminta disebutkan bahwa kata “*Compilation*” dengan terjemahan “karangan tersusun dan kutipan buku-buku lain”.<sup>3</sup> Sedangkan dalam Kamus Umum Belanda Indonesia yang disusun oleh S. Wojowasito kata “*Compilatie*” dalam bahasa Belanda diterjemahkan menjadi “kompilasi” dengan keterangan tambahan “kumpulan dari lain-lain karangan”.<sup>4</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompilasi berarti “kumpulan yang tersusun secara teratur (daftar informasi, karangan dan lain sebagainya)”.<sup>5</sup>

Makna Kompilasi secara harfiah berarti suatu kumpulan atau himpunan, dalam Bahasa Inggris ada istilah “*Compilation of law*” atau Himpunan Undang-undang. Jika dikaitkan dengan hukum, maka kompilasi dapat diartikan sebagai himpunan materi hukum dalam suatu buku.

---

<sup>3</sup> S. Wojowasito, dan WJS Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia – Indonesia Inggris*, (Jakarta: Hasta, 1982), hlm. 88

<sup>4</sup> S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1981), hlm. 123

<sup>5</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1991) Edisi kedua, hlm.516

Berdasarkan keterangan di atas dapatlah diketahui bahwa ditinjau dari sudut bahasa, kompilasi itu adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku atau tulisan mengenai suatu persoalan tertentu.

Dilihat dari pengertian kompilasi menurut bahasa di atas, maka kompilasi itu bukanlah selalu merupakan suatu produk hukum sebagaimana halnya dengan sebuah kodifikasi. Dengan kata lain dalam pengertian hukum, kompilasi adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.<sup>6</sup>

Kompilasi merupakan penyaringan dan dibukukannya undang-undang menjadi suatu yang utuh.<sup>7</sup> Dengan demikian KHI adalah himpunan ketentuan Hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. KHI bukanlah peraturan perundang-undangan, bukan hukum tertulis meskipun ia dituliskan, bukan undang-undang, bukan peraturan pemerintah, bukan keputusan Presiden, dan lain-lain. KHI menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk menelusuri norma-norma hukum bersangkutan bila diperlukan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>8</sup>

Pengertiannya memang berbeda dengan kodifikasi, namun kompilasi dalam pengertian ini juga merupakan sebuah buku hukum. Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang ditetapkan pada tahun 1991 tidak secara tegas menyebutkan pengertian kompilasi dan Kompilasi Hukum Islam. Dari sejarah penyusunannya juga tidak nampak

---

<sup>6</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Op.Cit, hlm. 12

<sup>7</sup> Ranuhandoko, I.P.M., *Terminologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), cet. ke-2, hlm.149

<sup>8</sup> Amrullah Ahmad, et. al, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: PP. IKAHA Jakarta, 1994),. hlm. 15.

munculnya pemikiran yang kontroversial mengenai apa yang dimaksud dengan kompilasi itu.

Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqih yang biasa digunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun dalam satu himpunan.<sup>9</sup> KHI adalah Fikih Indonesia yang berisi 3 (tiga) buku hukum, yaitu: Buku tentang Perkawinan, Buku tentang Kewarisan, dan Buku tentang Perwakafan.

Ide KHI ini timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang justisial Peradilan Agama. Tugas ini didasarkan pada Undang-undang No. 14 tahun 1970, namun pelaksanaannya di Peradilan Agama pada tahun 1983 setelah penandatanganan SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI No. 01, 02, 03 dan 04 / SK / I-1983 dan No. 1, 2, 3 dan 4 tahun 1983. Keempat SKB ini merupakan jalan pintas sambil menunggu keluarnya Undang-undang tentang susunan, kekuasaan dan acara Peradilan Agama yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 14 tahun 1970 bagi lingkungan Peradilan Agama yang pada saat itu masih sedang dalam proses penyusunan yang intensif. Selama pembinaan teknis yudisial Peradilan Agama oleh Mahkamah Agung, ternyata masih ada beberapa kelemahan, antara lain soal hukum Islam yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama.

Bila diperhatikan, konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/ KMA/ 1985 dan No. 25 Tahun 1985 Tentang penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui

---

<sup>9</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Op.Cit, hlm. 14

*yurisprudensi* atau lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam, dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan, yaitu :

1. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan Peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadi hukum yang positif di Pengadilan Agama.
2. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui *yurisprudensi*, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.<sup>10</sup>

Konsideran tersebut masih belum memberikan jawaban yang tegas mengapa dibentuk Kompilasi Hukum Islam. Jika diteliti lebih lanjut, ternyata pembentukan Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini.

Hal ini penting untuk ditegaskan sebagaimana yang dikatakan oleh Muchtar Zarkasy bahwa, sampai saat ini belum ada satu pengertian yang disepakati tentang hukum Islam di Indonesia. Ada berbagai anggapan tentang hukum Islam masing-masing melihat dari sudut yang berbeda.<sup>11</sup>

Dalam sejarah Islam, Hukum Islam pernah diberlakukan di tiga Negara sebagai undang-undang Negara yaitu :

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 15. Lihat juga Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 49.

<sup>11</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, *Op.Cit*, hlm. 16. Lihat juga Muchtar Zarkasy, *Hukum Islam dan Putusan-putusan Pengadilan agama*. Makalah pada Seminar Hukum Islam Indonesia, IAIN Imam Bonjol, Padang, 1985, hlm. 3.

(1) Di India pada masa Raja An Rijebe yang membuat dan memberlakukan Perundang-undangan Islam yang terkenal dengan fatwa *Alamfirin*.

(2) Di kerajaan Turki Usmani yang terkenal dengan nama *Majalah Al Ahkam Al-'Adiyah*.

(3) Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Sudan (PTA, Jatim, 1995 : 135)<sup>12</sup>

Yang sangat menarik sekali, di Filipina sejak tahun 1983 telah berhasil disusun hukum kewarisan bagi orang-orang Islam Filipina. Kemudian di India, Pakistan dan Banglades menamakan Hukum Islam dengan *Anglo Muhammad Law*.<sup>13</sup>

Hukum Islam dalam perjalanan sejarahnya, memiliki kedudukan yang amat penting. Namun, menurut Abdurrahman Wahid<sup>14</sup>, kini sebagian besar merupakan proyeksi teoritis dan pengkajiannya lebih bersifat "pertahanan" dari pada kemusnahan. Bekas-bekas dan pengaruhnya yang masih ada, lambat laun terjadi proses yang menuntut adanya penilaian ulang agar hukum Islam tidak kehilangan esensi vitalnya dan relevansinya dengan kehidupan masyarakat yang terus menerus berkembang.

Munculnya Imam-imam mazhab tidaklah dengan sendirinya dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Islam. Akan tetapi tingkat toleransi diantara mazhab itu semakin besar, hampir tidak dapat ditemukan kodifikasi hukum Islam yang seragam untuk semua Negara atau wilayah-wilayah Islam. Sampai saat ini baru *al-Majalah Al Ahkam Al-'Adiyah* yang dinilai kalangan umat Islam sebagai kodifikasi

---

<sup>12</sup> Saekan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arloka, 1997) hlm. 21-22

<sup>13</sup> Bustanul Arifin, *Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia*, Op.Cit, hlm. 127

<sup>14</sup> Abdurrahman Wahid, *Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan*, dalam (ed) Tcun Surjaman, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Rosda Karya, 1991), hlm. 3

universal.<sup>15</sup> Oleh karena itu usaha kodifikasi dan unifikasi terhadap kasus yang terjadi di Indonesia, sangat mendesak sekali untuk dijadikan Kompilasi hukum Islam.

Menurut Muhammad Daud Ali, dalam membicarakan Hukum Islam di Indonesia, pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan hukum Islam dalam system hukum Indonesia.<sup>16</sup> Sedangkan menurut pendapat Ichtiarto, hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegang dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan Hukum Nasional dan merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya.<sup>17</sup> Sehingga bila dikaji tentang situasi hukum Islam di Indonesia masa kini sebagai latar belakang disusunnya KHI, dua hal tersebut tidak mungkin bisa diabaikan.

Secara Umum Satria Effendi mengemukakan bahwa, suatu hal yang tidak dapat dibantah ialah, hukum Islam baik di Indonesia maupun di dunia Islam pada umumnya sampai sekarang ini adalah hukum fiqih, hasil penafsiran pada abad kedua hijriah dan beberapa abad berikutnya. Kitab-kitab klasik di bidang fiqih masih tetap berfungsi dalam memberikan informasi hukum, baik di sekolah-sekolah menengah agama, maupun perguruan tinggi. Kajian pada umumnya banyak dipusatkan pada masalah-masalah ibadah dan *al-ahwa>l al-syahksiyah*. Kajiannya tidak banyak diarahkan pada fiqih *mu'a>malah*, umpamanya yang menyangkut perekonomian dalam Islam.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 3

<sup>16</sup> Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm.187

<sup>17</sup> Ichtiarto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia*, (Jakarta: Ind Hill Co, 1990), hlm. 21

<sup>18</sup> Satria Effendi M.Zein, *Hukum Islam; Perkembangan dan Pelaksanaanya di Indonesia*, dalam Ari Anshori dan Slamet Warsidi (ed) *Fiqh Indonesia dalam Tantangan*, (Surakarta: FIAI UMS, 1991), hlm.33



Materi-materi yang termaktub dalam buku-buku fiqih tidak atau belum sempat disistematisasikan sebagaimana layaknya Undang-undang, sehingga ia dapat disesuaikan dengan masa sekarang. Masalah yang dihadapi bukan saja perubahan pada struktur sosial, tetapi juga perubahan kebutuhan dalam berbagai bentuknya. Banyak masalah-masalah baru yang belum ada padanannya pada masa Rasulullah dan pada masa para mujtahid di masa maz\hab- maz\hab terbentuk. Berbagai sikap dalam menghadapi tantangan tersebut telah dilontarkan. Suatu pihak ingin berpegang kepada tradisi dan penafsiran oleh ulama mujtahid terdahulu, sedangkan pihak lain menawarkan, bahwa berpegang erat saja pada penafsiran-penafsiran lama tidak cukup dalam menghadapi perubahan sosial di abad ini. Penafsiran hendaklah diperbaharui sesuai dengan kondisi dan situasi masa kini, untuk itu ijtihad perlu digalakkan kembali.<sup>19</sup>

Rahmad Djadnika menyimpulkan dalam salah satu tulisannya bahwa penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan penyesuaian pada budaya Indonesia yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan hukum Islam di negeri-negeri Islam lainnya seperti halnya yang terdapat pada jual beli, sewa menyewa, warisan, wakaf dan hibah. Demikian pula penerapan hukum Islam melalui yurisprudensi di Pengadilan Agama. Pada Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan telah banyak hukum Islam yang menjadi hukum positif, yang menjadi kompetensi Pengadilan

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm 34

Agama. Sedangkan di Jawa dan Madura masih sebahagian kecil hukum Islam yang menjadi hukum positif.<sup>20</sup>

Adapun gambaran lebih jauh tentang penerapan hukum Islam melalui Pengadilan Agama ini menurut Muchtar Zarkasyi, praktek peradilan menggambarkan bahwa Pengadilan Agama menerapkan syari'at baik dalam pengertian hukum syara' yang siap pakai dan tetap, maupun dengan jalan menggali hukum yang belum jelas ditetapkan oleh syara', baik hal itu telah ditetapkan dalam fiqih atau belum. Di bidang hukum waris umpamanya, melalui fatwa oleh salah satu Pengadilan Agama di Jawa Tengah telah terungkap cepatnya perkembangan pemikiran hakim Pengadilan Agama untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang ini.<sup>21</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, baik yang diungkapkan oleh Rachmat Djatnika maupun Muchtar Zarkasyi tampak bahwa sebenarnya Pengadilan Agama cukup berperan dalam proses penerapan hukum Islam di Indonesia, namun masih banyak juga menghadapi permasalahan sehingga diperlukan sekali adanya Kompilasi Hukum Islam untuk dijadikan pegangan dalam penerapan hukumnya.

Penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam Pengadilan Agama maupun dalam perundang-undangan menurut Rachmat Djatnika mengandung masalah Ijtihadiyah yang diselesaikan dengan *ijtihad* (ulama Indonesia) dengan menggunakan metode-metode *al-istihsan*, *al-istihsan*, *al-'urf*, dan metode-metode *istihsan* lainnya dengan tujuan *jalal maslahah wa dar'u al-mafasid*. Kalau ada yang tidak sependapat dengan hasil *ijtihad* tersebut sedangkan hakim memutuskan

---

<sup>20</sup> Rahmat Djatnika, *Sosialisasi Hukum Islam di Indonesia*, dalam Abdurrahman Wahid, ed. al, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), hlm. 254

<sup>21</sup> Muchtar Zarkasyi, *Hukum Islam*, Op.Cit, hlm. 9

dengan ketentuan yang tersebut dalam perundang-undangan, maka *ijtiha>d la>yuns}had}u bil ijtiha>d*).<sup>22</sup>

Untuk lebih jelasnya perlu dikutip keterangan-keterangan yang dikemukakan oleh para tokoh yang banyak terlibat dalam penyusunan kompilasi hukum Islam dan apa yang dikemukakan adalah secara langsung berkenaan dengan latar belakang dibuatnya kompilasi Hukum Islam. Di sini, akan dikutip keterangan-keterangan dari KH.Hasan Basry, Busthanul Arifin, Masrani Basran dan M. Yahya Harahap. Yang pertama adalah ketua Majelis Ulama Indonesia yang banyak sekali terlibat dalam penyusunan kompilasi, sedangkan tiga orang berikutnya adalah para hakim Agung yang sebenarnya menjadi motor penggerak dan pelaksanaan proyek penyusunan kompilasi hukum Islam. Sekalipun dalam pendapat mereka terdapat perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lain tetapi ini bukanlah pertentangan. Karena perbedaan sudut pandang maka keterangan tersebut harus dilihat sebagai saling mengisi antara satu dengan yang lainnya.

Dalam salah satu tulisannya mengenai perlunya kompilasi Hukum Islam, K.H. Hasan Basry (Ketua Umum MUI) menyebutkan Kompilasi Hukum Islam ini sebagai keberhasilan besar umat Islam Indonesia pada Pemerintahan Orde Baru ini. Sebab dengan demikian, nantinya umat Islam di Indonesia akan mempunyai pedoman fiqh yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan ini dapat diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran keputusan dalam lembaga-lembaga Peradilan Agama dan sebab-

---

<sup>22</sup> Rachmat Djatnika, *Sosialisasi Hukum Islam di Indonesia*, *Op.cit.*, hlm. 254.

sebab *khilaf* yang disebabkan oleh masalah *fiqh* akan dapat diakhiri.<sup>23</sup> Dari penegasan ini tampak bahwa latar belakang pertama dari diadakannya penyusunan kompilasi adalah karena adanya kesimpangsiuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah-masalah Islam.

Bustanul Arifin misalnya mempersoalkan tentang adanya masalah hukum Islam yang diterapkan oleh pengadilan Agama. Bahwa hukum Islam (*fiqh*) tersebut dalam sejumlah besar kitab susunan para fuqoha beberapa abad yang lalu. Biasanya dikatakan bahwa dalam setiap masalah selalu ditemukan lebih dari satu pendapat (*qaul*). Wajar jika orang bertanya "Hukum Islam yang mana?" Bagi pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok tertentu mungkin telah jelas mengingat masing-masing telah menganut paham tertentu. Akan tetapi yang ditekankan di sini adalah bahwa untuk diberlakukan di Pengadilan, suatu peraturan harus jelas dan sama bagi semua orang, yakni harus ada kepastian hukum.<sup>24</sup>

Mengenai kitab-kitab rujukan bagi Pengadilan Agama pada dasarnya adalah sangat beragam, akan tetapi pada tahun 1958 telah dikeluarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan Agama/Mahkamah Syari'iyah di luar Jawa dan Madura. Dalam huruf B surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara, maka para Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'iyah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab di bawah ini :

---

<sup>23</sup> K.H. Hasan Basry, *Perlunya Kompilasi Hukum Islam*, *Mimbar Ulama*, No. 104 Th. X April 1986. hlm. 60

<sup>24</sup> Bustanul Arifin, *Pemahaman Hukum Islam dalam Konteks Perundang-Undangan*, *Wahyu*, No. 108 Th. VII Mei 1985, hlm. 27.

1. *Al-Ba>ju>ry*;
2. *Fath} al-Mu'i>n dengan syarahnya*;
3. *Syarqa>wy 'ala at-Tahri>r*;
4. *Qalyu>by / Mah}ally*;
5. *Fath} al-Waha>b dengan syarahnya*;
6. *Tuh}fah*;
7. *Targhi>b al-Musta>q*;
8. *Qawa>ni>n Syar'iyyah li as-Sayyid Us\ma>n bin Yah}ya>*;
9. *Qawa>ni>n Syar'iyyah li as-Sayyid Sadaqah Dakhla>n*;
10. *Syamsu>riy fi al-fara>'id*;
11. *Bugyah al-Mustarsyidi>n*;
12. *Al-Fiqhu 'ala> Madza>bi al-Arba'ah*
13. *Mugni> al-Muh}ta>j*;<sup>25</sup>

Umumnya kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab klasik dalam maz\hab Sya>fi'i, kecuali untuk no. 12 yang bersifat komparatif atau perbandingan maz\hab. Begitu juga hampir semua kitab ditulis dalam bahasa Arab kecuali no. 8 yang ditulis dalam bahasa Melayu Arab. Materi tersebut kelihatannya memang masih belum memadai, sehingga sering kali dikeluarkan instruksi maupun surat edaran untuk menyeragamkan penyelesaian perkara kasus demi kasus.

Dalam salah satu ceramahnya pada Muktamar Muhammadiyah di Solo tanggal 9 Desember 1985 yang kemudian dipublikasi dalam mass media, Masrani Basran mengemukakan beberapa hal yang melatarbelakangi diadakannya kompilasi hukum Islam ini. Pertama dikemukakannya tentang adanya ketidakjelasan persepsi tentang *syari<'ah* dan *fiqh*. Dikemukakannya bahwa sejak ratusan tahun di kalangan umat Islam di seluruh dunia termasuk Indonesia, terjadi kekurangjelasan atau kalau tidak dapat dikatakan "kekacauan persepsi" tentang arti dan ruang lingkup pengertian *syari<'ah Islam*. Keadaan persepsi yang tidak seragam tentang *syari<'ah* akan dan telah menyebabkan hal-hal :

---

<sup>25</sup> Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 26. Lihat Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Op. Cit, hlm. 21-22. Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 44.

1. Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut dengan Hukum Islam itu;
2. Ketidakjelasan bagaimana melaksanakan *syari'ah Islam* itu;
3. Akibat yang lebih jauh lagi, adalah kita tidak mampu mempergunakan jalan-jalan dan alat-alat yang telah tersedia dalam UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya.<sup>26</sup>

Sebagaimana Busthanul Arifin, Masrani Basran dalam tulisannya juga mengemukakan situasi hukum Islam di Indonesia. Dikatakan bahwa situasi hukum Islam di Indonesia tidak berbeda dengan Negara-negara lain, yaitu tetap tinggal dalam “kitab-kitab kuning”, kitab-kitab yang merupakan karangan dan hasil pemikiran (*ijtihad*) seseorang, maka tiap-tiap kitab kuning itu diwarnai dengan pendapat dan pendirian masing-masing pengarangnya. Untuk dasar pemberian fatwa-fatwa tergantung pada kemauan dan kehendak orang-orang yang meminta fatwa tersebut. Timbul apa yang dikenal dengan masalah-masalah *khilafiyah*, yang dalam bidang atau segi teori tidak menjadi soal, karena hal yang demikian itu justru menjadi perlambang kebebasan berpikir (*ijtihad*) dalam hukum Islam.<sup>27</sup>

Ide rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia ini timbul setelah lebih dari 18 (delapan belas) tahun hakim pada peradilan agama menjadikan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) sebagai Buku Rujukan dalam menyelesaikan sengketa diantara masyarakat muslim pencari keadilan di Indonesia, di bidang Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan. Sejak semula tujuan penyusunan KHI adalah untuk mempersatukan persepsi, pola pikir dan pola pandang hakim pada

---

<sup>26</sup> Masrani Basran, *Kompilasi Hukum Islam, Mimbar Ulama*, No. 104 Th X April 1986, hlm. 7. Lihat juga Amrullah Ahmad, et. al, *Prospek Hukum Islam..*, Op.Cit, hlm. 14.

<sup>27</sup> Masrani Basran, *Kompilasi Hukum Islam..*, Op. Cit, hlm. 8-9

peradilan agama, dalam rangka penyelesaian sengketa tersebut, agar para hakim tidak lagi meruju' kepada kitab-kitab *fiqh* dari berbagai maz\hab, yang hanya akan mengakibatkan terjadinya disparitas produk hakim untuk perkara yang sama.

Cita-cita luhur mempersatukan persepsi hakim melalui KHI, dalam implementasinya justru telah terjadi disparitas putusan dalam kasus yang sama, misalnya: Pasal 185 tentang ahli waris pengganti, sebagian hakim menolak adanya ahli waris pengganti dengan alasan sewaktu pewaris meninggal, KHI belum lahir,<sup>28</sup> ada juga yang menerima secara terbatas, yaitu sebatas cucu saja (misalnya di kalangan hakim wilayah PTA Jawa Timur), ada pula hakim yang tidak terbatas sampai cucu saja, bahkan hingga lapis keempat, piyut atau canggah dapat ditetapkan sebagai ahli waris pengganti, seperti kasus dimana Pewaris meninggal sekitar tahun 1930-1939. Juga dalam putusan mengenai anak angkat, ada hakim yang langsung memberikan bagian *wasiat wajibah* 1/3 dari harta warisan, ada yang menyamakan dengan bagian anak kandung; ada yang tidak boleh sama dengan apa yang didapat oleh anak kandung maupun ahli waris lainnya, atas dasar lebih mengutamakan ahli waris. Begitu pula putusan atas kasus anak yang murtad, ada hakim yang tidak memberi bagian, ada pula yang memberi bagian *wasiat wajibah* di bawah nilai bagian anak yang muslim, dan ada hakim yang memberi bagian sama dengan anak muslim. Kenyataan seperti ini menurut penulis, jauh lebih baik meruju' justru kepada kitab-kitab Fiqh yang mendasarkan

---

<sup>28</sup> Asas legalitas: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. (Pasal 4 ayat (1) UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PP. IKAHI, 2008), hlm. 10. menyatakan: Asas legalitas dapat dimaknai '*hak perlindungan hukum*' dan sekaligus '*hak persamaan hukum*'. Muchsin: "*hukum tidak dapat berlaku surut*". Dalam hal Pewaris meninggal dunia sebelum lahirnya KHI.

pendapat para Ulama Mujtahid tersebut kepada nash al-Qur'an dan Hadits, daripada KHI yang sepenuhnya bersandarkan pemikiran.<sup>29</sup>

Hukum kewarisan sebagai suatu pernyataan tekstual yang tercantum dalam Al-Qur'an merupakan suatu hal yang absolut dan universal bagi setiap muslim untuk diwujudkan dalam kehidupan sosial. Sebagai ajaran yang universal, Hukum Kewarisan Islam mengandung nilai-nilai abadi dan unsur yang berguna untuk senantiasa siap mengatasi segala kesulitan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu.

Al-Qur'an mengajarkan hukum jauh lebih luas dari apa yang diartikan oleh ilmu hukum, sebab hukum menurut Al-Qur'an, tidak hanya diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur hidup bermasyarakat, tetapi juga mengatur segala sesuatu yang ada dalam alam semesta raya ini.<sup>30</sup>

Menurut Attamimi, KHI yang diberi wadah dengan Inpres No. 1 Tahun 1991 sebagaimana disebutkan di dalam sejarah KHI jelas menunjukkan, bahwa KHI bukan aturan hukum setingkat peraturan perundang-undangan. KHI adalah hukum tidak tertulis, tetapi dihimpun dalam sebuah buku, oleh karena itu untuk menghindari salah paham, sebaiknya KHI ditulis tidak dengan pasal-pasal (apalagi dengan Buku, Bab, dan

---

<sup>29</sup> Taufiq, *Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris*, Red Top Panitia Seminar Nasional, 2010, beliau menulis dalam makalahnya antara lain: Para sarjana hukum yang dalam seminar KHI dipelopori oleh KH. Khalid, SH. dan Yahya Harahap, SH, keduanya menjabat Hakim Agung, berpendirian bahwa anak-anak dari anak perempuan pewaris merupakan waris pengganti mawali dari ibunya, sesuai dengan ajaran kewarisan bilateral dari Prof. Dr. Hazairin yang sejajar dengan ajaran kewarisan aliran Syi'ah. Menurut beliau ayat 7 Surah An-Nisaa' telah menghapus sistem kewarisan Hukum Adat Arab pra Islam yang bersifat unilateral patrilineal. Maka cucu-cucu keturunan anak perempuan atau anak laki-laki, menduduki ibunya atau bapaknya yang meninggal lebih dahulu, sebagai waris pengganti sebagaimana dimaksud oleh ayat 33 Surat An-Nisaa';

<sup>30</sup> Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Op.Cit, hlm. 2



Bagian) tetapi cukup dengan angka Arab, yang berurutan dari nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai selesai.<sup>31</sup>

Lebih lanjut Attamimi mengatakan, bahwa inpres hanya berlaku untuk suatu keperluan khusus, seperti Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tersebut isinya adalah Instruksi Presiden kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI; begitu Menteri Agama mencetak dan menyebarluaskan Buku KHI tersebut, maka berakhirilah instruksi tersebut. Berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 bahwa KHI dilaksanakan dengan keputusan Menteri Agama nomor 154 tahun 1991. Penyusunan KHI mengenai perkawinan didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.<sup>32</sup>

Moch. Koesnoe menyatakan, meskipun KHI berdasarkan Instruksi Presiden kepada Menteri Agama, kedudukan KHI menurut Sistem Hukum Nasional, tetap sebagai suatu karya dari perorangan, dan bukan merupakan peraturan resmi yang keluar dari instansi pemerintah, lebih-lebih bukan suatu undang-undang atau dengan kata lain KHI tidak mempunyai kedudukan sebagai sesuatu aturan hukum tertulis di dalam sistem hukum nasional. Sedangkan tinjauan dari segi *yuridis substansial* atau disebut juga sebagai tinjauan yuridis materil, bahwa Sistem Hukum Nasional yang berlandaskan kepada filsafat Pancasila dan UUD 1945 menganut ajaran, bahwa dalam menafsirkan sesuatu pasal perundang-undangan, harus dipahami dengan sungguh-sungguh suasana kebatinan menurut istilah dalam bahasa Jerman *geistliche hintergrun*

---

<sup>31</sup> A. Hamid S. Attamimi, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), Cet. I, hlm. 154.

<sup>32</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos wacana Ilmu), hlm. 11. Lihat Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 28.

dari perundang-undangan tersebut. Di dalam bidang ilmu hukum positif, yang mengakui dan mengajarkan hukum tertulis dan tidak tertulis, kedudukan KHI dapat dilihat sebagai apa yang disebut sebagai *communis opinio doctorum* artinya dilihat dari segi substansial, KHI belum dapat dikatakan sebagai suatu hukum tidak tertulis dalam tata hukum nasional, loka karya para ulama dan pakar Hukum Islam (hanya dapat dianggap sebagai Ijma' Ulama dan Pakar Hukum Islam Indonesia).<sup>33</sup>

KHI merupakan hukum materil dari salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia, berlakunya KHI tersebut berdasarkan Inpres No: tahun 1991 tanggal 10 juni tentang KHI, dan telah di instruksikan kepada Menteri Agama agar disebarluaskan dan digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukanya. Dengan surat keputusan Nomor 154 tahun 1991 Menteri Agama telah memutuskan tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi Pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan KHI tersebut untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.
2. KHI ini sedapat mungkin digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan disamping peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>34</sup>

Secara formil KHI yang lahir atas dasar tujuan mulia pejabat-pejabat Mahkamah Agung RI dan Departemen Agama RI (sekarang Kementerian Agama RI)

---

<sup>33</sup> Moch. Koesnoe, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Indah Grafika, 1995), Dikutip oleh Majalah Varia Peradilan Nomor 122, November 1995.

<sup>34</sup> Mohammad Mahfud MD et al, *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Pers, 1993), hlm. 7

serta Tokoh Ulama terkemuka di Indonesia tersebut, yaitu guna keseragaman rujukan hakim-hakim pada peradilan agama dan telah diberi landasan pemberlakuan dan penyebarluasannya dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 diakui sebagai karya agung dan luhur.

Dalam konsideran menimbang antara lain dinyatakan, bahwa Alim Ulama Indonesia dalam loka karya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988 telah menerima dengan baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Atas dasar itu pulalah, KHI dapat disebut sebagai buah karya Alim Ulama Indonesia.<sup>35</sup>

Demikian beberapa “pandangan” yang dikemukakan berkenaan dengan latar belakang diadakannya kompilasi hukum Islam yang permasalahannya bertumpu pada pelaksanaan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama. Mungkin masih banyak lagi permasalahan yang dapat disebutkan sebagai tambahan dalam lingkup yang lebih luas. Namun alasan yang disebutkan di atas untuk sementara dapat dikatakan sebagai latar belakang mengapa dibentuk kompilasi hukum Islam ini.

Bila usaha penyusunan kompilasi Hukum Islam dianggap adalah merupakan bagian dari upaya dalam rangka mencari pola fiqh yang bersifat khas Indonesia atau fiqh yang bersifat kontekstual maka proses ini telah berlangsung lama sekali sejalan dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia atau paling tidak sejalan dengan kemunculan ide-ide pembaharuan dalam pemikiran hukum Islam Indonesia seperti yang antara lain dipelopori oleh Prof. Hazairin, Prof. Hasbi Ash-Shiddieqy dan

---

<sup>35</sup> Departemen Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum, 2004), hlm. 303.

sebagainya. Akan tetapi, kalau dilihat secara lebih sempit lagi, ia merupakan suatu rangkaian proses yang berlangsung sejak tahun 1985.

Gagasan untuk mengadakan kompilasi Hukum Islam di Indonesia untuk pertama kali diumumkan oleh Menteri Agama R.I. Munawir Sadzali, MA pada bulan Februari 1985 dalam ceramahnya di depan para mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, semenjak itu ide ini menggelinding dan mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak. Dalam buku "Prof. K.H. Ibrahim Husein dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia" diperoleh kesan seakan-akan ide ini berpangkal dari pemikiran K.H. Ibrahim Husein yang kemudian disampaikan kepada Prof. H. Bustanul Arifin SH, Hakim Agung Ketua Muda Mahkamah Agung yang membawahi Peradilan Agama yang menerima dan memahami dengan baik.<sup>36</sup> Memang tidak jelas di sini apakah ide yang dikemukakan oleh Ibrahim Husein tersebut sesudah atau sebelum pelontaran ide Menteri Agama dimaksud.

Menurut Abdul Chalim Mohammad gagasan untuk melakukan kompilasi Hukum Islam ini pada awal mulanya setelah 2,5 tahun lebih Mahkamah Agung terlibat dalam kegiatan pembinaan Badan-badan Peradilan Agama dan dalam penataran-penataran keterampilan teknis justisial para hakim agama baik ditingkat nasional maupun regional.<sup>37</sup> Dalam tulisannya yang lain, Bustanul Arifin mengemukakan lebih jelas mengenai hal tersebut. Dikatakan bahwa ide kompilasi hukum Islam timbul setelah berjalan dua setengah tahun Mahkamah Agung (MA) membina bidang teknis yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini berdasar pada Undang-undang No. 14

---

<sup>36</sup> Panitia penyusunan Biografi, *Prof. K.H. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Putra Harapan, 1990), hlm. 223-224.

<sup>37</sup> Abdul Chalim Muhammad, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Sebagai Pranata Hukum Nasional*, *Pesantren*, No. 2/vol.VII/1990, hlm. 35.

tahun 1970 yang menentukan bahwa pengaturan personal, keuangan dan organisasi Pengadilan-pengadilan yang ada diserahkan kepada Departemen masing-masing. Sedangkan pengaturan teknis yustisial ditangani oleh Mahkamah Agung. Meskipun Undang-undang tersebut telah ditetapkan tahun 1970, akan tetapi pelaksanaannya di lingkungan Peradilan Agama baru bisa dilakukan pada tahun 1982 setelah ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama. SKB itu merupakan jalan pintas tanpa menunggu lahirnya Undang-undang pelaksanaan Undang-undang No. 14 tahun 1970 di atas untuk peradilan Agama.<sup>38</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut tampak bahwa ide untuk mengadakan kompilasi Hukum Islam ini memang baru muncul sekitar tahun 1985 dan kemunculan ini adalah merupakan hasil kompromi antara pihak Mahkamah Agung dengan Departemen Agama. Langkah untuk mewujudkan kegiatan ini mendapat dukungan banyak pihak. Menurut Prof. Ismail Suny, pada bulan Maret 1985 Presiden Soeharto mengambil prakarsa sehingga terbitlah SKB (Surat Keputusan Bersama) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama yang membentuk proyek Kompilasi Hukum Islam.<sup>39</sup>

Melalui keputusan Bersama ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 25 tahun 1985 tentang penunjukan pelaksana proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi dimulailah kegiatan proyek dimaksud yang berlangsung untuk jangka waktu 2 tahun. Pelaksanaan proyek ini kemudian

---

<sup>38</sup> Bustanul Arifin, *Kompilasi : Fiqh Dalam Bahasa Undang-undang, Pesantren*, No. 2 Vo. II/1985, hlm. 26

<sup>39</sup> Ismail Suny, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam Eddi Rudiana Arief, *et. al Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan pembentukan*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 6-7.

didukung oleh Keputusan Presiden No. 191/1985 tanggal 10 Desember 1985 dengan biaya sebesar Rp. 230.000.000.00. Biaya sebesar ini tidak berasal dari APBN tetapi langsung dari Presiden Soeharto sendiri<sup>40</sup>. Disini juga tampak betapa besarnya komitmen Presiden dalam mensukseskan proyek tersebut.

Menurut surat keputusan bersama tersebut ditetapkan bahwa pimpinan umum dari proyek adalah Prof. H. Busthanul Arifin, SH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung dengan dibantu oleh dua orang wakil pimpinan umum masing-masing HR. Djoko Soegianto, SH Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata tidak tertulis Mahkamah Agung dan H. Zaini Dahlan, MA Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. Sebagai pimpinan pelaksana proyek adalah H. Masrani Basran, SH Hakim Agung Mahkamah Agung dengan wakil Pimpinan Pelaksanaan H. Muchtar Zarkasih, SH. Selanjutnya dengan surat keputusan pimpinan pelaksana proyek tanggal 24 April 1985 No. 01/MA/PPHI/85 telah disusun Tim pelaksana yang bersifat lebih administratif dalam menunjang pelaksanaan proyek yang bersangkutan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara: pengumpulan data, wawancara, lokakarya, studi perbandingan.

Bidang yang digarap dengan usaha ini adalah bidang Hukum perkawinan, hukum kewarisan, wakaf, hibah, shadaqah, *baitul mal* dan lain-lain yang menjadi kewenangan peradilan agama.<sup>41</sup> Penyusunan KHI ini dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam peraturan perundang-undangan yang penyusunannya terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

---

<sup>40</sup> Panji Masyarakat No. 502 th. XXVII tanggal 1 Mei 1986.

<sup>41</sup> Muchtar Zarkasyi, *Hukum Islam dalam Putusan-putusan Pengadilan Agama*, Op.cit., hlm. 10.

- a. Tahap persiapan
- b. Tahapan pengumpulan data/bahan baku, yang diperoleh dari berbagai sumber baik tertulis maupun tidak tertulis. Tahap ini dilakukan melalui empat jalur;
  1. Jalur Kitab : Dengan mengumpulkan kitab-kitab hukum/ kitab-kitab fiqh (pengkajian ini yaitu dengan cara melakukan penelaahan 38 kitab fiqh dari berbagai maz\hab, minimal 13 kitab yang selama ini oleh Departemen Agama diwajibkan sebagai buku pedoman/pegangan para hakim Agama mencakup 160 masalah hukum keluarga).
  2. Jalur Ulama : Dengan mewawancarai para ulama di seluruh Indonesia, terutama ulama fiqh (wawancara dengan 181 ulama yang tersebar di sepuluh daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama, waktu itu ditetapkan 10 lokasi di Indonesia : Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram dan Banjarmasin. Ditambahkannya bahwa para ulama lainnya, baik perseorangan maupun golongan yang mewakili ormas-ormas Islam yang ada.
  3. Jalur Yurisprudensi : Kita himpun putusan-putusan peradilan Agama dari dulu sampai sekarang, sejak zaman penjajahan Belanda hingga kompilasi tersusun (penelaahan produk pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama yang terhimpun dalam 16 buku yang terdiri atas empat jenis yaitu Himpunan Putusan PTA, Himpunan Fatwa Pengadilan, Himpunan Yurisprudensi Pengadilan Agama dan *Law Report* tahun 1977-1984) yang masih bisa ditemukan dalam arsip-arsip Pengadilan Agama.

4. Jalur studi perbandingan: mengenai pelaksanaan dan penegakan hukum Islam di Negara-negara muslim (kajian perbandingan ini antara lain ke negara Maroko, Mesir dan Turki). Tim perumus melihat ke luar negeri, bagaimana penerapan hukum Islam di sana dan sejauhmana hal ini dapat diterapkan dengan memperbandingkannya dengan situasi dan kondisi serta latar belakang budaya Indonesia.

Setelah keempat jalur itu selesai dilaksanakan, selanjutnya panitia perumus menyusun bahan-bahan dimaksud secara logis dan sistematis dan seterusnya dituangkan ke dalam pasal-pasal dengan bahasa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>42</sup>

- c. Tahap III : Tahap penyusunan rancangan kompilasi hukum Islam dari data-data tersebut.
- d. Tahap IV : Tahap penyempurnaan dengan mengumpulkan masukan-masukan akhir dari para ulama/cendekiawan muslim seluruh Indonesia yang ditunjuk melalui lokakarya.

Dalam penyusunan KHI tersebut, tidak terlepas dari kitab-kitab fikih sebagai referensinya, setidaknya ada 38 kitab yang menjadi rujukan KHI. Sebagian besar merupakan fikih Syafi'iyah, yang memang kenyataannya masyarakat Indonesia banyak menganut fikih waris *sunni* mazhab Sya'fi'i. Hal ini terkait dengan kesejarahan yang panjang sejak masuknya Islam di Indonesia.<sup>43</sup> Namun kitab-kitab fikih dari maz\hab

---

<sup>42</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam; Lengkap dan Praktis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 18. Lihat Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam.., Op.Cit*, hlm. 27-28

<sup>43</sup> A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 3



lain juga digunakan, agar dapat digunakan sebagai penunjang dan bahan perbandingan.

Dalam penelitian kitab-kitab fiqh sebagai sumber Kompilasi Hukum Islam telah dikaji dan ditelaah sebanyak 38 buah/macam kitab fiqh yang dibagi pada 7 IAIN yang telah ditunjuk yaitu :

a. IAIN "ARRANIRI" Banda Aceh :

1. *Al-Ba>ju>ry*
2. *Fath} al-Mu'i>n*
3. *Syarqa>wy 'ala at-Tahri>r*
4. *Mugni> al-Muh}ta>j*
5. *Niha>yah al-Muh}ta>j*
6. *Asy-Syarqa>wy*

b. IAIN "SYARIF HIDAYATULLAH" Jakarta :

1. *I'a>natu at}-T}ha>libi>n*
2. *Tuh}fah*
3. *Targhi>b al-Musta>q*
4. *Bulgah as-Sa>lik*
5. *Syamsu>riy fi al-fara>'id}*
6. *Al-Mudawwamah*

c. IAIN "ANTASARI" Banjarmasin :

1. *Qalyu>by / Mah}ally*
2. *Fath} al-Waha>b dengan syarah}nya*
3. *Bida>yah al-Mujtahid*
4. *Al-Umm*
5. *Bugyah al-Mustarsyidi>n*
6. *Aqi>dah wa asy-Syari'ah*

d. IAIN "SUNAN KALIJAGA" Yogyakarta :

1. *Al-Muh}alla>*
2. *Al-Waji>z*
3. *Fath} al-Qadi>r*
4. *Al-Fiqhu 'ala> Madza>bi al-Arba'ah*
5. *Fiqh as-Sunnah*

e. IAIN "SUNAN AMPEL" Surabaya :

1. *Kasysya>f al-Qina>'*
2. *Majmu>'ah Fata>wi> Ibnu Taimiyah*
3. *Qawa>ni>n Syar'iyyah li as-Sayyid Us\ma>n bin Yah}ya>*
4. *Al-Mugni>*

5. *Al-Hida>yah Syarh} Bida>yah al-Muhtadi>*

f. IAIN "ALAUDDIN" Ujung Pandang :

1. *Qawa>ni>n Syar'iyyah li as-Sayyid Sadaqah Dakhla>n*
2. *Nawwa>b al-Jali>l*
3. *Syarh} Ibnu 'A>bidi>n*
4. *Al-Muwat}t}a'*
5. *Ha>syiyah Syamsuddi>n Moh. Irfan Dasuki*

g. IAIN "IMAM BONJOL" Padang :

1. *Bada>'I as}-S}ana>'i*
2. *Tabyi>n al-Haqa>iq*
3. *Al-Fatawi al-Hindiyyah*
4. *Fath} al-Qadi>r*
5. *Niha>yah.*<sup>44</sup>

Kitab-kitab dimaksud ternyata tidak hanya terbatas pada kitab-kitab fiqih Sya>fi'i saja, akan tetapi dari maz\hab lain bahkan dari pemikiran aliran pembaharu seperti buku-buku *Ibn Taimiyah*. Tetapi juga diambil dari hasil fatwa-fatwa yang berkembang di Indonesia, seperti hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Tarjih Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan sebagainya.<sup>45</sup> Sehingga kalau dilihat dari sumber rujukan dan tenaga yang mengerjakannya sudah cukup memadai untuk menghasilkan karya hukum yang diperlukan.

KH. Hasan Basri (Ketua MUI) mengemukakan bahwa kompilasi adalah sekedar menghimpun dan mengumpulkan fiqh yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang selama ini telah banyak diamalkan oleh umat Islam sendiri dengan meninggalkan pendapat yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, hasil kompilasi tersebut insya Allah akan cukup aspiratif, tidak ada unsur

---

<sup>44</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Op.Cit, hlm. 39-41. Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Islam...* Op.Cit. hlm. 47

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, *Tujuan Kompilasi Hukum Islam, dalam IAIN Syarif Hidayatullah, Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, (Jakarta : Hikmat Syahid Indah, 1988), hlm. 93.

paksaan. Sebab prosesnya dilakukan melalui wawancara dengan meminta pendapat para ulama melalui diskusi dan seminar.<sup>46</sup>

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam, selain digarap melalui 4 jalur tersebut di atas juga mendapat dukungan dan masukan dari beberapa organisasi Islam. Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, misalnya pada tanggal 8-9 April 1986 bertempat di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah menyelenggarakan "Seminar Kompilasi Hukum Islam" yang juga dihadiri oleh Menteri Agama dan Ketua MUI KH. Hasan Basri.<sup>47</sup>

Setelah pengumpulan data yang diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dilanjutkan dengan pengolahan data dan penyusunan draft kompilasi Hukum Islam oleh tim yang telah ditentukan, dan draft inilah yang kemudian diajukan dalam satu Lokakarya Nasional yang diadakan khusus untuk penyempurnaannya. Peranan lokakarya ini sangat penting sekali sebagaimana tampak dengan disebutkannya dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi ini dengan kata-kata "menyebarkan" kompilasi Hukum Islam ini sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam Lokakarya di Jakarta pada tanggal 2 sampai 5 Februari 1988.

Lokakarya yang berlangsung selama 5 hari (2-6 Februari 1988) bertempat di Hotel Kartika Chandra Jakarta, dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung H. Ali Said SH. Juga memberi kata sambutan Menteri Agama RI H. Munawir Sadzali MA. Setelah pembukaan, pimpinan proyek Prof. Busthanul Arifin SH memberikan beberapa penjelasan berkenaan dengan materi lokakarya, dan selanjutnya para peserta

---

<sup>46</sup> K.H. Hasan Basri, *Perlunya Kompilasi Hukum Islam*, Op.Cit, hlm. 61

<sup>47</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Op.Cit, hlm. 43-45

lokakarya dibagi ke dalam 3 komisi. Lokakarya yang membahas materi kompilasi Hukum Islam secara mendasar tentang masalah-masalah di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan yang merupakan masalah-masalah fikih yang selama ini banyak diperdebatkan.<sup>48</sup>

Pada tanggal 29 Desember 1989 pemerintah mengundang berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN 1989 No. 49) tentang Peradilan Agama setelah untuk sekian lama undang-undang ini menempuh proses yang cukup alot karena banyaknya reaksi yang bermunculan untuk menghalangi lahirnya undang-undang ini. Dengan demikian, maka dengan berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menjadi dorongan yang lebih kuat untuk memacu lahirnya hukum materiilnya yaitu kompilasi hukum Islam.

Dorongan kepada pemerintah untuk segera mengesahkan Kompilasi Hukum Islam itu muncul dari berbagai pihak. Hanya saja pada waktu itu masih terdapat perbedaan pandangan tentang produk hukum yang akan mewadahi kompilasi tersebut. Idealnya ia harus dituangkan dalam satu Undang-undang. Akan tetapi dikhawatirkan kalau Tim harus merancang kembali satu Undang-undang yang prosesnya akan berlarut-larut dan memakan waktu yang lama. Ada pula keinginan untuk menuangkannya dalam bentuk peraturan pemerintah atau Keputusan Presiden.

Muktamar Muhammadiyah ke-42 di Yogyakarta mengharapkan kepada pemerintah untuk segera mengesahkan kompilasi Hukum Islam sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan beberapa hari sebelum Presiden menunaikan ibadah haji, tepatnya tanggal 10 Juni

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 46-48

1991, beliau menandatangani Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1990.<sup>49</sup> Sejak saat itu secara formal berlakulah kompilasi Hukum Islam di seluruh Indonesia sebagai Hukum materiil yang dipergunakan di lingkungan Peradilan Agama.

Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 22 Juli 1991 Menteri Agama telah mengeluarkan Keputusan No.154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Selanjutnya kompilasi ini disebarluaskan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No. 3694/EV/HK.003/AZ/91. Dengan adanya berbagai landasan hukum dimaksud kompilasi hukum Islam ini telah mempunyai tempat yang kokoh dalam sistem hukum Indonesia.<sup>50</sup>

Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Menurut Ismail Suny, Instruksi Presiden tersebut dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan Pemerintahan Negara. Apakah dinamakan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden, kedudukan hukumnya adalah sama. Karena itu pembicaraan mengenai kedudukan kompilasi tidak mungkin dilepaskan dari Instruksi Presiden di maksud.

Instruksi Presiden ini ditujukan kepada Menteri Agama, untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang sudah disepakati tersebut. Dikemukakan keputusan ini menyatakan :

---

<sup>49</sup> Ismail Suny, *Hukum Islam Ditinjau dari Sudut Pertumbuhan Teori Hukum di Indonesia*, Suara Muhammadiyah No. 16 Th. 76 Agustus 1991.

<sup>50</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Op.Cit, hlm. 49-50

PERTAMA : Menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari :

- a. Buku I      Tentang Hukum Perkawinan;
- b. Buku II     Tentang Hukum Kewarisan;
- c. Buku III    Tentang Hukum Perwakafan

Sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 untuk digunakan oleh Instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

KEDUA : Melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab

Sedangkan konsideran Instruksi tersebut menyatakan :

- a. Bahwa ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988 telah menerima baik rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.
- b. Bahwa kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh Instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut;
- c. Bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan.

Hanya saja dalam konsideran secara tersirat hal ini ada disebutkan bahwa Kompilasi ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang tersebut (maksudnya tentu bidang-bidang yang diatur oleh kompilasi yaitu Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan), oleh Instansi

pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Berdasarkan penegasan tersebut maka kedudukan kompilasi ini adalah sebagai “pedoman”.

Kemudian lebih lanjut yang menjadi dasar dan landasan dari Kompilasi ini adalah keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksana Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991. Pengaturan lebih lanjut adalah termuat dalam surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Pengadilan Agama Islam atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No. 3694/EV/HK.003/AZ/91 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang penyebarluasan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.<sup>51</sup>

Mengenai fungsinya yang pertama, secara singkat K.H. Hasan Basry menyebutnya sebagai kompilasi untuk menuju kodifikasi. Dikatakannya pula bahwa kompilasi hukum Islam yang kini tengah dicanangkan kalau nanti berhasil dikodifikasikan dan dijadikan Undang-undang/peraturan oleh pemerintah jelas merupakan sumbangan umat Islam yang sangat besar bagi pembangunan hukum nasional yang selama ini didambakan.<sup>52</sup> Dengan pendapat tersebut Busthanul Arifin mengatakan, kompilasi yaitu mengumpulkan pendapat-pendapat dalam masalah fiqh yang selama ini dianut oleh umat Islam Indonesia. Jadi bukan kodifikasi, sebab istilah ini mengandung arti menciptakan hukum baru atau mengubah yang telah ada.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 53-58

<sup>52</sup> K.H. Hasan Basry, *Pertunya Kompilasi Hukum Islam*, *Op.cit.*, hlm. 61.

<sup>53</sup> Bustanul Arifin, *Pemahaman Hukum Islam dalam Konteks...*, *Op.cit.*, hlm. 28.

## B. Deskripsi Material

Sebagaimana telah disinggung dalam uraian terdahulu bahwa kompilasi Hukum Islam terdiri atas 3 buku masing-masing Buku I tentang Perkawinan. Buku II tentang Kewarisan dan Buku III tentang Perwakafan. Pembagian dalam tiga buku ini hanya sekedar pengelompokan bidang hukum yang dibahas yaitu bidang hukum perkawinan (*munakaha*), bidang hukum kewarisan (*Fara'id*) dan bidang hukum perwakafan. Dalam kerangka sistematikanya masing-masing buku terbagi dalam berapa bab dan kemudian untuk bab-bab tertentu terbagi pula atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal.<sup>54</sup> Secara keseluruhan Kompilasi Hukum Islam terdiri atas 229 pasal dengan distribusi yang berbada-beda untuk masing-masing buku.

Adapun mengenai isi dari kompilasi Hukum Islam dapat dikemukakan secara singkat sebagai berikut :

### HUKUM PERKAWINAN

Sistematika kompilasi mengenai Hukum Perkawinan ini adalah sebagai berikut :

- I Ketentuan Umum (pasal 1)
- II Dasar-dasar Perkawinan (pasal 2-10)
- III Peminangan (pasal 11-13)
- IV Rukun dan syarat perkawinan (pasal 14-29)
- V Mahar (pasal 30-35)
- VI Larangan Kawin (pasal 39-44)
- VII Perjanjian perkawinan (pasal 45-52)

---

<sup>54</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Op.Cit, hlm.63



- VIII Kawin hamil (pasal 53-54)
- IX Bersiteri lebih dari satu orang (pasal 55-59)
- X Pencegahan perkawinan (pasal 60-69)
- XI Batalnya perkawinan (pasal 70-76)
- XII Hak dan kewajiban suami isteri (pasal 77-84)
- XIII Harta kekayaan dalam perkawinan (pasal 85-97)
- XIV Pemeliharaan anak (pasal 98-106)
- XV Perwalian (107-112)
- XVI Putusnya perkawinan (pasal 113-148)
- XVII Akibatnya putusnya perkawinan (pasal 149-162)
- XVIII Rujuk (pasal 163-169)
- XIX Masa berkabung (pasal 170).<sup>55</sup>

#### HUKUM KEWARISAN

Sistematika kompilasi hukum kewarisan adalah lebih sempit bilamana dibandingkan dengan hukum perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Kerangka sistematikanya adalah sebagai berikut :

- Bab I Ketentuan Umum, memuat penjelasan singkat tentang kata-kata penting yang dimuat dalam buku II (pasal 171)
- Bab II Ahli waris (pasal 172-175)
- Bab III Besarnya bahagian (pasal 176-191)
- Bab IV Aul dan Rad (pasal 192-193)
- Bab V Wasiat (pasal 194-209)

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm.65-66, Lihat Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag 1991/1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Bandung:Humaniora- Anggota Ikapi, 1993), hlm.17-69

## Bab VI Hibah (pasal 210-214).<sup>56</sup>

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa Kompilasi Hukum Islam ini berisi tiga buku, dan masing-masing buku dibagi ke dalam beberapa Bab dan pasal, khusus bidang kewarisan diletakkan dalam buku II dengan judul “Hukum Kewarisan”, buku ini terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal.

Dalam Buku ke II Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kewarisan, membagi ahli waris dalam tiga golongan yaitu :

### a) Ahli Waris *al-Furu*

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 176 dan Pasal 182, ketentuan ini merupakan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Begitu juga dengan para ahli fiqh tidak ada perbedaan pendapat karena sudah jelas dan tegas Al-Qur'an mengaturnya.

### b) Ahli Waris *as-bah*

*as-bah* merupakan ahli waris yang bagiannya tidak dinyatakan dengan jelas oleh KHI tetapi keberadaannya diakui dalam Pasal 174 ayat 1 huruf a. Untuk itu Pasal 176 dan Pasal 182 KHI mengatur mengenai *as-bah*, mereka berhak untuk menghabisi semua harta jika tidak ada ahli waris yang lain atau semua sisa harta jika mewaris bersama dengan ahli waris *al-Furu*.

Mengenai *as-bah* pada prinsipnya hampir sama dengan *as-bah* dalam sistem kewarisan *patrilineal* tetapi Kompilasi Hukum Islam hanya

---

<sup>56</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Op.Cit, hlm.77-78. Lihat Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag 1991/1992, *Kompilasi Hukum Islam*., Op. Cit, hlm. 73-84. Lihat Suhrawardi K. Lubis dan Kornis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*., Op.cit, hlm. 19

mengenal dua macam *as}a>bah* yaitu *as}a>bah bin nafsi* dan *as}a>bah bil ghairi*.

#### c) Ahli waris Pengganti

Pengaturannya dalam Pasal 185 ayat 1 dan 2 KHI, suatu pengaturan yang sangat singkat tetapi kalau dicermati terkandung makna yang cukup padat dari ayat tersebut.

Sedangkan unsur-unsur di dalam mawaris ada 3 (tiga) hal, yaitu :<sup>57</sup>

1. *Tirkah*, yaitu harta peninggalan pewaris setelah dikurangi dengan biaya perawatan jenaah, pemabayaran hutang-hutang pewaris dan pelaksanaan wasiat.
2. *Muwari<s\* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan.
3. *Wari<s\* (ahli waris), orang yang akan menerima warisan.

#### HUKUM PERWAKAFAN

Bagian terakhir atau Buku ke III Kompilasi Hukum Islam adalah tentang Hukum perwakafan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

- |         |  |
|---------|--|
| Bab I   | Ketentuan Umum (pasal 215)   |
| Bab II  | Fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf (pasal 216-222)        |
| Bab III | Tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf (pasal 223-224)   |
| Bab IV  | Perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf (pasal 225-227) |
| Bab V   | Ketentuan peralihan (pasal 228). <sup>58</sup>                     |

<sup>57</sup> Otje Salman. S, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), hlm. 4.

<sup>58</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Op.Cit, hlm.81, Lihat Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag 1991/1992 , *Kompilasi Hukum Islam...*, Op.Cit. hlm. 87-94.

Hukum waris Islam merupakan salah satu cabang ilmu di dalam hukum Islam yang wajib untuk dipelajari dan diamalkan oleh semua umat Islam, yang bersumber pada Al Qur'an yang disampaikan oleh Rasulullah Saw.<sup>59</sup>

Dalam hukum kewarisan Islam terdapat beberapa asas, yang memperlihatkan bentuk dan karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu sendiri. Asas-asas tersebut berkaitan dengan sifat peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, cara pemilihan harta oleh yang akan menerima, kadar jumlah harta yang akan diterima, dan waktu terjadinya peralihan harta tersebut. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam dapat digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan dari hadist Nabi Muhammad SAW.

Adapun hukum kewarisan yang selama ini banyak dianut di Indonesia adalah hukum kewarisan hasil *ijtiha>d Sya>fi'i* yang terbentuk dari hukum masyarakat Arab yang *patrilineal*. Hal ini sebagai akibat pada masa itu ilmu tentang bentuk masyarakat belum berkembang, sehingga para *mujtahi>d Ahl as-Sunnah wa al-Jama>'ah* belum memperoleh bahan-bahan perbandingan mengenai hukum kewarisan yang dapat dijumpai dalam masyarakat.<sup>60</sup>

Antara hukum kewarisan Sya>fi'i (*patrilineal*) dengan kewarisan Hazairin (*bilateral*) terdapat berbagai perbedaan-perbedaan, dan yang paling menonjol adalah perbedaan dalam menyandarkan garis keturunan. Sya>fi'i menyandarkan garis keturunan kepada laki-laki tanpa melihat peran masing-masing dalam keluarga tersebut, sedangkan Hazairin memposisikan sejajar antara laki-laki dan perempuan, tergantung pada besar kecilnya peranan mereka dalam keluarga.

---

<sup>59</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 16

<sup>60</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tinta Mas, 1982), hlm. 2

Menurut Abu Bakar, Hazairin mengemukakan penalaran alternatif yang berintikan:<sup>61</sup>

1. Ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki sama-sama dapat menutup ahli waris kelompok keutamaan yang lebih rendah.
2. Hubungan kewarisan melalui garis laki-laki sama kuatnya dengan garis perempuan.
3. Ahli waris pengganti selalu mewaris, tidak pernah tertutup oleh ahli waris lain (utama)

Asas-asas yang terdapat dalam kewarisan Islam juga berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini karena memang yang dijadikan rujukan dalam KHI adalah hukum Islam. Asas-asas tersebut berkaitan dengan sifat peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang akan menerima, kadar jumlah harta yang akan diterima, dan waktu terjadinya peralihan harta tersebut.

Asas-asas tersebut adalah asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan secara singkat satu-persatu di bawah ini :<sup>62</sup>

#### 1) Asas ijbari

Asas ijbari mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Seandainya pewaris mempunyai hutang yang lebih besar dari warisan yang ditinggalkannya, ahli

---

<sup>61</sup> Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 15

<sup>62</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm.128-130

waris tidak dibebani untuk membayar hutang tersebut, hutang yang dibayar hanya sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Unsur Ijbari dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.<sup>63</sup>

Mengenai asas ijbari ini dalam KHI, secara umum terlihat pada ketentuan umum mengenai perumusan pengertian kewarisan, pewaris dan ahliwaris, sedangkan kalau dilihat secara khusus, terlihat dalam cara peralihan harta warisan, ketentuan ijbari ini terdapat dalam pasal 187 ayat 2 yang berbunyi: "...harta warisan yang harus dibagikan. . .". Kata harus ini diartikan sebagai asas ijbari.<sup>64</sup>

Ketentuan asas ijbari ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 7 yang menjelaskan bahwa: "*Bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada 'nasib' dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabatnya.*" Kata nasib dalam ayat tersebut dapat berarti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan si pewaris.

## 2) Asas bilateral

Asas *bilateral* yaitu; bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Tegasnya, jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewaris atau diwarisi dan baik dalam garis lurus ke bawah, ke atas serta garis ke samping, asas Bilateral tetap berlaku.<sup>65</sup> semua ahli waris memiliki peluang untuk mendapat warisan dari ayah maupun ibu. Asas bilateral ini

---

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Op.Cit, hlm. 18

<sup>64</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum...*, Op.Cit, hlm. 289

<sup>65</sup> Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 5

sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surat An Nisaa' ayat 7 yang menjelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga pihak ibunya, begitu pula dengan anak perempuan dan sebagai penjelasannya Q.S An-Nisa: 11, 12, dan 176.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, asas bilateral terlihat dalam pasal 174 ayat 1 mengenai pengelompokan ahli waris yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek (golongan laki-laki), serta ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek (golongan perempuan), menurut hubungan darah. Asas bilateral ini jelas terlihat karena telah disebutkan secara tegas golongan laki-laki dan golongan perempuan yang serempak atau sama-sama menjadi ahli waris.<sup>66</sup>

### 3) Asas individual

Kata individual berasal dari bahasa Inggris yang sudah dibakukan menjadi bahasa Indonesia, yang memiliki beberapa arti yaitu perseorangan, tersendiri, bersifat perseorangan atau pribadi.<sup>67</sup> Sedangkan dalam bahasa arab, perseorangan disebut dengan *al-Syakhsiyyun* atau *al-z}a>tiyu*.<sup>68</sup> maksudnya adalah bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris lainnya. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar masing-masing. Bisa saja harta warisan tidak dibagi-

---

<sup>66</sup> Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia untuk pertama kali dikemukakan oleh almarhum Prof. Hazairin. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum...*, Op.Cit, hlm. 289-290

<sup>67</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 252

<sup>68</sup> Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 82

bagikan, bila hal ini dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan, tidak dibagikan harta warisan itu tidak menghapuskan hak mewaris para ahli waris yang bersangkutan. Dan setiap ahli waris menerima bagiannya sendiri sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam Al Qur'an.

Asas individual ini dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada bab III pasal 176 sampai dengan pasal 180. Tetapi, khusus bagi ahli waris yang memperoleh harta warisan sebelum ia dewasa atau tidak mampu bertindak melaksanakan hak dan kewajibannya atas harta yang diperolehnya dari kewarisan, baginya diangkat wali berdasarkan putusan hakim atas usul anggota keluarganya. Hal ini diatur dalam pasal 184 Kompilasi Hukum Islam.<sup>69</sup>

#### 4) Asas keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Setiap ahli waris menerima bagiannya sesuai dengan tanggung jawab yang dipikulnya, yang pada akhirnya masing-masing ahli waris akan menerima kadar warisan yang sama. Sebagai contoh menurut Al Qur'an, ahli waris laki-laki menerima bagian 2 (dua) kali lebih banyak dari bagian ahli waris perempuan. Seorang laki-laki membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan perempuan karena laki-laki, dalam ajaran Islam, memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya dan untuk keluarganya, hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S An-Nisa : 34;



<sup>69</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum...*, Op.Cit, hlm.290



*"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."*<sup>70</sup>

Hal ini bila ditelusuri lebih jauh, maka akan ditemukan hikmah dari ketentuan tersebut. Bahwa ahli waris laki-laki dipandang memiliki tanggung jawab yang lebih besar, seperti memberi nafkah kepada keluarga. Sehingga bagiannya tersebut pada akhirnya akan habis digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Sedangkan wanita dengan mendapat bagian yang lebih kecil dari bagian laki-laki akan tetapi dia tidak dibebani tanggung jawab menafkahi keluarga, sehingga bagian yang diterimanya akan utuh. Asas ini dapat diartikan bahwa faktor perbedaan jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan artinya laki-laki mendapat hak kewarisan begitu pula perempuan mendapat hak kewarisan sebanding dengan yang didapat oleh laki-laki.

Dalam kompilasi hukum Islam asas keadilan berimbang ini terdapat dalam pasal 176 dan pasal 180 mengenai besarnya bagian bagi ahli waris. Asas keadilan berimbang ini juga dikembangkan dalam penyesuaian perolehan yang dilakukan pada waktu pembagian warisan melalui:

- a) Pemecahan secara *aul* dengan membebaskan kekurangan harta yang akan dibagi kepada semua ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. Hal ini terdapat dalam pasal 192.

---

<sup>70</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 123

b) *Radd* yaitu mengembalikan sisa (kelebihan) harta kepada ahli waris yang ada sesuai dengan kadar bagian masing-masing, dalam KHI soal *radd* terdapat dalam pasal 193.

c) *Takharu>j* atau *s\aluh* (damai) berdasarkan kesepakatan bersama, dalam KHI terdapat pada pasal 183.

#### 5) Asas semata akibat kematian

Asas semata akibat kematian, yaitu bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia dan selama yang mempunyai harta masih hidup maka secara kewarisan harta itu tidak dapat beralih kepada orang lain.<sup>71</sup>

Asas yang menyatakan bahwa kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, tercermin dalam rumusan berbagai istilah yaitu Hukum kewarisan, pewaris, ahli waris dan harta peninggalan. Dalam KHI Hal ini terdapat dalam pasal 171 pada bab ketentuan umum.<sup>72</sup>

### C. Ahli waris pengganti dalam KHI

Dalam Buku ke II Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kewarisan, membagi ahli waris dalam tiga golongan yaitu:

#### a) Ahli Waris *z\awi< al-Furu>d*

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 176 dan Pasal 182, ketentuan ini merupakan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Begitu juga dengan para ahli fiqih tidak ada perbedaan pendapat karena sudah jelas dan tegas Al-Qur'an mengaturnya.

<sup>71</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Op.Cit, hlm. 16-28

<sup>72</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum...*, Op,cit, hlm. 296

b) Ahli Waris *As}a>bah*

*As}a>bah* merupakan ahli waris yang bagiannya tidak dinyatakan dengan jelas oleh KHI tetapi keberadaannya diakui dalam Pasal 174 ayat 1 huruf a. Untuk itu Pasal 176 dan Pasal 182 KHI mengatur mengenai *as}a>bah*, mereka berhak untuk menghabisi semua harta jika tidak ada ahli waris yang lain atau semua sisa harta jika mewaris bersama dengan ahli waris *z}awi< al-Furu>d*.

Mengenai *as}a>bah* pada prinsipnya hampir sama dengan *as}a>bah* dalam sistem kewarisan patrilineal *Sya>fi'i* tetapi Kompilasi Hukum Islam hanya mengenal dua macam *as}a>bah* yaitu *as}a>bah bin nafsi* dan *as}a>bah bil ghairi*.

c) Ahli waris Pengganti

Ahli waris pengganti pada umumnya diberi makna, orang yang tampil sebagai ahli waris karena menggantikan kedudukan orang tuanya yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, tanpa membedakan apakah orang yang meninggal itu laki-laki atau perempuan.

Mengenai istilah ahli waris pengganti, Raihan A. Rasyid<sup>73</sup> membedakan antara orang yang disebut “ahli waris pengganti” dan “pengganti ahli waris”. Menurutnya, ahli waris pengganti adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu ia menjadi ahli waris dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris. Misalnya, pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.

Sedangkan pengganti ahli waris adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu dan pertimbangan tertentu mungkin menerima

---

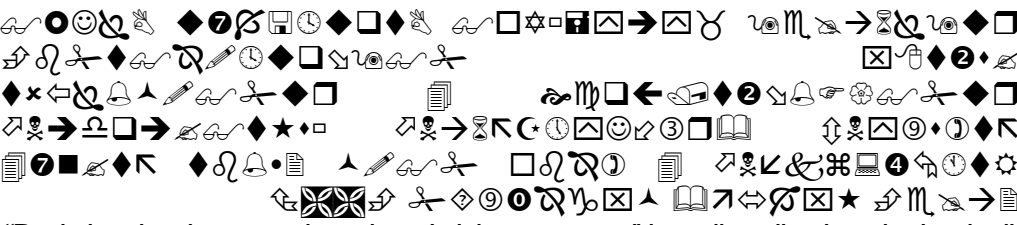
<sup>73</sup> Firdaus Muhammad Arwan, “*Silang Pendapat Tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya*” dalam *Mimbar Hukum*, No.23 (Jakarta: al Hikmah dan Depag RI, 1995), Vol. IV, hlm.54, No. 2, Desember 2007

warisan namun tetap dalam status bukan sebagai ahli waris. Misalnya, pewaris meninggalkan anak bersama cucu baik laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pada pewaris. Keberadaan cucu disini sebagai pengganti ahli waris.

Apa yang disebut dengan *plaatsvervulling* dalam KUHPerdata, dan apa yang disebut wasiat wajibah dalam undang-undang Mesir serta apa yang diatur pasal 185 KHI oleh Raihan A.Rasyid dinamakan pengganti ahli waris, bukan ahli waris pengganti.

Terlepas dari sebutan mana yang tepat, yang pasti dalam KHI digunakan sebutan ahli waris pengganti dan dalam tulisan ini digunakan sebutan ahli waris pengganti.

Konsep ahli waris pengganti menurut Hazairin<sup>74</sup> merupakan hasil pemikirannya dalam menafsirkan kata mawali yang ada dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 33 :



*"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu". (QS. Al-Nisa'; 33)*

Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia menurut penafsiran Hazairin<sup>75</sup> adalah orang yang tidak mempunyai keluarga lagi yang telah mengikat janji untuk meninggalkan sebagian atau semua harta peninggalan sesudah matinya kepada

<sup>74</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral...*, Op.Cit, hlm. 16

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 27-44

seseorang yang diwajibkan mengurus kematiannya dan menyelesaikan hutang-hutangnya serta memelihara di hari tuanya. Perjanjian semacam ini ditemukan pada masyarakat Minahasa yang disebut *ngaranan* atau di Bali yang disebut *makehidang raga*.

Lebih lanjut Hazirin mengemukakan bahwa perjanjian seperti ini harus dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai keluarga, namun jika ternyata mempunyai keluarga, maka perjanjian pertolanan ini tidak boleh melebihi ketentuan wasiat yakni sepertiga harta peninggalan.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi mawali tampil sebagai ahli waris, yaitu: 1) orang yang menghubungkan antara mawali dengan pewaris harus telah meninggal lebih dahulu, dan 2) antara mawali dengan pewaris terdapat hubungan darah. Dengan adanya syarat hubungan darah ini, maka bagi janda dan duda tidak mempunyai mawali. Mawali-mawali tersebut meliputi:

- a. Mawali untuk anak, baik laki-laki maupun perempuan
- b. Mawali untuk saudara, baik laki-laki maupun perempuan
- c. Mawali untuk ibu, dan
- d. Mawali untuk ayah

Dengan melihat uraian di atas, arah hukum waris di Indonesia berkenaan dengan penggantian ahli waris terlihat lebih “memilih”, pendapat hukum Hazairin dari pada menerapkan fiqh konvensional (yang menempatkan perbedaan cucu perempuan/laki-laki dari anak perempuan/laki-laki) dan fiqh yang dianut di beberapa Negara Arab yang menerapkan *wasiat wajibah* terhadap ahli waris pengganti.

Pengaturannya dalam Pasal 185 ayat 1 dan 2 KHI, suatu pengaturan yang sangat singkat tetapi kalau dicermati terkandung makna yang cukup padat dari ayat tersebut.

Ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam mengandung beberapa batasan yaitu:

- Ahli waris pengganti menggantikan orang tuanya apabila tidak terjadi penghalang waris.
- Bagian dari ahli waris pengganti tidak melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.
- Kata “dapat” pada Pasal 185 ayat (1) menunjukkan bersifat fakultatif atau tentatif sehingga bisa ditafsirkan ada ahli waris yang mungkin dapat digantikan dan ada yang mungkin tidak dapat digantikan. Para ahli hukum memberikan apresiasi terhadap sifat tentatifnya dengan melihat kenyataan dalam beberapa kasus, adanya rasa kasihan terhadap cucu pewaris. Artinya penerapan ketentuan penggantian ahli waris ini bersifat kasuistis, sehingga fungsi hakim sangat menentukan dalam menetapkan dapat digantikan atau tidak dapat digantikannya ahli waris.<sup>76</sup>

Pasal 185 KHI yang menentukan bahwa ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh keturunannya. Hal ini dapat berarti anak dari ahli waris yang meninggal tersebut dapat mewarisi dan memperoleh bagian sebagaimana bagian yang akan diterima oleh orang tuanya bila masih hidup, tanpa mempersoalkan jenis kelamin. Mungkin ketentuan dalam Pasal 185 KHI tersebut untuk menghilangkan diskriminasi terhadap ahli waris perempuan. Karena pada

---

<sup>76</sup> *Mimbar Hukum* No.23, Tahun 1995 Vol.VI, hlm. 57

prinsipnya hanya keturunan dari anak laki-laki saja yang bisa menggantikan kedudukan orang tuanya untuk menerima bagian warisan, sedangkan keturunan dari anak perempuan tidak bisa menerima warisan.

Apabila kita melihat pada ketentuan waris menurut hukum Islam, tidak semua cucu bisa menggantikan kedudukan orang tuanya yang sudah meninggal dunia untuk menerima harta warisan. Menurut hukum Islam, hanya cucu laki-laki dari anak laki-laki saja yang dapat menggantikan ayahnya, sedangkan cucu dari anak perempuan baik laki-laki maupun perempuan tidak mungkin menggantikan kedudukan ibunya untuk menerima warisan. Dan mengenai cucu laki-laki dari anak laki-laki inipun masih ada ketentuannya, yaitu apabila pada saat pewaris meninggal dunia, dia tidak meninggalkan seorangpun ahli waris (anak) laki-laki yang masih hidup. Selama masih ada anak laki-laki lain, maka cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sudah meninggal tersebut tetap tidak bisa mewarisi harta kakeknya.<sup>77</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu pembaharuan dalam Hukum Kewarisan Islam. Dikatakan demikian karena Kompilasi Hukum Islam telah memberikan suatu jalan keluar untuk mengatasi masalah yang timbul akibat penggantian kedudukan dalam mewaris, yang menurut ketentuan *Ahl as-Sunnah* sebelumnya tidak dikenal adanya penggantian kedudukan, tetapi dengan adanya Kompilasi Hukum Islam keturunan dari anak perempuan pun dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti tanpa melalui wasiat. Dan ketentuan mengenai hijab menurut *Ahl as-Sunnah* pun disimpangi oleh Pasal 185 KHI yang menerangkan adanya penggantian kedudukan dalam mewaris.

---

<sup>77</sup> Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 80.

Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam lebih memberikan rasa keadilan bagi umat Islam dalam hal mewaris, dan hal ini sesuai dengan asas *bilateral* sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Qur'an. Dan meskipun didalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) tidak ditentukan berapa bagian yang boleh diterima oleh cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya dalam mewaris, maka hakim berhak untuk menentukan berapa bagian tersebut, selama hal itu bisa diterima oleh semua ahli waris.

Konsep tentang ahli waris pengganti ini diadopsi KHI dari teori hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak. Artinya, segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan beralih kepadanya. Dalam pembahasan tentang syarat-syarat ahli waris telah disebutkan bahwa seseorang baru berhak mewarisi atau menjadi ahli waris dari pewaris apabila ia masih hidup pada saat meninggalnya pewaris.

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa sistem kewarisan KHI berbetuk bilateral, maka sebagai konsekuensinya tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sampai garis hukum manapun. Oleh karena itu jika KHI konsisten menghapuskan diskriminasi tersebut, maka mau tidak mau jangkauan penggantian ahli waris ini harus meliputi seluruh garis hukum.

Apabila KHI memandang adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh cucu dari anak perempuan yang menurut Jumhur tidak mendapat bagian karena berstatus *zawiah*, atau oleh cucu perempuan dari anak laki-laki karena terhibab oleh anak laki-laki, tentunya KHI juga harus memandang adanya ketidakadilan terhadap sepupu (anak perempuan paman) yang tidak dapat menerima bagian akibat adanya anak laki-laki paman. Mereka merupakan orang-orang yang sama-sama tidak



bemasib baik dilahirkan sebagai perempuan. Mengenai jangkauan keberlakuan penggantian ahli waris ini, sebenarnya telah terakomodir dalam bunyi pasal 185 ayat

(1) yang memberikan tambahan sebagai berikut :

- 1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali bagi mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- 2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Berdasarkan pasal ini diakui kedudukan ahli waris pengganti atau “*Plaateviulling*”. Pasal ini dapat dikualifikasikan sebagai *ijtihād* karena sebelumnya tidak diakui di dalam kitab *fiqh*. Pemahaman tersebut, dapat diperoleh dengan menyimak dua kata kunci yang ada pada pasal tersebut yaitu kata “ahli waris” dan kata “anaknya”. Dari segi bahasa kata ahli waris merupakan lafal “*nakirah*” yang mencakup seluruh ahli waris tidak terbatas kepada ahli waris tertentu. Dengan demikian, maka kata anaknya memberi pengerian anak dari semua ahli waris baik dari garis ke bawah maupun menyamping.

Apabila dalam suatu ketentuan hukum tidak ditemukan adanya pembatasan atas keumumannya, maka keumuman itu yang diberlakukan. Dengan berpedoman kepada keumuman lafal tersebut, maka cucu, maupun sepupu meskipun sampai jauh mereka dapat menjadi ahli waris pengganti.

Kesimpulan ini didukung oleh tidak dikenalnya  $\{a\}$  dalam KHI. Dengan tidak dikenalnya  $\{a\}$  memberi petunjuk bahwa semua kerabat pewaris dapat tampil sebagai ahli waris melalui penggantian ahli waris

sepanjang tidak terhibab oleh ahli waris yang lebih utama. Oleh karena itu anak-anak saudara laki-laki maupun anak-anak saudara perempuan baik laki-laki atau perempuan serta anak-anak paman baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi ahli waris pengganti.

Permasalahan kedudukan ahli waris pengganti timbul akibat adanya pembatasan bagian sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat (2) yang menyatakan: "Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti". Yang menjadi permasalahan, mengapa dalam pasal ini menggunakan kalimat "yang sederajat", tidak mencukupkan dengan kalimat "Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang diganti" dengan menghilangkan kalimat yang sederajat.

Terjadi perbedaan pendapat dalam memaknai maksud pasal 185 ayat (2). Ahmad Zahari<sup>78</sup> berpendapat makna sederajat itu meliputi tempat, kedudukan dan hak-hak tanpa batas dan tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, sehingga ahli waris pengganti menempati kedudukan orang tuanya secara mutlak. Penggantian tempat artinya menggantikan tempat orang tuanya, dan penggantian derajat artinya menggantikan derajat laki-laki dengan laki dan derajat perempuan dengan perempuan, sedangkan penggantian hak artinya menggantikan hak sesuai dengan hak yang dimiliki orang tuanya.

Jika orang tua yang digantikan itu laki-laki, maka ahli waris pengganti menduduki kedudukan dan menerima hak sebagai laki-laki meskipun ahli waris pengganti itu sendiri perempuan. Sebaliknya jika orang tua yang digantikan itu

---

<sup>78</sup> Ahmad Zahari, *Tiga versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan K-HI*, (Pontianak: Romeo Grafika, 2006), hlm. 93

perempuan, maka ahli waris pengganti menduduki kedudukan dan menerima hak sebagai perempuan meskipun ahli waris pengganti itu sendiri laki-laki. Pendapat Ahmad Zahari ini sama dengan konsep mawalnya Hazairin, yaitu ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan si pewaris. Dr. Hazairin adalah Sarjana hukum yang pertama yang mengintroduksi sistem pengganti ahli waris dengan teori mawali berdasarkan Q.S 4 : 33.<sup>79</sup>

Pengertian anak pada bunyi pasal tersebut menyiratkan bahwa pemerintah Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam mengakui adanya penggantian kedudukan dalam mewaris menurut hukum waris Islam di Indonesia. Hal ini merupakan suatu terobosan baru di dunia kewarisan Islam. Dikatakan sebagai suatu terobosan baru karena di negara-negara Islam di Timur Tengah belum ada yang mengakui adanya ketentuan mengenai penggantian kedudukan tersebut. Dan bisa juga diartikan bahwa ahli waris pengganti yang dimaksud dalam Pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tersebut berlaku bagi cucu laki-laki maupun cucu perempuan yang berasal dari anak laki-laki maupun perempuan

Akan tetapi apabila kita melihat pada ketentuan Surat An-Nisa>' ayat 8, maka apa yang diatur didalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mengenai penggantian kedudukan dalam mewaris bagi umat beragama Islam boleh dilakukan dan tidak menyimpang dari nash selama hal tersebut dilakukan dengan tujuan kemaslahatan umat. Karena didalam ayat tersebut Allah menyebutkan mengenai kehadiran kerabat,

---

<sup>79</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral...*, Op.Cit. hlm. 27-44

anak yatim dan fakir miskin pada saat pembagian warisan. Dan cucu dalam hal ini bisa dimasukkan ke dalam kerabat pewaris yang berasal dari anak pewaris.

Atau dapat pula dikatakan bahwa dengan diaturnya ketentuan mengenai penggantian kedudukan oleh cucu didalam Pasal 185 KHI merupakan suatu ikhtiar dari umat Islam khususnya para ulama di Indonesia untuk memberi jalan tengah dalam menyelesaikan masalah pembagian warisan dalam keadaan yang khusus, dimana seorang cucu bisa bertindak sebagai ahli waris pengganti, yang mana ketentuan mengenai hal tersebut meskipun tidak diatur didalam Al Qur'an, akan tetapi bisa memberikan rasa keadilan dan kemaslahatan bagi umat Islam.

Terlepas dari penafsiran di atas, yang pasti pemberian bagian kepada ahli waris pengganti dalam KHI merupakan solusi atas ketidakadilan yang selama ini terjadi akibat pemberlakuan hukum kewarisan yang cenderung patrinalistik. Sebagai jalan tengah antara pihak yang menghendaki perubahan dengan pihak yang mempertahankan kemapanan, kiranya wajar jika bagian ahli waris pengganti (untuk sementara) dibatasi sebesar bagian saudara yang digantikan. Dan segala sesuatu yang dilakukan semata-mata untuk kemaslahatan umat, meskipun Al Qur'an tidak mengatur secara tegas hal tersebut boleh dilakukan. Dan dikatakan bahwa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah terobosan baru dalam hal pemberian hak mewaris bagi cucu karena hal tersebut belum pernah diberlakukan di negara Islam manapun kecuali Indonesia.

Dan Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk pemeluk agama Islam terbesar di dunia sangat memerlukan suatu pengkajian yang tepat terhadap ayat-ayat Al Qur'an khususnya ayat-ayat waris agar tidak terjadi

penyimpangan dan bisa diterapkan di dalam kehidupan karena penduduk Indonesia sendiri masih banyak yang memegang teguh adat istiadat masing-masing daerahnya yang apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum Islam akan sangat bertentangan.

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI TENTANG KEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM**

##### **A. Macam-macam Ahli Waris**

Hukum waris Islam merupakan ekspresi penting hukum keluarga Islam, ia merupakan separoh pengetahuan yang dimiliki manusia sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad SAW. Mengkaji dan mempelajari hukum waris Islam berarti mengkaji separoh pengetahuan yang dimiliki manusia yang telah dan terus hidup di tengah-tengah masyarakat muslim sejak masa awal Islam hingga abad pertengahan, zaman modern dan kontemporer serta di masa yang akan datang.<sup>1</sup>

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.

Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadits Rasulullah saw. dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah SWT. Di

---

<sup>1</sup> J. N. D. Anderson, *Hukum Islam Di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein (Surabaya: Amarpress, 1991), hlm. 72

samping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.<sup>2</sup>

Apabila mencari pengertian waris dalam kamus, maka akan menjumpai kata waris berasal dari Bahasa Arab, yang artinya mewariskan, pusaka-pusaka dan warisan.<sup>3</sup> Kata waris juga berarti peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Hukum waris di dalam hukum Islam lazim juga disebut dengan istilah "*Fara'id*" yang berarti pembagian tertentu.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut istilah para Ulama Fiqih, kata waris atau ilmu waris diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang ketentuan orang-orang yang diwarisi, orang-orang yang tidak mewarisi besar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pembagiannya.<sup>5</sup>

Istilah waris sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, sehingga kebanyakan masyarakat Indonesia mengartikan ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagian.<sup>6</sup>

Menurut Abdul Ghafur, kewarisan adalah ilmu yang berhubungan dengan harta milik.<sup>7</sup> Jadi kewarisan berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan peralihan harta antara pewaris dan ahli warisnya.

---

<sup>2</sup> Muhammad 'Ali as-S{a>bu>ni<, *al-Mawa>ri<s\ fi< asy-Syari<'ah al-Isla>miyyah fi< D{au' al-Kita>b wa as-Sunnah*, (Makkah: Da>ral H>{adis\, 1388 H), hlm. 33

<sup>3</sup> Ahmad Warson munawir Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) hlm. 1551.

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung, Sumur, 1961), Cetakan ke-4, hlm. 8

<sup>5</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), hlm. 5.

<sup>6</sup> Muslim Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Mujahidin, 1989), hlm. 18. Lihat Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 3

<sup>7</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 39

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 619



حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ رَجَاءٍ بْنِ حَيَّوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّي جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنَحَتَهَا رِضًا لَطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالَمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحَيَاتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالَمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطَّةٍ وَافِرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ لَقِيتُ شَيْبَةَ بْنِ شَيْبَةَ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُوْدَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَعْنِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad bin Musarhad telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Daud aku mendengar 'Ashim bin Raja bin Haiwah menceritakan dari Daud bin Jamil dari Katsir bin Qais ia berkata, "Aku pernah duduk bersama Abu Ad Darda di masjid Damaskus, lalu datanglah seorang laki-laki kepadanya dan berkata, "Wahai Abu Ad Darda, sesungguhnya aku datang kepadamu dari kota Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam karena sebuah hadits yang sampai kepadaku bahwa engkau meriwayatannya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dan tidaklah aku datang kecuali untuk itu." Abu Ad Darda lalu berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahnya jalan ke surga. Sungguh, para Malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridlaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintakan maaf oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan seorang alim dibanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barangsiapa mengambilnya maka ia telah mengambil bagian yang banyak." Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Wazir Ad Dimasyqi telah menceritakan kepada kami Al Walid ia berkata; aku berjumpa dengan Syabib bin Syaibah lalu ia menceritakannya kepadaku dari Utsman bin Abu Saudah dari Abu Ad Darda dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan maknanya."<sup>12</sup>

Sedangkan makna al-miirats menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang

<sup>12</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis No.3157

masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.<sup>13</sup>

Secara terminologi, mirats berarti warisan harta kekayaan yang dibagi dari orang-orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. *Mirats* menurut syari'ah adalah memberi undang-undang sebagai pedoman antara orang yang meninggal dunia dan ahli waris, dan apa saja yang berkaitan dengan ahli waris tersebut<sup>14</sup>

Dalam bukunya Sudarsono memuat beberapa pengertian hukum waris menurut ahli hukum yaitu ;

1. Mr. Dr.H.D.M.Khol, mengatakan bahwa: Hukum waris mengatur ketentuan-ketentuan tentang perpindahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal kepada seorang ahli waris atau lebih.
2. Winkler Prins, mengemukakan bahwa: Hukum waris ialah seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, menentukan sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan-hubungan hukum dari seorang yang telah meninggal dunia pindah kepada orang lain, dan dengan demikian hal itu dapat diteruskan oleh keturunannya.<sup>15</sup>

Menurut pendapat Siti Patimah Yunus, hukum waris Islam dirumuskan sebagai perangkat harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang pada waktu ia meninggal dunia.<sup>16</sup>

Menurut Mohammad Daud Ali, Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan pengalihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum

---

<sup>13</sup> Muhammad 'Ali< as-S{a>bu>ni<, *al-Mawa>ri<s\ fi<...*, Op. Cit, hlm.34. Lihat Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. ke-2, hlm. 205

<sup>14</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 352

<sup>15</sup> Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991) hlm. 12

<sup>16</sup> Siti Patimah Yunus, *Wanita dan Hak Waris serta Pemilikan Menurut Hukum Positif di Indonesia, Hukum Pembangunan*, Nomor 5 Tahun XVIII, (Oktober, 1998), hlm. 441

kewarisan islam dinamakan juga hukum *fard* yang jamak dari kata *fard* yang erat hubungannya dengan kata *fard* yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan.<sup>17</sup>

Ahmad Azhar Basyir memberikan definisi kewarisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia baik berupa benda yang berwujud maupun berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.<sup>18</sup>

Muhammad Amin Suma lebih cenderung mengatakan bahwa hukum waris ialah hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan beberapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan.<sup>19</sup>

M. Idris Ramulyo, SH. menyatakan bahwa hukum waris Islam adalah himpunan aturan-aturan yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan seorang yang mati meninggalkan harta peninggalan, bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta bagaimana / berapa perolehan masing-masing ahli waris secara riil dan sempurna.<sup>20</sup>

Hal ini berbeda dengan pengertian hukum waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun menurut Hukum Waris Adat, sebagaimana diungkapkan oleh pakar masing-masing hukum waris.

---

<sup>17</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 141. Lihat Komite Fakultas Syari'ah Universitas Mesir, *Al-Hukm al-Mawaris fi al-fiqih al-Islami* (*Hukum Waris*), penerjemah Addys Aldizal dan Fathurrahman, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 11

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 22

<sup>19</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 108

<sup>20</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, (IND HILL & Co, 1984), hlm. 35

A. Pitlo sebagai pakar hukum waris perdata memberikan definisi bahwa hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenal kekayaan karena wafatnya seseorang. Yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati ada akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>21</sup>

Prof. DR. Soepomo, SH dalam bukunya “Bab-bab Tentang Hukum Adat”, memberikan definisi bahwa hukum adat waris menurut peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup”.<sup>22</sup>

Dari definisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan sistem-sistem yang bersifat asasi bagi masing-masing hukum waris. Dalam sistem hukum waris Islam terdapat lima asas yang mendasarinya, kelima asas tersebut adalah asas ijbari (*compulsory*), asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas adanya kematian pewaris.<sup>23</sup>

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak

---

<sup>21</sup>A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Hukum Perdata Belanda*, terjemah M. Isa Arief, (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 1. Lihat Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam... Op.Cit*, hlm. 107

<sup>22</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), Cet. ke-12, hlm. 79.

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), Cet. ke-1, hlm. 18.

pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (a) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Hukum waris menduduki tempat yang penting dalam Hukum Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci hal ini dapat dimengerti, sebab masalah warisan pasti dialami setiap orang. Kecuali itu ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan serta bagaimana caranya, inilah yang diatur dalam hukum waris Islam.<sup>24</sup>

Dari definisi dan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hukum waris Islam merupakan suatu bagian dari hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadist yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan atau pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang lain sebagai ahli waris serta penentuan hak perolehan dari masing-masing ahli waris tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut para ulama Islam (*Mujtahid*) menyimpulkan bahwa sistem hukum kewarisan dalam Islam meliputi tiga aspek bahasan yang utama,

---

<sup>24</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Op.Cit, hlm. 3

yaitu mengenai penentuan tirkah (harta peninggalan), penentuan ahli waris serta penentuan besar bagian masing - masing ahli waris.<sup>25</sup>

Kalau kita perhatikan macam-macam ahli waris, maka dapat digolongkan dengan beberapa golongan ditinjau dari segi kelaminnya dan dari segi haknya atas harta warisan.

Dari segi jenis kelaminnya, ahli waris dibagi menjadi dua golongan, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Adapun ahli waris laki-laki terdiri dari:

- (1) Anak laki-laki
- (2) Cucu laki-laki (dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki
- (3) Ayah
- (4) Kakek (bapak ayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
- (5) Saudara laki-laki kandung (seibu seayah)
- (6) Saudara laki-laki seayah
- (7) Saudara laki-laki seibu
- (8) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki
- (9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki
- (10) Paman kandung (saudara laki-laki kandung ayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
- (11) Paman seayah (saudara laki-laki seayah ayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki

---

<sup>25</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Mawaris*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1994), hlm. 36

- (12) Anak laki-laki dari paman kandung dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki
- (13) Anak laki-laki paman seayah dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki
- (14) Suami
- (15) Laki-laki yang memerdekakan budak (mu'tiq).<sup>26</sup>

Sedangkan ahli waris perempuan terdiri dari:

- (1) Anak perempuan
- (2) Ibu
- (3) Cucu perempuan (dari keturunan anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki
- (4) Nenek (ibu dari ibu) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan
- (5) Nenek (ibu dari ayah) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan
- (6) Saudara perempuan kandung
- (7) Saudara perempuan seayah
- (8) Saudara perempuan seibu
- (9) Istri
- (10) Perempuan yang memerdekakan budak(mu'tiqah).<sup>27</sup>

Dari segi hak atas harta warisan, ahli waris dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

a. Ahli waris *z'awi* < *al-Furu* > *d*

Ahli waris *z'awi* < *al-Furu* > *d* ialah ahli waris yang mempunyai bagian tertentu sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an atau sunnah Rasul. tertentu

---

<sup>26</sup> Muhammad 'Ali < as-S{a>bu>ni<, *al-Mawa>ri<s\ fi<...*, *Op. Cit*, hlm. 45. Lihat Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, *Op.Cit*, hlm. 34-35

<sup>27</sup> Muhammad 'Ali < as-S{a>bu>ni<, *al-Mawa>ri<s\ fi<...*, *Op. Cit*, hlm. 46. Lihat Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, *Op.Cit*, hlm. 36

jumlah yang mereka terima yaitu seperdua ( $1/2$ ), seperempat ( $1/4$ ), seperdelapan ( $1/8$ ), duapertiga ( $2/3$ ), sepertiga ( $1/3$ ), dan seperenam ( $1/6$ ).

Bagian seperdua ( $1/2$ ) disebut dalam Al Qur'an menjadi hak seorang anak perempuan, seorang saudara perempuan kandung atau seayah dan suami bila mayit (pewaris) tidak meninggalkan anak yang berhak waris. Bagian seperempat ( $1/4$ ) disebut dalam Al Qur'an menjadi hak suami jika mayit (pewaris) meninggalkan anak yang berhak waris dan istri jika mayit (pewaris) tidak meninggalkan anak yang berhak waris. Bagian seperdelapan ( $1/8$ ) disebut dalam Al Qur'an menjadi hak istri apabila mayit (pewaris) meninggalkan anak yang berhak waris.

Bagian duapertiga ( $2/3$ ) disebut dalam Al Qur'an menjadi hak 2 orang saudara perempuan kandung atau seayah, dan dua anak perempuan. Bagian sepertiga ( $1/3$ ) disebut dalam Al Qur'an menjadi hak ibu apabila mayit (pewaris) tidak meninggalkan anak atau lebih dari seorang saudara, dan saudara-saudara seibu jika lebih dari seorang. Bagian seperenam ( $1/6$ ) disebut dalam Al Qur'an menjadi hak ayah atau ibu jika mayit (pewaris) meninggalkan anak yang berhak waris, juga ibu jika mayit (pewaris) meninggalkan saudara lebih dari seorang dan seorang saudara seibu. Nabi juga menyebutkan bahwa bagian seperenam ( $1/6$ ) menjadi hak cucu perempuan (dari anak laki-laki) bersama dengan seorang anak perempuan, saudara perempuan seayah bersama dengan saudara perempuan kandung, dan kakek jika mayit (pewaris) meninggalkan anak yang berhak waris.

Mereka yang termasuk dalam golongan ahli waris *al-Furu'* adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, ayah, duda (suami), janda (isteri), kakek, nenek, saudara perempuan kandung, saudara



perempuan seayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu. Untuk ahli waris  $z\backslash awi < al-Furu > d$  ini bagian mereka tegas dan rinci dinyatakan dalam Al-Qur'an.<sup>28</sup>

b. Ahli Waris  $as\}a > bah$

Ahli waris  $as\}a > bah$  yaitu; ahli waris yang tidak ditentukan berapa besar bagiannya, namun ia berhak menghabisi semua harta jika tidak ada ahli waris  $z\backslash awi < al-Furu > d$  sama sekali. Jika ada ahli waris  $z\backslash awi < al-Furu > d$ , ia berhak atas sisanya, dan apabila tidak ada sisa sama sekali, dia tidak mendapat bagian apapun.

Ahli waris  $as\}a > bah$  dibagi menjadi tiga, yaitu ;

1)  $As\}a > bah$  *Bin nafsih*, yaitu; ahli waris  $as\}a > bah$  karena dirinya sendiri, bukan

karena bersama dengan ahli waris lainnya, yang terdiri dari :

- (a) Anak laki-laki
- (b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah
- (c) Ayah
- (d) Kakek dari pihak ayah dan seterusnya keatas
- (e) Saudara Laki-laki sekandung
- (f) Saudara laki-laki seayah
- (g) Paman yang sekandung dengan ayah
- (h) Paman yang seayah dengan ayah
- (i) Anak laki-laki Paman yang sekandung dengan ayah
- (j) Anak laki-laki Paman yang seayah dengan ayah

---

<sup>28</sup> Muhammad 'Ali < as-S{a>bu>ni <, *al-Mawa>ri <s\ fi <... , Op. Cit*, hlm. 49-61. Lihat Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, *Op.Cit*, hlm. 36-38

2) *As}a>bah Bil ghairi*, yaitu: ahli waris *as}a>bah* karena mewaris bersama ahli waris lainnya, maksudnya perempuan yang ditarik oleh saudaranya yang laki-laki, sehingga bersama-sama menjadi *as}a>bah*, yang terdiri dari

- (a) Anak perempuan yang ditarik oleh anak laki-laki
- (b) Cucu perempuan yang ditarik oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki
- (c) Saudara perempuan sekandung tertarik oleh saudara laki-laki sekandung
- (d) Saudara perempuan seayah tertarik oleh saudara laki-laki seayah

3) *As}a>bah Ma'al ghairi*, adalah ahli waris perempuan yang semula berkedudukan sebagai *z\awi< al-Furu>d*, berubah menjadi *as}a>bah* karena mewaris bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan pewaris.

Yang masuk kategori ini adalah :

- (a) Saudara perempuan sekandung jika mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
- (b) Saudara perempuan seayah jika mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

Dari ketiga jenis *as}a>bah* tersebut, dapat kita lihat bahwa hanya orang laki-laki atau orang perempuan dari garis laki-laki saja yang dapat menjadi *as}a>bah*. Cucu perempuan dari anak perempuan dan saudara perempuan seibu misalnya, jelas tidak menjadi ahli waris *as}a>bah*, bahkan cucu perempuan dari anak perempuan menurut kewarisan patrilineal ini sebagai *z\awi< al-Arh}a>m*.<sup>29</sup>

#### c. Ahli Waris *Z\awi< al-Arh}a>m*

---

<sup>29</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan islam di Indonesia*, Cet.1, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 38-39. Lihat Muhammad 'Ali< as-S{a>bu>ni<, *al-Mawa>ri<s\ fi<...*, *Op. Cit*, hlm. 65-78. Lihat Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, *Op.Cit*, hlm. 38-39.

Merupakan ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan mayit (pewaris), tetapi tidak termasuk golongan ahli waris *al-Furu* dan *asabah*.

Yang termasuk ahli waris *al-arh* ialah :

1. Cucu laki-laki atau perempuan, anak-anak dari anak perempuan.
2. Kemenakan laki-laki atau perempuan anak-anak saudara perempuan kandung, seayah atau seibu.
3. Kemenakan perempuan, anak-anak perempuan saudara laki-laki kandung atau seayah.
4. Saudara sepupu perempuan, anak-anak perempuan paman (saudara laki-laki ayah)
5. Paman seibu (saudara laki-laki ayah ibu)
6. Paman, saudara laki-laki ibu
7. Bibi, saudara perempuan ayah.
8. Bibi, saudara perempuan bibi.
9. Kakek, ayah ibu.
10. Nenek buyut, ibu kakek (no.9)
11. Kemenakan seibu, anak-anak saudara laki-laki seibu.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> M.Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan hukum Kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata(BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 188-189. Lihat Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Op.Cit, hlm. 39-40. Lihat Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Pembaharuan Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 67. Lihat Hasbiyallah, *Belajar mudah Ilmu Mawaris*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 94. Lihat Moh. Anwar, *Faraidl (Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-masalahnya)*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981). hlm. 28-29. Lihat Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, Op.Cit, hlm. 78-79. Lihat M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 167-168. Lihat A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum.*, Op. Cit, hlm. 412-413

Muhammad bin Salih bin al-'Usaimi dalam bukunya "*Tas-hi>lul Fara>'id*" menyebutkan bahwa *z\awi< al-arh)a>m* berasal dari kelompok *ashlu furu'* dan *hawashi*. *Z\awi< al-arh)a>m* yang berasal dari kelompok *ashlu* adalah: semua kakek yang garis keturunannya dengan si mayit diperantarai oleh perempuan, seperti ayah dari ibu dan ayah dari nenek; semua nenek yang dihubungkan oleh laki-laki dan antara laki-laki tersebut dan si mayit diperantarai oleh perempuan, seperti ibu dan kakek dari pihak ibudan ibu dari ayah nenek; semua nenek yang dihubungkan oleh kakek yang tertinggi, seperti ibu dari ayah kakek, yang ketiga ini menurut pendapat mazhab H{ambali.>

*Z\awi< al-arh)a>m* dari golongan *furu'* adalah semua keturunan laki-laki yang diperantarai oleh perempuan. Seperti; cucu laki-laki dari anak perempuan dan anak laki-laki dari cucu perempuan. Sementara *z\awi< al-arh)a>m* dari golongan *hawasyi* adalah: semua kerabat perempuan selain saudara perempuan, seperti bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan dan anak perempuan dari paman sekandung maupun seayah; semua kerabat yang dihubungkan oleh perempuan selain saudara laki-laki seibu, seperti anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, seperti anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara laki-laki se ibu serta semua kerabat yang garis keturunannya dihubungkan oleh *z\awi< al-arh)a>m*.<sup>31</sup>

Di dalam Al Qur'an keturunan dari anak pewaris (cucu) tidak ditentukan bagaimana kedudukannya dan berapa besar bagiannya untuk mewarisi harta

---

<sup>31</sup> Muhammad bin Salih bin al-'Usaimi, *Tas-hi>lul Fara>'id*, Op.Cit, hlm. 55

peninggalan kakeknya. Menurut beberapa ahli fiqh, cucu dikategorikan ke dalam ahli waris  $z\backslash awi < al-arh\}a > m$ , dimana ahli waris  $z\backslash awi < al-arh\}a > m$  tersebut baru bisa mewaris apabila ahli waris  $z\backslash awi < al-furu > d$  dan ashabah sudah tidak ada pada saat pewaris meninggal dunia. Jadi bisa dikatakan bahwa cucu baru bisa mewarisi harta kakek/neneknya apabila pada saat kakek/neneknya meninggal dunia sudah tidak ada lagi ahli waris yang berhak atas bagian tertentu maupun ahli waris yang berhak atas sisa dari hasil pembagian warisan.

## B. Sabab-sebab waris mewarisi dalam Islam

Sebab-sebab kewarisan yang menyebabkan seseorang berhak mewarisi harta warisan mayit ada tiga yaitu :

1. Kerabat hakiki (yang ada ikatan *nasab*), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. al-Anfa>l (8) : 75


  
 (75 :      )

*“Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak*

*terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah”.* (Q.S.

Al-Anfa>l : 75)<sup>32</sup>

2. Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (*syar'i*) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersanggama) antar keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.

<sup>32</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit, hlm. 274

Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah SWT dalam QS.An-Nisa>' (4) : 12

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isterimu...” (Q.S.An-Nisa>' : 12)

“..Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan...” (Q.S.An-Nisa>' : 12)<sup>33</sup>

Seorang wanita dikatakan istri hanya dengan akad pernikahan dan tidak dikatakan istri kecuali dengan adanya akad pernikahan yang sah.

3. *Al-Wala>'*, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga *wala>' al-'itqi* dan *wala>' an-ni'mah*. Yang menjadi penyebab adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Maka dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *wala>' al-'itqi*. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Karena itu Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya kekerabatan (*nas}ab*) ataupun karena adanya tali pernikahan.<sup>34</sup>

### C. Penghalang Hak Waris (Al-Hajb)

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 117

<sup>34</sup> Sayid Sa>biq, *Fiqh al-Sunnah Juz III*, (Beirut : Da>r el-Fikr, 2008M/ 1429H), hlm.1005. Lihat Muhammad 'Ali< as-S{a>bu>ni<, *al-Mawa>ri<s\ fi<...*, *Op. Cit*, hlm. 39. Lihat Muh}ammad bin S{alih} bin al-'Us{aimi>n, *Tas-hi>lul Fara>'id*, *Op. Cit*, hlm.17-18. Lihat Oje Salman.S, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), hlm. 49

Al-hajb dalam bahasa Arab bermakna penghalang atau penggugur. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

﴿لَا يَأْتِيهِمْ فِيهِ يَوْمَئِذٍ سَاعَةٌ يُسَبِّحُونَ فِيهَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ دِينَهُمْ ۚ وَهُمْ عَلَىٰ شَرٍّ مُّذْمُومِينَ ۖ يُعَذِّبُهُمْ فِيهَا وَلَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ ۚ﴾  
 “Sekali-kali tidak sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari (melihat) Tuhan mereka” (al-Muthaffifin: 15)<sup>35</sup>

Yang dimaksud oleh ayat ini adalah kaum kuffar yang benar-benar akan terhalang, tidak dapat melihat Tuhan mereka di hari kiamat nanti. Selain itu, dalam bahasa Arab juga kita kenal kata hajib yang bermakna “tukang atau penjaga pintu”, disebabkan ia menghalangi orang untuk memasuki tempat tertentu tanpa izin guna menemui para penguasa atau pemimpin.

Jadi, bentuk isim fa'il (subjek) untuk kata hajaba adalah *hajib* dan bentuk isim maf'ul (objek) ialah *mahjub*. Maka makna *al-hajib* menurut istilah ialah orang yang menghalangi orang lain untuk mendapatkan warisan, dan *al-mahjub* berarti orang yang terhalang mendapatkan warisan. Adapun pengertian al-hajb menurut kalangan ulama faraid adalah menggugurkan hak ahli waris untuk menerima waris, baik secara keseluruhannya atau sebagian saja disebabkan adanya orang yang lebih berhak untuk menerimanya.

Al-hujub terbagi dua macam, yaitu:

**Pertama** *Al-hajb bil washfi* berarti orang yang terkena *hajb* tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan, misalnya orang yang membunuh pewarisnya atau murtad. Hak waris mereka menjadi gugur atau terhalang.

<sup>35</sup>Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op.Cit, hlm. 1036

**Kedua** *al-hajb bi asy-syakhshi* yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. *Al-hajb bi asy-syakhshi* terbagi dua: *hajb hirman* dan *hajb nuqshan*. *Hajb hirman* yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Misalnya, terhalangnya hak waris seorang kakek karena adanya ayah, terhalangnya hak waris cucu karena adanya anak, terhalangnya hak waris saudara seayah karena adanya saudara kandung, terhalangnya hak waris seorang nenek karena adanya ibu, dan seterusnya.

Adapun *hajb nuqshan* (pengurangan hak) yaitu penghalangan terhadap hak waris seseorang untuk mendapatkan bagian yang terbanyak. Misalnya, penghalangan terhadap hak waris ibu yang seharusnya mendapatkan sepertiga menjadi seperenam disebabkan pewaris mempunyai keturunan (anak). Demikian juga seperti penghalangan bagian seorang suami yang seharusnya mendapatkan setengah menjadi seperempat, sang istri dari seperempat menjadi seperdelapan karena pewaris mempunyai anak, dan seterusnya.

Satu hal yang perlu diketahui di sini, dalam dunia faraid apabila kata *al-hajb* disebutkan tanpa diikuti kata lainnya, maka yang dimaksud adalah *hajb hirman*. Ini merupakan hal mutlak dan tidak akan dipakai dalam pengertian *hajb nuqshan*.

Ada ahli waris yang tidak mungkin terkena *hajb hirman*. Mereka terdiri dari enam orang yang akan tetap mendapatkan hak waris. Keenam orang tersebut adalah anak kandung laki-laki, anak kandung perempuan, ayah, ibu, suami, dan istri. Bila orang yang mati meninggalkan salah satu atau bahkan keenamnya, maka semuanya harus mendapatkan warisan.



Sedangkan ahli waris yang dapat terkena *hajib hirman* ada enam belas, sebelas terdiri dari laki-laki dan lima dari wanita. Adapun ahli waris dari laki-laki sebagai berikut:

1. Kakek (bapak dari ayah) akan terhalang oleh adanya ayah, dan juga oleh kakek yang lebih dekat dengan pewaris.
2. Saudara kandung laki-laki akan terhalang oleh adanya ayah, dan keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit, dan seterusnya).
3. Saudara laki-laki seayah akan terhalang dengan adanya saudara kandung laki-laki, juga terhalang oleh saudara kandung perempuan yang menjadi *'ashabah ma'al Ghair*, dan terhalang dengan adanya ayah serta keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit, dan seterusnya).
4. Saudara laki-laki dan perempuan yang seibu akan terhalangi oleh pokok (ayah, kakek, dan seterusnya) dan juga oleh cabang (anak, cucu, cicit, dan seterusnya) baik anak laki-laki maupun anak perempuan.
5. Cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, akan terhalangi oleh adanya anak laki-laki. Demikian juga para cucu akan terhalangi oleh cucu yang paling dekat (lebih dekat).
6. Keponakan laki-laki (anak saudara kandung laki-laki) akan terhalangi dengan adanya ayah dan kakek, anak laki-laki, cucu kandung laki-laki, serta oleh saudara laki-laki seayah.
7. Keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki seayah) akan terhalangi dengan adanya orang-orang yang menghalangi keponakan (dari anak saudara kandung laki-laki), ditambah dengan adanya keponakan (anak laki-laki dari keturunan saudara kandung laki-laki).

8. Paman kandung (saudara laki-laki ayah) akan terhalangi oleh adanya anak laki-laki dari saudara laki-laki, juga terhalangi oleh adanya sosok yang menghalangi keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
9. Paman seayah akan terhalangi dengan adanya sosok yang menghalangi paman kandung, dan juga dengan adanya paman kandung.
10. Sepupu kandung laki-laki (anak paman kandung) akan terhalangi oleh adanya paman seayah, dan juga oleh sosok yang menghalangi paman seayah.
11. Sepupu laki-laki (anak paman seayah) akan terhalangi dengan adanya sepupu laki-laki (anak paman kandung) dan dengan adanya sosok yang menghalangi sepupu laki-laki (anak paman kandung).

Kemudian lima ahli waris dari kelompok wanita adalah:

1. Nenek (baik ibu dari ibu ataupun dari bapak) akan terhalangi dengan adanya sang ibu.
2. Cucu perempuan (keturunan anak laki-laki) akan terhalang oleh adanya anak laki-laki, baik cucu itu hanya seorang ataupun lebih. Selain itu, juga akan terhalangi oleh adanya dua orang anak perempuan atau lebih, kecuali jika ada 'ashabah.
3. Saudara kandung perempuan akan terhalangi oleh adanya ayah, anak, cucu, cicit, dan seterusnya (semuanya laki-laki).
4. Saudara perempuan seayah akan terhalangi dengan adanya saudara kandung perempuan jika ia menjadi *As}a>bah Ma'al ghairi*. Selain itu, juga terhalang oleh adanya ayah dan keturunan (anak, cucu, cicit, dan seterusnya, khusus kalangan laki-laki) serta terhalang oleh adanya dua orang saudara kandung perempuan bila

keduanya menyempurnakan bagian dua per tiga ( $\frac{2}{3}$ ), kecuali bila adanya *as}a>bah*.

5. Saudara perempuan seibu akan terhalangi oleh adanya sosok laki-laki (ayah, kakek, dan seterusnya) juga oleh adanya cabang (anak, cucu, cicit, dan seterusnya) baik laki-laki ataupun perempuan.

Apabila anak perempuan telah sempurna mendapat bagian dua per tiga ( $\frac{2}{3}$ ), gugurlah hak waris cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Kecuali bila ia mempunyai saudara laki-laki (yakni cucu laki-laki keturunan anak laki-laki) yang sederajat ataupun yang lebih rendah dari derajat cucu perempuan, maka cucu laki-laki dapat menyeret cucu perempuan itu sebagai *as}a>bah*, yang sebelumnya tidak mendapat *fardh*. Keadaan seperti ini dalam faraid disebut sebagai kerabat yang berkah atau saudara laki-laki yang berkah. Disebut demikian karena tanpa cucu laki-laki, cucu perempuan tidak akan mendapat warisan.

Kemudian, apabila saudara kandung perempuan telah sempurna mendapat bagian dua per tiga ( $\frac{2}{3}$ ), gugurlah hak waris para saudara perempuan seayah, kecuali bila ada saudara laki-laki seayah. Sebab saudara laki-laki seayah itu akan menggandengnya menjadi *as}a>bah*. Keadaan seperti ini dinamakan sebagai saudara yang berkah, sebab tanpa keberadaannya para saudara kandung perempuan itu tidak akan menerima hak waris mereka.

Begitu juga kebalikannya, yakni saudara laki-laki yang merugikan. Disebut saudara laki-laki yang merugikan karena keberadaannya menyebabkan ahli waris dari

kalangan wanita tidak mendapatkan warisan. Padahal, apabila saudara laki-laki itu tidak ada, ahli waris wanita itu akan mendapatkan waris.<sup>36</sup>

#### D. Bagian masing-masing ahli Waris

Jumlah bagian yang telah ditentukan Al-Qur'an ada enam macam, yaitu setengah ( $\frac{1}{2}$ ), seperempat ( $\frac{1}{4}$ ), seperdelapan ( $\frac{1}{8}$ ), dua per tiga ( $\frac{2}{3}$ ), sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ), dan seperenam ( $\frac{1}{6}$ ). Adapun pembagiannya secara rinci, siapa saja ahli waris yang termasuk *as}h}a>b al-furu>d* dengan bagian yang berhak ia terima.

##### a. *As}h}a>b al-furu>d* yang Berhak Mendapat Setengah

*As}h}a>b al-furu>d* yang berhak mendapatkan separo dari harta waris peninggalan pewaris ada lima, satu dari golongan laki-laki dan empat lainnya perempuan. Kelima *as}h}a>b al-furu>d* tersebut ialah suami, anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seayah. Rinciannya seperti berikut:

1. Seorang suami berhak untuk mendapatkan separo harta warisan, dengan syarat apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, baik anak keturunan itu dari suami tersebut ataupun bukan. Dalilnya adalah firman Allah:

*"...dan bagi kalian (para suami) mendapat separo dari harta yang ditinggalkan istri-istri kalian, bila mereka (para istri) tidak mempunyai anak ..."* (Q.S. An-Nisa>': 12)

---

<sup>36</sup> Muhammad 'Ali< as-S{a>bu>ni<, *al-Mawa>ri<s\ fi<...*, *Op. Cit*, hlm.81-85. Lihat Muh}ammad bin S}alih} bin al-'Us}aimi>n, *Tas-hi>lul Fara>'id*, *Op. Cit*, hlm

2. Anak perempuan (kandung) mendapat bagian separo harta peninggalan pewaris, dengan dua syarat:
  - a) Pewaris tidak mempunyai anak laki-laki (berarti anak perempuan tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki, penj.).
  - b) Apabila anak perempuan itu adalah anak tunggal. Dalilnya adalah firman Allah: *“dan apabila ia (anak perempuan) hanya seorang, maka ia mendapat separo harta warisan yang ada”*. Bila kedua persyaratan tersebut tidak ada, maka anak perempuan pewaris tidak mendapat bagian setengah.
3. Cucu perempuan keturunan anak laki-laki akan mendapat bagian separo, dengan tiga syarat:
  - a) Apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki (yakni cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki).
  - b) Apabila hanya seorang (yakni cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki tersebut sebagai cucu tunggal).
  - c) Apabila pewaris tidak mempunyai anak perempuan ataupun anak laki-laki.  
 Dalilnya sama saja dengan dalil bagian anak perempuan (sama dengan nomor 2). Sebab cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki sama kedudukannya dengan anak kandung perempuan bila anak kandung perempuan tidak ada. Maka firman-Nya *“yushikumullahu fi auladikum”*, mencakup anak dan anak laki-laki dari keturunan anak, dan hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama.
4. Saudara kandung perempuan akan mendapat bagian separo harta warisan, dengan tiga syarat:

- a) Ia tidak mempunyai saudara kandung laki-laki.
- b) Ia hanya seorang diri (tidak mempunyai saudara perempuan).
- c) Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek, dan tidak pula mempunyai keturunan, baik keturunan laki-laki ataupun keturunan perempuan.

Dalilnya adalah firman Allah berikut:

*"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu: jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya ...)" (Q.S.An-Nisa>': 176)*

5. Saudara perempuan seayah akan mendapat bagian separo dari harta warisan peninggalan pewaris, dengan empat syarat:

- a) Apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki.
- b) Apabila ia hanya seorang diri.
- c) Pewaris tidak mempunyai saudara kandung perempuan.
- d) Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakak, dan tidak pula anak, baik anak laki-laki maupun perempuan.

Dalilnya sama dengan Butir 4 (Q.S An-Nisa>': 176), dan hal ini telah menjadi kesepakatan ulama.

- b. *As}h}a>b al-furu>d* yang Berhak Mendapat Seperempat

Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapat seperempat (1/4) dari harta peninggalannya hanya ada dua, yaitu suami dan istri. Rinciannya sebagai berikut:

1. Seorang suami berhak mendapat bagian seperempat (1/4) dari harta peninggalan istrinya dengan satu syarat, yaitu bila sang istri mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-lakinya, baik anak atau cucu tersebut

dari darah dagingnya ataupun dari suami lain (sebelumnya). Hal ini berdasarkan firman Allah berikut:

*“... Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya E” (Q.S. An-Nisa>’: 12)*

2. Seorang istri akan mendapat bagian seperempat (1/4) dari harta peninggalan suaminya dengan satu syarat, yaitu apabila suami tidak mempunyai anak/cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya ataupun dari rahim istri lainnya. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah berikut:

*“...Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak...” (Q.S.An-Nisa>’: 12)*

Ada satu hal yang patut diketahui oleh kita khususnya para penuntut ilmu tentang bagian istri. Yang dimaksud dengan “istri mendapat seperempat” adalah bagi seluruh istri yang dinikahi seorang suami yang meninggal tersebut. Dengan kata lain, sekalipun seorang suami meninggalkan istri lebih dari satu, maka mereka tetap mendapat seperempat harta peninggalan suami mereka. Hal ini berdasarkan firman Allah di atas, yaitu dengan digunakannya kata *lahunna* (dalam bentuk jamak) yang bermakna ‘mereka perempuan’. Jadi, baik suami meninggalkan seorang istri ataupun empat orang istri, bagian mereka tetap seperempat dari harta peninggalan.

c. *As}h}a>b al-furu>d* yang Berhak Mendapat Seperdelapan

Dari sederetan *as}h}a>b al-furu>d* yang berhak memperoleh bagian seperdelapan (1/8) yaitu istri. Istri, baik seorang maupun lebih akan mendapatkan seperdelapan dari harta peninggalan suaminya, bila suami mempunyai anak atau

cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya atau dari rahim istri yang lain. Dalilnya adalah firman Allah SWT:

*"... Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi, wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu ..." (an-Nisa': 12)*

d. *As}h}a>b al-furu>d* yang Berhak Mendapat Bagian Dua per Tiga

Ahli waris yang berhak mendapat bagian dua per tiga (2/3) dari harta peninggalan pewaris ada empat, dan semuanya terdiri dari wanita:

1. Dua anak perempuan (kandung) atau lebih.
2. Dua orang cucu perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih.
3. Dua orang saudara kandung perempuan atau lebih.
4. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih.

Ketentuan ini terikat oleh syarat-syarat seperti berikut:

1. Dua anak perempuan (kandung) atau lebih itu tidak mempunyai saudara laki-laki, yakni anak laki-laki dari pewaris. Dalilnya firman Allah berikut:

*"... dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan ..." (Q.S An-Nisa>': 11)*

Ada satu hal penting yang mesti kita ketahui agar tidak tersesat dalam memahami hukum yang ada dalam Kitabullah. Makna *"fauqa itsnataini"* bukanlah anak perempuan lebih dari dua, melainkan dua anak perempuan atau lebih, hal ini merupakan kesepakatan para ulama. Mereka bersandar pada hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang



mengisahkan vonis Rasulullah terhadap pengaduan istri Sa'ad bin ar-Rabi' r.a. sebagaimana diungkapkan dalam bab sebelum ini.

Hadits tersebut sangat jelas dan tegas menunjukkan bahwa makna ayat *itsnataini* adalah dua anak perempuan atau lebih. Jadi, orang yang berpendapat bahwa maksud ayat tersebut adalah “anak perempuan lebih dari dua” jelas tidak benar dan menyalahi ijma' para ulama.

2. Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki akan mendapatkan bagian dua per tiga ( $\frac{2}{3}$ ), dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a) Pewaris tidak mempunyai anak kandung, baik laki-laki atau perempuan.
  - b) Pewaris tidak mempunyai dua orang anak kandung perempuan.
  - c) Dua cucu putri tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki.
3. Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) akan mendapat bagian dua per tiga dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a) Bila pewaris tidak mempunyai anak (baik laki-laki maupun perempuan), juga tidak mempunyai ayah atau kakek.
  - b) Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) itu tidak mempunyai saudara laki-laki sebagai *asabah*.
  - c) Pewaris tidak mempunyai anak perempuan, atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Dalilnya adalah firman Allah:
 

“... tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua per tiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal...” (Q.S. An-Nisa>': 176)

4. Dua saudara perempuan seayah (atau lebih) akan mendapat bagian dua per tiga dengan syarat sebagai berikut:

- a) Bila pewaris tidak mempunyai anak, ayah, atau kakek.
- b) Kedua saudara perempuan seayah itu tidak mempunyai saudara laki-laki seayah.
- c) Pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, atau saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan).

Persyaratan yang harus dipenuhi bagi dua saudara perempuan seayah untuk mendapatkan bagian dua per tiga hampir sama dengan persyaratan dua saudara kandung perempuan, hanya di sini (saudara seayah) ditambah dengan keharusan adanya saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan). Dan dalilnya sama, yaitu ijma' para ulama bahwa ayat “... *tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua per tiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal ...*”(Q.S.An-Nisa>’: 176) mencakup saudara kandung perempuan dan saudara perempuan seayah. Sedangkan saudara perempuan seibu tidaklah termasuk dalam pengertian ayat tersebut. Wallahu a’lam.

e. *As}h}a>b al-furu>d* yang Berhak Mendapat Bagian Sepertiga

Adapun *as}h}a>b al-furu>d* yang berhak mendapatkan warisan sepertiga bagian hanya dua, yaitu ibu dan dua saudara (baik laki-laki ataupun perempuan) yang seibu.

Seorang ibu berhak mendapatkan bagian sepertiga dengan syarat:

1. Pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki.
2. Pewaris tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih (laki-laki maupun perempuan), baik saudara itu sekandung atau seayah ataupun seibu. Dalilnya adalah firman Allah:

*"... dan jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga..."* (Q.S. An-Nisa>': 11)

Juga firman-Nya:

*"... jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam..."* (Q.S. An-Nisa>': 11)

f. *As}h}a>b al-furu>d* yang Mendapat Bagian Seperenam

Adapun *as}h}a>b al-furu>d* yang berhak mendapat bagian seperenam (1/6) ada tujuh orang. Mereka adalah (1) ayah, (2) kakek asli (bapak dari ayah), (3) ibu, (4) cucu perempuan keturunan anak laki-laki, (5) saudara perempuan seayah, (6) nenek asli, (7) saudara laki-laki dan perempuan seibu.

1. Seorang ayah akan mendapat bagian seperenam (1/6) bila pewaris mempunyai anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan. Dalilnya firman Allah (artinya): *"... Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak..."* (Q.S. An-Nisa>': 11)
2. Seorang kakek (bapak dari ayah) akan mendapat bagian seperenam (1/6) bila pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki dari keturunan anak dengan syarat ayah pewaris tidak ada. Jadi, dalam keadaan

demikian salah seorang kakek akan menduduki kedudukan seorang ayah, kecuali dalam tiga keadaan yang akan saya rinci dalam bab tersendiri.

3. Ibu akan memperoleh seperenam ( $1/6$ ) bagian dari harta yang ditinggalkan pewaris, dengan dua syarat:

- a) Bila pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki keturunan anak laki-laki.
- b) Bila pewaris mempunyai dua orang saudara atau lebih, baik saudara laki-laki ataupun perempuan, baik sekandung, seayah, ataupun seibu. Dalilnya firman Allah (artinya):

*“... jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam...”* (Q.S. An-Nisa>’: 11).

4. Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki seorang atau lebih akan mendapat bagian seperenam ( $1/6$ ), apabila yang meninggal (pewaris) mempunyai satu anak perempuan. Dalam keadaan demikian, anak perempuan tersebut mendapat bagian setengah ( $1/2$ ), dan cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki pewaris mendapat seperenam ( $1/6$ ), sebagai pelengkap dua per tiga ( $2/3$ ). Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya bahwa Abu Musa al-Asy’ari r.a. ditanya tentang masalah warisan seseorang yang meninggalkan seorang anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-lakinya, dan saudara perempuan. Abu Musa kemudian menjawab: *“Bagi anak perempuan mendapat bagian separo ( $1/2$ ), dan yang setengah sisanya menjadi bagian saudara perempuan.”*

Merasa kurang puas dengan jawaban Abu Musa, sang penanya pergi mendatangi Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud berkata: "Aku akan memutuskan seperti apa yang pernah diputuskan Rasulullah saw., bagi anak perempuan separo ( $1/2$ ) harta peninggalan pewaris, dan bagi cucu perempuan keturunan dari anak laki-laki mendapat bagian seperenam ( $1/6$ ) sebagai pelengkap  $2/3$ , dan sisanya menjadi bagian saudara perempuan pewaris."

Mendengar jawaban Ibnu Mas'ud, sang penanya kembali menemui Abu Musa al-Asy'ari dan memberi tahu permasalahannya. Kemudian Abu Musa berkata: *"Janganlah sekali-kali kalian menanyaiku selama sang alim ada di tengah-tengah kalian."*

5. Saudara perempuan seayah satu orang atau lebih akan mendapat bagian seperenam ( $1/6$ ), apabila pewaris mempunyai seorang saudara kandung perempuan. Hal ini hukumnya sama dengan keadaan jika cucu perempuan keturunan anak laki-laki bersamaan dengan adanya anak perempuan. Jadi, bila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah atau lebih, maka saudara perempuan seayah mendapat bagian seperenam ( $1/6$ ) sebagai penyempurna dari dua per tiga ( $2/3$ ). Sebab ketika saudara perempuan kandung memperoleh setengah ( $1/2$ ) bagian, maka tidak ada sisa kecuali seperenam ( $1/6$ ) yang memang merupakan hak saudara perempuan seayah.
6. Saudara laki-laki atau perempuan seibu akan mendapat bagian masing-masing seperenam ( $1/6$ ) bila mewarisi sendirian. Dan persyaratannya adalah bila

pewaris tidak mempunyai pokok (yakni kakek) dan tidak pula cabang (yakni anak, baik laki-laki atau perempuan).

7. Nenek asli mendapatkan bagian seperenam (1/6) ketika pewaris tidak lagi mempunyai ibu. Ketentuan demikian baik nenek itu hanya satu ataupun lebih (dari jalur ayah maupun ibu), yang jelas seperenam itu dibagikan secara rata kepada mereka. Hal ini berlandaskan pada apa yang telah ditetapkan di dalam hadits sahih dan ijma' seluruh sahabat.

Ashhabus Sunan meriwayatkan bahwa seorang nenek datang kepada Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. untuk menuntut hak warisnya. Abu Bakar menjawab: "Saya tidak mendapati hakmu dalam Al-Qur'an maka pulanglah dulu, dan tunggulah hingga aku menanyakannya kepada para sahabat Rasulullah saw." Kemudian al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan kepada Abu Bakar: "Suatu ketika aku pernah menjumpai Rasulullah saw. memberikan hak seorang nenek seperenam (1/6)." Mendengar pernyataan al-Mughirah itu Abu Bakar kemudian memanggil nenek tadi dan memberinya seperenam (1/6)<sup>37</sup>

#### E. Kewarisan *Z/awi< al-arh}a>m*

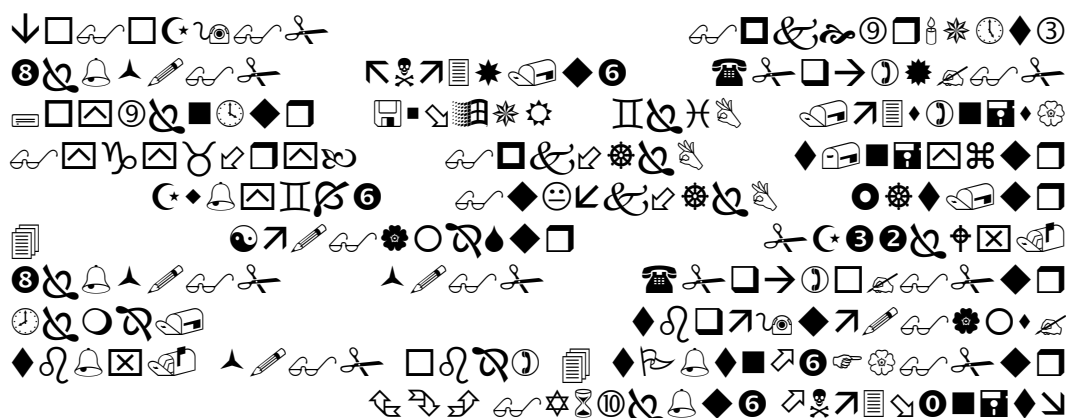
*Z/awi< al-arh}a>m* berasal dari bahasa Arab: *dzawu>* (ذوو) dan *al-arh}a>m* (الأرحام). Semula istilah *z\awi< al-arh}a>m* mempunyai arti yang luas, yakni mencakup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal.

---

<sup>37</sup> Muhammad 'Ali< as-S{a>bu>ni<, *al-Mawa>ri<s\ fi<...*, *Op. Cit*, hlm. 49-61. Lihat Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, *Op.Cit*, hlm. 42-64. Lihat Muh}ammad bin S|alih} bin al-'Us\aimi>n, *Tas-hi>lul Fara>'id*, *Op. Cit*, hlm.46-95

Kata arham dalam  $z\backslash awi < al-arh\}a > m$  adalah bentuk jamak dari kata  $rah\}mun$ , yang asalnya dalam bahasa Arab berarti tempat pembentukan/menyimpan janin dalam perut ibu.<sup>38</sup> Kemudian artinya dikembangkan menjadi kerabat, baik datangnya dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu.<sup>39</sup> Pengertian ini tentu saja disandarkan karena adanya rahim yang menyatukan asal mereka. Dengan demikian, *lafaz\ rah\}im* tersebut umum digunakan dengan makna kerabat, baik dalam bahasa Arab ataupun dalam istilah syariat Islam. Allah berfirman di dalam Surat An Nisaa' ayat

(1) sebagai berikut :



"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."<sup>40</sup>

Kalimat  $wal-arh\}a > m$  dalam Surat An-Nisa>' ayat 1 tersebut mengandung arti hubungan keluarga/silaturahmi. Makna keseluruhan dari ayat tersebut di atas adalah bahwa Allah SWT memerintahkan untuk selalu menjaga hubungan silaturahmi diantara sesama saudara dalam segala hal. Kata  $al-arh\}a > m$  itu kemudian dijadikan

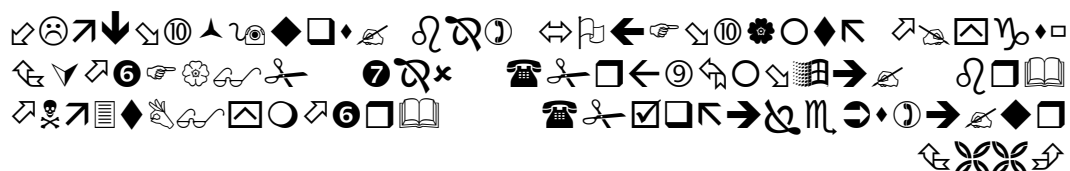
<sup>38</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), Cet. II, hlm. 97. Lihat Komite Fakultas Syari'ah Universitas Mesir, *Ah\}ka > m al-Mawa > ris fi < \...*, *Op. Cit*, hlm. 337.

<sup>39</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris...* *Op.Cit*, hlm.199

<sup>40</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *Op.Cit*, hlm. 114

dasar dalam hal pembagian warisan bagi saudara yang masih memiliki hubungan darah dengan pewaris, meskipun bukan saudara kandung.

Denikian juga firman Allah :



"Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?" (Q.S. Muhammad: 22)<sup>41</sup>

Rasulullah saw. bersabda:

و حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبَسِّطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

"Dan telah menceritakan kepadaku 'Abdul Malik bin Syu'aib bin Al Laitis; Telah menceritakan kepadaku Bapakku dari Kakekku; Telah menceritakan kepadaku 'Uqail bin Khalid dia berkata; Ibnu Syihab berkata; Telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezkinya, dan ingin dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi." (HR. Muslim)<sup>42</sup>

Para ulama faraidh memberikan definisi *al-awil al-arh* sebagaimana

yang dikemukakan Sayid Sabiq<sup>43</sup> :

كُلُّ قَرِيبٍ لَيْسَ بِذِي فَرْضٍ وَلَا عَصَبَةٍ

"Setiap kerabat yang bukan (tidak termasuk) *al-Furu* dan bukan (tidak termasuk) golongan *al-bah*."

<sup>41</sup> Ibid, hlm. 833

<sup>42</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis No.4639

<sup>43</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz III*, Op. Cit, hlm.1017. Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*...Op.Cit, hlm. 199. Lihat Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*...Op. Cit, hlm. 67



Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan si pewaris, selain kedua puluh lima orang ahli waris yang telah disebutkan di atas, atau mereka yang tidak mempunyai bagian tertentu di dalam Al-Qur'an<sup>44</sup> termasuk kelompok  $z\backslash awi < al-arh\}a > m$ .

Adapun orang-orang yang termasuk kelompok  $z\backslash awi < al-arh\}a > m$  tersebut, antara lain adalah:<sup>45</sup>

Adapun *lafaz*  $z\backslash awi < al-arh\}a > m$  yang dimaksud menurut istilah fuqaha' adalah kerabat pewaris yang tidak mempunyai bagian/hak waris yang tertentu, baik dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah, dan bukan pula termasuk dari para  $as\}a > bah$ . Maksudnya,  $z\backslash awi < al-arh\}a > m$  adalah mereka yang bukan termasuk ahli waris  $as\}h\}a > b$   $al-furu > d$  dan bukan pula ahli waris  $as\}a > bah$ . Jadi,  $z\backslash awi < al-arh\}a > m$  adalah ahli waris yang mempunyai tali kekerabatan dengan pewaris, namun mereka tidak mewarisinya secara  $as\}h\}a > b$   $al-furu > d$  dan tidak pula secara  $as\}a > bah$ . Misalnya, bibi (saudara perempuan ayah atau ibu), paman (saudara laki-laki ibu), keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya.<sup>46</sup>

Para imam mujtahid berbeda pendapat dalam masalah hak waris  $z\backslash awi < al-arh\}a > m$ , sama halnya dengan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah saw. Dalam hal ini ada dua pendapat:

<sup>44</sup> Moh. Anwar, *Faraidl (Hukum Waris Dalam...)*, Op. Cit, hlm. 26. Lihat Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris...Op.Cit*, hlm. 98

<sup>45</sup> Superman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 80-81. Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 80-81

<sup>46</sup> Muhammad 'Ali < as-S{a > bu > ni <, *al-Mawa > ri < s\ fi < ...*, Op. Cit, hlm. 177. Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris...Op.Cit*, hlm. 199. Lihat Akhmad Kuzari, *Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 172. Lihat Komite Fakultas Syari'ah Universitas Mesir, *Ah\ka > m al-Mawa > ris fi < \...*, Op. Cit, hlm. 338. Lihat Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab*, Jilid III, (Jakarta: Cahaya, 2007), hlm. 30

**Pertama:** golongan ini berpendapat bahwa *z\awi< al-arh}a>m* atau para kerabat tidak berhak mendapat waris. Lebih jauh mereka mengatakan bahwa bila harta waris tidak ada *as}h}a>b al-furu>d* atau *as}a>bah* yang mengambilnya, maka seketika itu dilimpahkan kepada *baitul ma>l* kaum muslim untuk disalurkan demi kepentingan masyarakat Islam pada umumnya. Dengan demikian, tidak dibenarkan jika harta tersebut diberikan kepada *z\awi< al-arh}a>m*. Di antara mereka yang berpendapat demikian ialah Zaid bin S|a>bit r.a. dan Ibnu ‘Abba>s r.a. dalam sebagian riwayat darinya, dan juga merupakan pendapat dua ima>m, yaitu Ma>liki dan Sya>fi’i *rahimahumullah*. (dalam salah satu riwayatnya)<sup>47</sup> Sa’id bin Musayya>b, Sa’id bin Zubair, Sufya>n al-s\auri, Ima>m Ma>lik, Ima>m Sya>fi’i, dan Ibnu Hazm.<sup>48</sup>

**Kedua:** golongan kedua ini berpendapat bahwa *z\awi< al-arh}a>m* (kerabat) berhak mendapat waris, bila tidak ada *as}h}a>b al-furu>d*, ataupun *as}a>bah* yang menerima harta pewaris. Lebih jauh golongan kedua ini mengatakan bahwa *z\awi< al-arh}a>m* adalah lebih berhak untuk menerima harta waris dibandingkan lainnya, sebab mereka memiliki kekerabatan dengan pewaris. Karena itu mereka lebih diutamakan untuk menerima harta tersebut daripada *baitul ma>l*. Pendapat ini merupakan jumbuh sahabat, di antaranya ‘Umar bin Khatha>b, Ibnu Mas’u>d,<sup>49</sup> (dalam salah satu riwayatnya yang termasyur), Syuraih al-Qa>d}i, Ibnu

<sup>47</sup> Muhammad ‘Ali< as-S{a>bu>ni<, *al-Mawa>ri<s\fi...*, *Op. Cit*, hlm.178

<sup>48</sup> Muhammad Yu>suf Mu>sa, *Al-Tirkah wa al-Mira>s\ fi< al-Isla>m*, (Mesir : Da>r al-kitab al-‘Araby, 1959), hlm. 277. Lihat M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, *Op.Cit*, hlm. 162. Lihat Komite Fakultas Syari’ah Universitas Mesir, *Ah}ka>m al-Mawa>ris fi<..., Op. Cit*, hlm. 342

<sup>49</sup> Muhammad ‘Ali< as-S{a>bu>ni<, *al-Mawa>ri<s\fi<...*, *Op. Cit*, hlm. 178

Sirrin, ‘Atha, Muja>hid<sup>50</sup> dan sahabat lainnya seperti: ‘Ali< bin Abi< Tho>lib. Abu> Bakar, ‘Us\man, Zaid, Zuhri>, Auza’i, dan Da>ud. Juga merupakan pendapat Ima>m Abu> Hani<fah dan Ima>m Ah}mad bin H\{ambal rahimahumulla>h.<sup>51</sup>

Adapun dalil yang dijadikan landasan oleh imam Ma>liki dan Sya>fi’i (golongan pertama) ialah:

- a. Asal pemberian hak waris atau asal penerimaan hak waris adalah dengan adanya nash syari’i dan qath’i dari Al-Qur’an atau Sunnah. Dan dalam hal ini tidak ada satu pun nash yang pasti dan kuat yang menyatakan wajibnya *z\awi< al-arh}a>m* untuk mendapat waris. Jadi, bila kita memberikan hak waris kepada mereka (*z\awi< al-arh}a>m*) berarti kita memberikan hak waris tanpa dilandasi dalil pasti dan kuat. Hal seperti ini menurut syariat Islam adalah batil.
- b. Rasulullah saw. ketika ditanya tentang hak waris bibi baik dari garis ayah maupun dari ibu beliau saw. menjawab: “Sesungguhnya Jibril telah memberitahukan kepadaku bahwa dari keduanya tidak ada hak menerima waris sedikit pun.”

Memang sangat jelas betapa dekatnya kekerabatan saudara perempuan ayah ataupun saudara perempuan ibu dibandingkan kerabat lainnya. Maka jika keduanya tidak berhak untuk menerima harta waris, kerabat lain pun demikian. Sebab, tidak mungkin dan tidak dibenarkan bila kita memberikan hak waris kepada kerabat lain, sedangkan bibi tidak mendapatkannya. Hal demikian dalam dunia fiqih dikenal dengan istilah *tarjih bilaa murajjih* yang berarti batil. Dengan dasar ini dapat

---

<sup>50</sup> Muhammad Yu>suf Mu>sa, *Al-Tirkah wa...*, *Op.cit.*, hlm. 278. Lihat Komite Fakultas Syari’ah Universitas Mesir, *Ah}ka>m al-Mawa>ris fi<\...*, *Op. Cit*, hlm. 343.

<sup>51</sup> Sayi>d Sa>biq, *Fiqh al-Sunnah...*, *Op.cit.*, hlm. 1017. Lihat Muhammad ‘Ali hami>d as-S{a>bu>ni, (penerjemah Abdulhamid Zahwa), *Hukum Waris*, (Jakarta: Pusta Mantiq, 1994) hlm. 145. Lihat M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, *Op.Cit*, hlm. 164

dipetik pengertian bahwa karena Rasulullah saw. tidak memberikan hak waris kepada para bibi, maka tidak pula kepada kerabat yang lain.

- c. Harta peninggalan, bila ternyata tidak ada ahli warisnya secara sah dan benar baik dari *as}h}a>b al-furu>d-nya* ataupun para *as}a>bah-nya* bila diserahkan ke *baitul ma>l* akan dapat mewujudkan kemaslahatan umum, sebab umat Islam akan ikut merasakan faedah dan kegunaannya. Namun sebaliknya, bila diserahkan kepada kerabatnya, maka kegunaan dan faedahnya akan sangat minim, dan hanya kalangan mereka saja yang merasakannya. Padahal dalam kaidah ushul fiqih telah ditegaskan bahwa kemaslahatan umum harus lebih diutamakan daripada kemaslahatan pribadi. Atas dasar inilah maka *baitul ma>l* lebih diutamakan untuk menyimpan harta waris yang tidak ada *as}h}a>b al-furu>d* dan *as}a>bah* nya ketimbang para kerabat.<sup>52</sup>

Adapun golongan kedua, yakni Imam Abu Hanifah dan Imam Ah}mad bin H\{ambal, menyatakan bahwa *z\awi< al-arh}a>m* atau para kerabat berhak mendapatkan waris, mereka mendasari pendapatnya itu dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan logika. Dalil Al-Qur'an yang dimaksud ialah:



"... Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Q.S. al-Anfa>l: 75)<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Muhammad 'Ali< as-S{a>bu>ni<, *al-Mawa>ri<s\fi<...*, *Op. Cit*, hlm. 178-179

<sup>53</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *Op.Cit*, hlm. 274

$Z\{awi< al-arh\}a>m$  juga mempunyai kesamaan dan kelebihan dengan umat Islam pada umumnya. Adapun kesamaannya terletak pada ketundukkan kedua belah pihak pada umumnya, dan kelebihannya terletak pada adanya hubungan kekerabatan dengan orang yang meninggal dunia.

Jadi  $z\{awi< al-arh\}a>m$  lebih mempunyai sisi kelebihan dibandingkan dengan  $baitul ma>l$ , yang mana  $baitul ma>l$  dengan orang yang meninggal dunia hanya mempunyai satu hubungan yaitu agama Islam sedangkan  $z\{awi< al-arh\}a>m$  dengan orang yang meninggal dunia mempunyai dua hubungan yaitu agama Islam dan kekerabatan.<sup>54</sup>

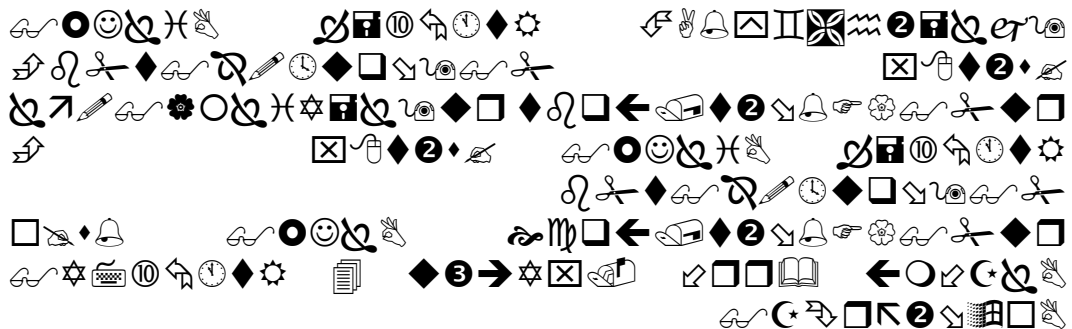
Makna yang mendasar dari dalil ini ialah bahwa Allah SWT telah menyatakan atau bahkan menegaskan dalam Kitab-Nya bahwa para kerabat lebih berhak untuk mendapatkan atau menerima hak waris daripada yang lain. Di sini, lafazh  $arh\}a>m$  yang berarti kerabat adalah umum, termasuk  $as\}h\}a>b al-furu>d$ , para  $as\}a>bah$ , serta selain keduanya. Pendek kata, makna kata itu mencakup kerabat yang mempunyai hubungan rahim atau lebih umumnya hubungan darah.

Ayat tersebut seolah-olah menyatakan bahwa yang disebut kerabat siapa pun mereka, baik  $as\}h\}a>b al-furu>d$ , para  $as\}a>bah$ , atau selain dari keduanya merekalah yang lebih berhak untuk menerima hak waris ketimbang yang bukan kerabat. Bila pewaris mempunyai kerabat dan kebetulan ia meninggalkan harta waris, maka berikanlah harta waris itu kepada kerabatnya dan janganlah mendahulukan yang lain. Jadi, atas dasar inilah maka para kerabat pewaris lebih berhak untuk menerima hak waris ketimbang  $baitul ma>l$ .

---

<sup>54</sup> Ibn Rusyd dan Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad, *Bidayah al-Mujtahid wa Niha'yatul Muqtasid*, (Beirut: Darul Fikr, t.t.) Juz II, him. 254-255

Hal ini juga berdasarkan firman-Nya yang lain:



*"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dan harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (Q.S. An-Nisa>': 7)<sup>55</sup>*

Melalui ayat ini Allah SWT menyatakan bahwa kaum laki-laki dan wanita mempunyai hak untuk menerima warisan yang ditinggalkan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak. Seperti yang disepakati oleh jumhur ulama bahwa yang dimaksud dengan *al-arh* adalah para kerabat. Dengan demikian, mereka (*al-arh*) berhak untuk menerima warisan.

Kemudian sebagaimana dinyatakan oleh mayoritas ulama bahwa ayat di atas me-mansukh (menghapus) kebiasaan pada awal munculnya Islam, pada masa itu kaum muslimin saling mewarisi disebabkan menolong dan hijrah. Dengan turunnya ayat ini, maka yang dapat saling mewarisi hanyalah antara sesama kerabat (*al-arh*). Oleh karena itu, para kerabatlah yang paling berhak untuk menerima harta peninggalan seorang pewaris.

Adapun dalil dari Sunnah Nabawiyah adalah seperti yang diberitakan dalam sebuah riwayat masyhur, dalam riwayat ini dikisahkan. Ketika S|a>bit bin ad-Dah}da>h} meninggal dunia, maka Rasulullah saw. bertanya kepada Qais bin

<sup>55</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op.Cit, hlm. 116

‘A<s}im, “Apakah engkau mengetahui nasab orang ini?” Qais menjawab, “Yang kami ketahui orang itu dikenal sebagai asing nasabnya, dan kami tidak mengetahui kerabatnya, kecuali hanya anak laki-laki dari saudara perempuannya, yaitu Abu>Luba>nah bin ‘Abdul Mundz\ir. Kemudian Rasul pun memberikan harta warisan peninggalan S|a>bit kepada Abu>Lubana>h bin ‘Abdul Mundzir.

Keponakan laki-laki dari anak saudara perempuan tidak lain hanyalah merupakan kerabat, yang bukan dari *as}h}a>b al-furu>d* dan bukan pula termasuk *as}a>bah*. Dengan pemberian Rasulullah saw. akan hak waris kepada *z\awi< al-arh}a>m* menunjukkan dengan tegas dan pasti bahwa para kerabat berhak menerima harta waris bila ternyata pewaris tidak mempunyai *as}h}a>b al-furu>d* yang berhak untuk menerimanya atau para *as}a>bah*.

Adapun dalil logikanya seperti berikut: sesungguhnya para kerabat jauh lebih berhak untuk menerima harta warisan daripada *baitul ma>l*. Alasannya, karena ikatan antara *baitul ma>l* dan pewaris hanya dari satu arah, yaitu ikatan Islam karena pewaris seorang muslim. Berbeda halnya dengan seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris, dalam hal ini ia mempunyai dua ikatan: ikatan Islam dan ikatan rahim. Oleh sebab itu, ikatan dari dua arah sudah barang tentu akan lebih kuat dibandingkan ikatan satu arah.

Menurut Muhammad ‘Abdurrahim al-Kisyka dalam kitabnya *al-Muh}a>d>}arat fil Mi>ra>s\il Muqaran*, bahwa pendapat yang terkuat di antara dua pendapat tersebut adalah pendapat jumhur yang menetapkan adanya hak pusaka bagi *z\awi< al-arh}a>m*. Karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh jumhur berlandaskan dengan keumuman al-Qur’an dengan dikuatkan oleh as-Sunnah dan

amaliyah para *Khulafa> ur-Ra>syidi>n*. Beliau membantah argumentasi yang dikemukakan oleh para *fuqaha'* yang meniadakan pusaka *z\awi< al-arh}a>m*.<sup>56</sup>

Setelah membandingkan kedua pendapat itu, kita dapat menyimpulkan bahwa pendapat jumhur ulama (kelompok kedua) lebih rajih (kuat dan akurat), karena memang merupakan pendapat mayoritas sahabat, *ta>bi'i>n*, dan *Ima>m mujtahidi>n*. Di samping dalil yang mereka kemukakan lebih kuat dan akurat, juga tampak lebih adil apalagi jika dihubungkan dengan kondisi kehidupan dewasa ini.

Sebagai contoh, kelompok pertama berpendapat lebih mengutamakan *baitul ma>l* ketimbang kerabat, sementara di sisi lain mereka mensyaratkan keberadaan *baitul ma>l* dengan persyaratan khusus. Di antaranya, *baitul ma>l* harus terjamin pengelolaannya, adil, dan amanah; adil dalam memberi kepada setiap yang berhak, dan tepat guna dalam menyalurkan harta *baitul ma>l*.<sup>57</sup> Melihat kenyataan demikian, para ulama dari maz\hab Ma>liki dan maz\hab Sya>fi'i mutakhir memberikan fatwa dengan mendahulukan para kerabat ketimbang *baitul ma>l*, khususnya setelah abad ketiga Hijriah, ketika pengelolaan *baitul ma>l* tidak lagi teratur sehingga terjadi penyalahgunaan. Perlu dikemukakan di sini, bahwa pada perkembangan selanjutnya, karena kurang berfungsinya *baitul ma>l*, para pengikut *Ima>m Sya>fi'i* memberikan hak waris kepada *z\awi< al-arh}a>m*. Hal ini sebagaimana dikemukakan Hasanain Muhammad Makhluḥ:

إِنَّ أَصْحَابَ الشَّافِعِيِّ يَفْتُونَ الْيَوْمَ بِتَوْرِيثِهِمْ لِفَسَادِ بَيْتِ الْمَالِ

<sup>56</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris Op. Cit.*, hlm. 355

<sup>57</sup> Muhammad 'Ali< as-S{a>bu>ni<, *al-Mawa>ri<s\fi<...*, *Op. Cit.*, hlm. 179-182



“Sesungguhnya para pengikut *al-Syafi'i*, pada masa kini, memberikan fatwa untuk memberikan hak waris kepada mereka (*zawid al-arh*) karena rusaknya baitul mal.”<sup>58</sup>

Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa kedua kelompok ulama tersebut pada akhirnya bersepakat untuk lebih mengutamakan pemberian harta waris kepada *zawid al-arh* ketimbang baitul mal. Hal ini dapat terlihat tentunya dengan melihat dan mempertimbangkan kemaslahatan yang ada, dari mulai akhir abad ketiga Hijriah hingga masa kita dewasa ini.<sup>59</sup>

Apabila *zawid al-arh* (baik laki-laki maupun perempuan) seorang diri menjadi ahli waris, maka ia akan menerima seluruh harta waris. Sedangkan jika dia berbarengan dengan salah satu dari suami atau istri, maka ia akan menerima sisanya.

Itulah sekelumit mengenai hak waris para *zawid al-arh* menurut mazhab *Ahl al-qara'* yang merupakan imam Ali bin Abi Thalib r.a. dan para ulama mazhab *Hanafi*. Pendapat ini banyak diterapkan di sebagian negara Arab dan negara Islam lainnya.

Sebenarnya, di kalangan ulama mazhab ini banyak dijumpai perbedaan tentang cara pembagian masing-masing kelompok tadi. Untuk itu bagi yang menghendaki pengetahuan lebih luas dalam masalah ini dapat merujuknya pada kitab-kitab fiqh. Selain itu, pada prinsipnya yang banyak diamalkan adalah pandangan mazhab *Ahl at-Tanizi* sebagai imam Ahmad, yang kemudian dianut

<sup>58</sup> H{usnain Muhammad Makhlu<sup>f</sup>, *Al-Mawa<sup>r</sup>is<sup>\</sup> fi<sup><</sup> al-Syari'<sup>'</sup>at al-Isla<sup>></sup>miyyah*, (Kairo: Lajnah al-Bayyan al-'Araby<sup>></sup>, 1958), hlm. 132.

<sup>59</sup> Muhammad 'Ali<sup><</sup> as-S{a<sup>></sup>bu<sup>></sup>ni<sup><</sup>, *al-Mawa<sup>></sup>ri<sup><</sup>s<sup>\</sup> fi<sup><</sup>...*, *Op. Cit*, hlm. 183

oleh ulama *muta'akhiri*n maz\hab Ma>liki dan Sya>fi'i karena dari segi pengamalannya memang lebih mudah.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 191-193

## BAB IV

### KEWARISAN AHLI WARIS PENGGANTI DAN Z/AWI< AL-ARHA<M

#### A. Persamaan dan Perbedaan Terminologi Ahli Waris Pengganti dan Z/awi< al-arh}a>m

Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pewaris, sehingga dia tampil menggantikannya.<sup>1</sup>

Pada dasarnya hukum waris Islam tidak mengenal adanya konsep penggantian kedudukan di dalam mawaris. Karena perlu juga diperhatikan apakah yang dimaksud dengan ahli waris dalam hukum waris Islam adalah ahli waris yang masih hidup saja atau termasuk juga ahli waris yang sudah meninggal sebelum pewaris itu meninggal dunia juga masih dianggap sebagai ahli waris, sehingga dalam hal pembagian warisan kedudukannya dapat digantikan oleh keturunannya.

Seperti diketahui bahwa salah satu syarat pewarisan menurut hukum waris Islam adalah hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia. Dan jika ada ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris, maka ia tidak berhak mendapatkan bagian. Demikian juga halnya apabila ahli waris yang meninggal tersebut mempunyai keturunan, maka sebagai cucu dari pewaris mereka juga tidak berhak mendapatkan warisan karena terhalang oleh paman dan bibinya.

Ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam untuk melengkapi hukum-hukum yang telah ada dan juga bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris. Jadi bagian ahli waris pengganti sebesar bagian ahli waris yang digantikannya, untuk

---

<sup>1</sup> Ahmad Zahari, *Hukum Kewarisan Islam* (Pontianak: FH.Untan Pres, 2008), hlm. 148

itu ahli waris pengganti perlu dikembangkan dalam hukum kewarisan Islam. Apalagi hal ini tidak akan merugikan ahli waris lainnya.

Anggapan di sebahagian pihak bahwa hukum Islam tidak mengenal ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan, seperti; seorang cucu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku anak pewaris, keponakan menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku saudara pewaris, saudara sepupu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku paman pewaris, dan seterusnya.

Kata *Arh}a>m* merupakan bentuk *jama'* dari *rah}i<m* artinya tempat berdiamnya janin dalam kandungan ibu. Sedangkan secara terminologis berarti kerabat, baik yang mempunyai hubungan darah dari jalur ayah maupun ibu.<sup>2</sup> *Z}awi> al-arh}a>m* merupakan ahli waris yang mempunyai hubungan darah/tali kekerabatan dengan mayit (pewaris), tetapi tidak termasuk golongan ahli waris *z}awi< al-Furu>d* dan *as}a>bah*. Dengan demikian secara sederhana bisa dikatakan bahwa *z}awi< al-arh}a>m* hanya diperuntukkan bagi kerabat dari jalur perempuan, baik itu laki-laki maupun perempuan.

Istilah *z}awi> al-arh}a>m* ini tidak dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit, boleh jadi pertimbangannya dalam kehidupan ini keberadaan *z}awi> al-arh}a>m* jarang terjadi atau tidak sejalan dengan ide dasar hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>3</sup>

Kesamaan Ahli Waris Pengganti dengan *Z}awi> al-arh}a>m* terletak pada bahwa keduanya tidak golongan ahli waris *z}awi< al-Furu>d* dan *as}a>bah*.

<sup>2</sup> Muhammad 'Ali< as-S{a>bu>ni<, *al-Mawa>ri<s\ fi< asy-Syari<'ah al-Isla>miyyah fi< D{au' al-Kita>b wa as-Sunnah*, cet.ke-1 (Kairo: Da>r al-Qalam, t.t. ), hlm. 177.

<sup>3</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 385

Mereka dianggap sebagai keluarga “jauh” dari pewaris. Namun posisi Ahli Waris Pengganti dengan  $z\backslash awi > al-arh\}a > m$  lebih dekat kepada pewaris, bila dibandingkan dengan seorang tuan dengan maulanya dan *bait al-ma > l*. Pada kondisi, pewaris tidak meninggalkan ahli waris  $z\backslash awi < al-Furu > d$  dan *as\}a > bah* atau harta yang diwariskan masih bersisa setelah dibagikan kepada ahli waris  $z\backslash awi < al-Furu > d$  dan *as\}a > bah*, maka posisi ahli waris berikutnya adalah  $z\backslash awi > al-arh\}a > m$ , *mawali*, dan *bait al-ma > l*.

Perbedaan Ahli Waris Pengganti dengan  $Z\backslash awi > al-arh\}a > m$  adalah; *pertama*, Ahli Waris Pengganti meliputi pihak kerabat dari jalur laki-laki dan perempuan. Sedangkan  $z\backslash awi < al-arh\}a > m$  hanya diperuntukkan bagi kerabat dari jalur perempuan, baik itu laki-laki maupun perempuan. *Kedua*, Ahli Waris Pengganti yang ditetapkan oleh KHI menganut prinsip *bilateral*. Sedangkan  $z\backslash awi < al-arh\}a > m$  yang ditetapkan oleh Fiqh Mawarits menganut prinsip *patrilineal*. *Ketiga*, kewarisan Ahli waris pengganti dalam KHI bukanlah alternatif bila harta warisan masih tersisa, namun ditetapkan sebagai pengganti bagi ahli waris yang meninggal sebelum pewaris, sedangkan kewarisan  $Z\backslash awi > al-arh\}a > m$  bisa jadi mendapatkan warisan yang tersisa setelah dibagikan kepada ahli waris  $z\backslash awi < al-Furu > d$  dan *as\}a > bah*. Berikut dikemukakan daftar persamaan dan perbedaan Ahli Waris Pengganti dengan  $Z\backslash awi > al-arh\}a > m$ ;

NO	TINJAUAN	AHLI WARIS PENGGANTI	ZAWI AL-ARHAM
1	Landasan	KHI	Fiqh Mawaris
2	Istidlal	Maslahah dan Ijma' Ulama Indonesia	Nash dan Qoulus Sahabat
3	Posisi	tidak golongan ahli waris $z\backslash awi < al-Furu > d$ dan	tidak golongan ahli waris $z\backslash awi < al-Furu > d$ dan

		<i>as}a&gt;bah</i>	<i>as}a&gt;bah</i>
4	Kekerabatan	kerabat dari jalur laki-laki dan perempuan	kerabat dari jalur perempuan
5	Prinsip	Bilateral	Patrilineal
6	Sifat	tetap	Tidak tetap

## B. Pola Pembagian Ahli Waris Pengganti dan *Z/awi> al-arh}a>m*

Di dalam syari'at Islam telah ditetapkan mengenai tata cara pembagian harta warisan dengan adil. Di dalam Al Qur'an telah ditetapkan hak kepemilikan atas harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang sah dan dibenarkan menurut ajaran Islam.

Disamping itu Islam juga mengatur tentang hak pemindahan kepemilikan atas harta seseorang sesudah dia meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar ataupun kecil.

Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadits Rasulullah saw dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci sebagaimana hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang sah dan dibenarkan oleh Allah SWT. Di samping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.

Perihal bagian yang ditentukan bagi ahli waris telah disebut oleh Allah SWT yang berfirman di dalam Surat An-Nisa>' ayat (11) sebagai berikut :

Pada ayat tersebut di atas tidak disebutkan berapa bagian cucu atau berapa bagian untuk ahli waris pengganti. Hal ini bisa dijadikan dasar pemikiran bahwa penggantian kedudukan dalam mewaris menurut ketentuan hukum waris Islam itu tidak ada aturannya.

























<sup>4</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 116

Dalam Surat An-Nisa>'(4) ayat (176) yang masih mengatur masalah

[illegible]

<sup>5</sup> *Ibid.* 117





*"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."*<sup>6</sup>

Dalam ayat tersebut Allah menentukan bagian warisan bagi saudara perempuan dan saudara laki-laki dari pewaris bila meninggal tanpa meninggalkan anak.

Di antara fuqaha terjadi perbedaan pendapat mengenai tata cara memberikan hak waris  $z\backslash awi>l\ arh\}a>m$ , dan dalam hal ini terbagi menjadi tiga kelompok maz\hab.

#### 1. Menurut maz\hab *Ahl ar-Rah\mi*

Mengenai cara pembagian hak waris para kerabat, *ahl ar-rahmi* menyatakan bahwa semua kerabat berhak mendapat waris secara rata, tanpa membedakan jauh-dekatnya kekerabatan, dan tanpa membeda-bedakan antara laki-laki dengan perempuan.

Misalnya, seseorang wafat dan meninggalkan seorang cucu perempuan keturunan anak perempuan, seorang keponakan perempuan dari saudara perempuan, bibi (saudara perempuan ayah), bibi (saudara perempuan ibu), dan keponakan laki-laki keturunan saudara laki-laki seibu. Maka dalam hal ini mereka

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 153

mendapatkan bagian waris secara rata, tanpa melebihkan atau mengurangi salah seorang dari ahli waris yang ada.<sup>7</sup>

Maz\hab ini dikenal dengan sebutan *ahl ar-Rah\mi* disebabkan orang-orang yang menganut pendapat ini tidak mau membedakan antara satu ahli waris dengan ahli waris yang lain dalam hal pembagian, mereka juga tidak menganggap kuat serta lemahnya kekerabatan seseorang. Yang menjadi landasan mereka ialah bahwa seluruh ahli waris menyatu haknya karena adanya ikatan kekerabatan. maz\hab *ar-rah\mi* ini dianut, antara lain oleh H\asan bin Muyassar dan Nu\h bin Z\irah.<sup>8</sup>

Pendapat dari maz\hab ini tidak banyak diikuti karena tidak mempunyai landasan yang kuat baik menurut Al Qur'an maupun Hadis. Maz\hab ini tidak masyhur, bahkan dhaif dan tertolak. Karenanya tidak ada satu pun dari ulama atau para imam mujtahid yang mengakuinya apalagi mengikuti pendapat ini dengan alasan telah sangat nyata bertentangan dengan kaidah *Syar'i<yah* yang masyhur dalam disiplin '*Ilmu Mawa>ri<s*.<sup>9</sup>

## 2. Menurut *Ahl at-Tanzi>l*

Golongan ini disebut *ahl at-Tanzi>l* dikarenakan ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris dapat digantikan oleh keturunannya untuk menerima bagian warisan, demikian pula dalam hal menghibah. Ahli waris yang terhibah oleh orang tua, terhibah pula oleh keturunannya. Mereka mendudukan keturunan ahli waris pada kedudukan pokok (induk) ahli waris

<sup>7</sup> Muhammad 'Ali< as-S{a>bu>ni<, *al-Mawa>ri<s\ fi<...*, *Op. Cit*, hlm. 183-184

<sup>8</sup> Muhammad Yu>suf Mu>sa, *Al-Tirkah wa al-Mira>s\ fi< al-Isla>m*, (Mesir : Da>r al-kitab al-'Araby, 1959), hlm. 281.

<sup>9</sup> Muhammad 'Ali< as-S{a>bu>ni<, *al-Mawa>ri<s\ fi< ...*, *Op. Cit*, hlm. 184

asalnya. Mereka tidak memperhitungkan ahli waris yang ada (yang masih hidup), tetapi melihat pada yang lebih dekat dari *as}h}a>bul furu>d}* dan para *as}a>bahnya*. Dengan demikian, mereka akan membagikan hak ahli waris yang ada sesuai dengan bagian ahli waris yang lebih dekat, yakni pokoknya. Inilah pendapat maz\hab *at-Tanzi>l* ini dianut, antara lain oleh Alqa>mah, al-Sya'by, Masyruq, Abu> Nu'aim, al-H{asan bin Z}iya>d dan Ima>m Ah}mad bin H\{ambal, juga merupakan pendapat para ulama mutakhir dari kalangan Ma>liki dan Sya>fi'i.<sup>10</sup>

Adapun yang dijadikan dalil oleh maz\hab *ahl at-Tanzi>l* ini ialah riwayat yang *marfu>'* (sampai sanadnya) kepada Rasulullah saw. Ketika beliau memberi hak waris kepada seorang bibi (saudara perempuan ayah) dan bibi (saudara perempuan ibu) kebetulan saat itu tidak ada ahli waris lainnya maka beliau memberi bibi (dari pihak ayah) dengan dua per tiga (2/3) bagian, dan sepertiga lagi diberikannya kepada bibi (dari pihak ibu).

Adapun dalih orang-orang yang memperkuat maz\hab kedua ini, yang tampak sangat logis, adalah bahwa memberikan hak waris kepada *z\awi>l arh}a>m* tidak dibenarkan kecuali dengan berlandaskan pada nash-nash umum yang justru tidak memberikan rincian mengenai besarnya bagian mereka masing-masing dan tidak ada pentarjihan secara jelas. Oleh karena itu, dengan mengembalikan kepada pokoknya karena memang lebih mendekatkan posisinya kepada pewaris jauh lebih utama dan bahkan lebih berhak. Sebab, rincian besarnya bagian *as}h}a>bul furu>d}* dan para *as}a>bah* telah dijelaskan. Maka tidak ada

---

<sup>10</sup> H{usnain Muhammad Makhlu>f, *Al-Mawa>ris\ fi< al-Syari'at al-Isla>miyyah*, (Kairo: Lajnah al-Bayyan al-'Araby>, 1958), hlm. 133. Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), hlm. 203

jalan lain untuk mengenali dan menuntaskan masalah ini kecuali dengan mengembalikan atau menisbatkannya kepada pokok ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya kepada pewaris.<sup>11</sup>

### 3. Menurut *Ahl al-Qara>bah*

Adapun maz\hab ketiga menyatakan bahwa hak waris para *z\awi>l arh\}a>m* ditentukan dengan melihat derajat kekerabatan mereka kepada pewaris. Hal ini, menurut mereka, dilakukan dengan mengujaskannya pada hak para *as\}a>bah*, berarti yang paling berhak di antara mereka (para *as\}a>bah*) adalah yang paling dekat kepada pewaris dari segi dekat dan kuatnya kekerabatan. Kedekatan derajat kekerabatan yang ditetapkan berdasarkan keturunan laki-laki yang lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris. Maz\hab ini merupakan pendapat 'Ali< bin Abi< Tha>lib r.a. dan diikuti oleh para ulama maz\hab Hana<fi.

Di samping itu, maz\hab ketiga ini telah mengelompokkan dan membagi *z\awi>l arh\}a>m* menjadi empat golongan, kemudian menjadikan masing-masing golongan mempunyai cabang dan keadaannya. Lebih jauh akan dijelaskan hak masing-masing golongan dan cabang tersebut akan hak warisnya. Keempat golongan tersebut adalah:

1. Orang-orang (ahli waris) yang bernisbat kepada pewaris.
2. Orang-orang yang dinisbati kekerabatan oleh pewaris.
3. Orang-orang yang bernisbat kepada kedua orang tua pewaris.

---

<sup>11</sup> Muhammad 'Ali< as-S{a>bu>ni<, *al-Mawa>ri<s\fi<...*, *Op. Cit*, hlm.184-187

4. Orang-orang yang bernisbat kepada kedua kakek pewaris atau kedua nenek pewaris.

Yang bernisbat kepada pewaris sebagai berikut:

- a. Cucu laki-laki keturunan anak perempuan, dan seterusnya, baik laki-laki ataupun perempuan.
- b. Buyut laki-laki dari keturunan cucu perempuan dan keturunan anak laki-laki, dan seterusnya, baik laki-laki ataupun perempuan.

Yang dinisbati oleh pewaris:

- a. Kakek yang bukan sah, dan seterusnya seperti ayah dari ibu, ayah dari ayahnya ibu (kakek dari ibu).
- b. Nenek yang bukan sah, dan seterusnya seperti ibu dari ayahnya ibu, ibu dari ibu ayahnya ibu.

Yang bernisbat kepada kedua orang tua pewaris:

- a. Keturunan saudara kandung perempuan, atau yang seayah, atau yang seibu, baik keturunan laki-laki ataupun perempuan.
- b. Keturunan perempuan dari saudara kandung laki-laki, atau seayah, seibu, dan seterusnya.
- c. Keturunan dari saudara laki-laki seibu dan seterusnya.

Yang bernisbat kepada kedua kakek atau nenek dari pihak ayah ataupun ibu:

- a. Bibi (saudara perempuan ayah) pewaris, baik bibi kandung, seayah, atau seibu. Kemudian paman (saudara laki-laki ibu) pewaris, dan bibi (saudara perempuan ibu), dan paman (saudara ayah) ibu.

- b. Keturunan dari bibi (saudara perempuan ayah), keturunan dari pamannya (saudara laki-laki ibu), keturunan bibinya (saudara perempuan ibu), keturunan paman (saudara laki-laki ayah) yang seibu, dan seterusnya.
- c. Bibi dari ayah pewaris, baik yang kandung, seayah, ataupun seibu. Juga semua pamannya dan bibinya (paman dan bibi dari ayah). Juga pamannya (saudara ayah) yang seibu (mencakup semua paman dan bibi dari ibu, baik yang kandung maupun yang seayah).
- d. Seluruh keturunan kelompok yang saya sebutkan itu dan seterusnya, misalnya keturunan laki-laki dan perempuan dari bibi sang ayah.
- e. Paman kakak yang seibu, dan juga paman nenek. Kemudian paman dan bibi baik dari ayah maupun ibu dari kakek dan nenek.
- f. Seluruh keturunan kelompok yang saya sebutkan di atas (Butir e) dan seterusnya.

Itulah keenam kelompok yang bemisbat kepada kedua kakek dan kedua nenek pewaris.

Dari uraian-uraian sebelumnya, ternyata kita menemukan beberapa perbedaan yang jelas antara maz\hab *Ahl at-Tanzi>l* dengan *Ahl al-Qara>bah*:

1. *Ahl at-Tanzi>l* tidak menyusun secara berurutan kelompok per kelompok, dan tidak pula mendahulukan antara satu dari yang lain. Sedangkan *Ahl al-Qara>bah* menyusun secara berurutan dan mendahulukan satu dari yang lain sebagai analogi dari *as}a>bah bi nafsih*.
2. Dasar yang dianggap oleh *Ahl at-Tanzi>l* dalam mendahulukan satu dari yang lain adalah "dekatnya keturunan" dengan sang ahli waris *as}h}a>bul furu>d}* atau *as}a>bah*. Sedangkan oleh *Ahl al-Qara>bah* yang dijadikan anggapan

ialah "dekatnya dengan kekerabatan", dan bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian kaum wanita sebagaimana yang berlaku pula dalam kalangan *Ahl al-as}a>bah*.<sup>12</sup>

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa *Ahl al-Qara>bah* ini mengelompokkan *z\awi>l arh}a>m* dalam beberapa golongan dan memberikan urutan dalam pembagian hak waris dengan mengqiyas pada jalur *as}a>bah*. Dengan demikian, menurut *Ahl al-Qara>bah*, yang pertama kali berhak menerima waris adalah keturunan pewaris (anak, cucu, dan seterusnya). Bila mereka tidak ada, maka pokoknya: ayah, kakek, dan seterusnya. Jika tidak ada juga, maka barulah keturunan saudara laki-laki (keponakan). Bila mereka tidak ada, maka barulah keturunan paman (dari pihak ayah dan ibu). Jika tidak ada, maka barulah keturunan mereka yang sederajat dengan mereka, seperti anak perempuan dari paman kandung atau seayah. Dengan demikian, berdasarkan urutan tersebut dapat disimpulkan bahwa kelompok ahli waris yang lebih awal disebutkan dapat menggugurkan kelompok berikutnya.<sup>13</sup>

Ahli waris yang mempunyai hubungan famili dengan pewaris, tetapi tidak termasuk golongan ahli waris *z\awi< al-furu>d* dan *as}a>bah* disebut *z\awi< al-arh}a>m*.

### C. Faktor Yang Mendasari Hak Waris bagi Ahli Waris Pengganti dan *Z\awi> al-arh}a>m* .

#### 1. Faktor Yuridis

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.187-190

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.190-191

Penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai gugatan terhadap kawarisan  $z\backslash awi < al-furu > d$  dan  $as\backslash a > bah$  yang bagian mereka telah diatur oleh nash khusus, namun lebih kepada menjelaskan kewarisan  $z\backslash awi < al-arh\backslash a > m$  dalam fiqh mawaris, yang di dalam Kompilasi Hukum Islam dikembangkan menjadi konsep ahli waris pengganti. Hal ini dikarenakan; *pertama*, masih terdapat perbedaan pendapat tentang kewarisan  $z\backslash awi < al-arh\backslash a > m$  dan atau ahli waris pengganti di kalangan ulama. *Kedua*,  $z\backslash awi < al-arh\backslash a > m$  dianggap sebagai ahli waris alternatif setelah bagian  $z\backslash awi < al-furu > d$  dan *ashabah* diberikan, padahal mereka masih terhitung keluarga pewaris. Artinya, kewarisan  $z\backslash awi < al-arh\backslash a > m$  terhalang disebabkan antara lain misalnya; cucu terhalang mendapatkan warisan (bagian orangtuanya) karena orang tua mereka lebih dahulu meninggal dari kakek atau neneknya, sementara saudara orang tuanya masih hidup<sup>14</sup>. *Ketiga*, Ahli waris pengganti yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam dianggap oleh sebagian kalangan sebagai bukan bagian dari ijtihad dalam fiqh mawaris, sehingga mereka tidak mau menerapkannya dalam pembagian harta warisan. Untuk itu, tulisan ini akan menguatkan kewarisan  $z\backslash awi < al-arh\backslash a > m$  dan ahli waris pengganti dengan beberapa argumentasi, antara lain sebagai berikut;

#### a. Nash Umum dan Nash Khusus

Beberapa ayat Al Qur'an yang mengatur pembagian harta warisan terdapat di beberapa ayat pada Surat An-Nisa>' dan satu ayat dari Surat al-

---

<sup>14</sup> Kewarisan  $z\backslash awi < al-arh\backslash a > m$  terhalang karena adanya prinsip *al-hajb bi asy-syakhshi* yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. Dalam hal ini, kewarisan  $z\backslash awi < al-arh\backslash a > m$  dapat terhalang oleh *hajb hirman* yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Misalnya, terhalangnya hak waris seorang kakek karena adanya ayah, terhalangnya hak waris cucu karena adanya anak, terhalangnya hak waris saudara seayah karena adanya saudara kandung, terhalangnya hak waris seorang nenek karena adanya ibu, dan seterusnya.



Anfa>I. Pada Surat An-Nisa>' ditegaskan mengenai kuatnya hubungan kekerabatan karena adanya pertalian darah. Sedangkan pada Surat al-Anfa>I ditegaskan mengenai hak kerabat karena pertalian darah, sebagian lebih diutamakan daripada sebagian yang lain. Dari ketentuan Surat al-Anfa>I dapat dikatakan pula bahwa kerabat karena hubungan pertalian darah yang paling dekat dengan pewaris lebih berhak atas harta warisan dari pada kerabat yang lebih jauh hubungan kekerabatannya

Keberadaan  $z\backslash awi< al-arh\}a>m$  berdasarkan dari firman Allah SWT surat al-Anfa>I: 75 dan an-Nisa>' : 7.

15                                                          

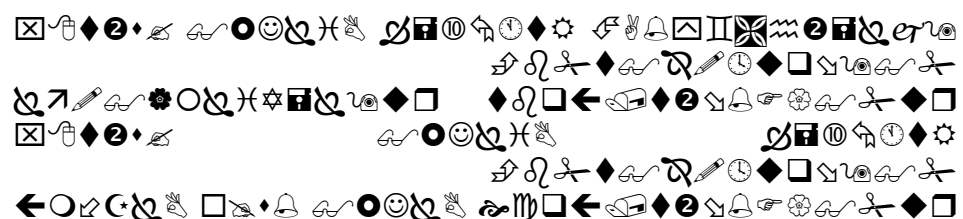
                                                          

Seseorang tidak hanya mewarisi harta dari orang tuanya, tetapi juga dari kerabatnya. Mafhumnya, seorang kerabat mewarisi harta dari kerabat lainnya yang meninggal dunia. Namun hak mereka tidak dijelaskan secara khusus oleh nash seperti *z\awi< al-furu>d* dan *ashabah*. Dalam hal ini, perlu dikemukakan beberapa hal, antara lain; *pertama*, Kerabat berhak mendapatkan warisan selama mereka tidak terhijab oleh *z\awi< al-furu>d* dan *ashabah*. Misalnya, seorang cucu terhalang mendapatkan warisan kakeknya selama orang tua mereka masih hidup. *Kedua*, tidak ada halangan bagi kerabat untuk mendapatkan warisan ketika bagian *z\awi< al-furu>d* dan *ashabah* telah diberikan, sementara harta warisan masih tersisa.

Persoalannya sedikit berbeda bila seseorang yang seharusnya menempati posisi *z\awi< al-furu>d* lebih dahulu meninggal. Dalam kasus di atas, seorang anak lebih dahulu meninggal dari ayahnya, sedangkan sang anak juga telah mendapatkan anak dalam perkawinannya (cucu). Apakah sang cucu terhijab karena orang tuanya ?, atau juga terhijab oleh paman atau bibinya?.

Kewarisan cucu terhalang oleh orang tuanya merupakan prinsip yang *qath'i*, disebabkan bagian orang tuanya tersebut pada akhirnya juga mereka dapatkan baik dalam bentuk nafkah maupun warisan bila orang tuanya meninggal kelak. Dalam hal ini, terdapat prinsip bahwa dalam harta seorang ayah, terdapat hak anak.



[illegible]

Permasalahannya, apakah terhibanya cucu oleh anak dapat dijadikan *takhsis* dari nash di atas sehingga cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari kakeknya terhalang mewarisi bagian orang tuanya dikarenakan adanya anak lainnya?. Penulis tidak melihat hal ini sebagai *takhsis*. Bila kedua prinsip tersebut dipadukan, maka dapat disimpulkan bahwa cucu terhalang mendapatkan warisan karena masih ada orang tuanya, tidak terhalang oleh paman atau bibinya. Ketika orangtuanya meninggal dunia lebih dahulu dari kakeknya, maka mereka mendapatkan bagian orang tuanya dengan ketentuan

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 122-123

bagian yang mereka peroleh sama dengan bagian orang tuanya. Mereka disebut sebagai ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Muhammad ‘Abdurrahim al-Kisyka dalam kitabnya *al-Muh}a>d>}arat fil Mi>ra>s\il Muqaran*, bahwa pendapat yang terkuat di antara dua pendapat tersebut adalah pendapat jumhur yang menetapkan adanya hak pusaka bagi z\awi< al-arh}a>m. Karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh jumhur berlandaskan dengan keumuman al-Qur’an dengan dikuatkan oleh as-Sunnah dan amaliyah para *Khulafa> ur-Ra>syidi>n*. Beliau membantah argumentasi yang dikemukakan oleh para *fuqaha’* yang meniadakan pusaka z\awi< al-arh}a>m.<sup>19</sup>

Sebagian fuqaha’ memandang bahwa untuk menjaga kemaslahatan cucu tersebut diberikan kepada wasiat wajibah. Namun posisi wasiat wajibah dalam hukum Islam tidaklah kuat, sebab ia boleh tidak dilaksanakan. Sedangkan menjaga kemaslahatan keluarga merupakan kewajiban syar’i. Dalam hal ini, ketetapan terhibabnya cucu karena adanya paman dan bibi dapat dikatakan kurang dapat menjaga tujuan syar’i. Kembali ke nash umum, bahwa anak mendapatkan warisan peninggalan orang tuanya, jauh lebih kuat untuk menjaga kemaslahatan keluarga.

Ketetapan Kompilasi Hukum Islam tentang hak anak menggantikan posisi waris orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dapat menjaga kemaslahatan tersebut. Menjaga kemaslahatan keluarga dan karib kerabat

---

<sup>19</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Mawaris*, (Bandung: PT. Alma’arif, 1994), hlm. 355

merupakan spirit dari hukum keluarga dalam Islam. Banyak Nash yang menjelaskan tentang hal ini, antara lain;

◊◻◻☺↔○↻①↻🌀🌀✂      ◆③⚙➤◻○      ✂•①🌀①◆◻  
 📄⑦◻📁↻②➔①↻🌀🌀✂      ☎✂◻↻📄◻↑📖  
 ⬅×✓🕒🕒⚙○◻☺↻🌀🌀✂◆◻ 📄⑦◻☺🕒◆♠◆⑩↻🌀🌀✂◆◻  
 ☎✂◻↻📄◻➔🔔◆◻ ⬅○🕒⚙🌀✂🌀 ➔📄➔🔔📄🌀🌀◻◻  
     🌀🌀✂🌀⚙=◻↻②➔◻🌀🕒➔📄◻🔔↔📄◻

*"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik". (QS. an-Nisa>'; 8)<sup>20</sup>*

[illegible]

*"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar". (QS. an-Nisa>': 9)<sup>21</sup>*

b. Ahli Waris Pengganti dalam KHI adalah lima' ulama Indonesia

Penggantian kedudukan mewaris menurut hukum waris Islam yang diterapkan di Indonesia (KHI) merupakan suatu hal yang baru dan merupakan hasil *ijtihad* para ulama terhadap ketentuan waris dalam Al Qur'an dan Hadis. Dalam Ushul Fiqh dikenal sebagai *lima'*<sup>22</sup>.

<sup>20</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op.Cit. hlm.116

21 *Ibid.* hlm.116

<sup>22</sup> Secara bahasa, *ijma'* (*al-ijma'*) berarti *al-azm* (berketetapan hati untuk melakukan sesuatu) dan *al-tashmim* (berketetapan hati untuk mengambil keputusan), secara istilah, definisi *ijma'* yang paling umum adalah: "Kesepakatan para mujtahid pada suatu masa sepeninggal Nabi Saw tentang sesuatu hukum syari" mengenai suatu peristiwa tertentu. Abdul Wahab Khalaf. Op. Cit. hlm. 45.

Dalam sejarah hukum waris Islam sendiri sebelumnya, belum pernah dikenal adanya penggantian kedudukan dalam mewaris (Ahli Waris Pengganti), dan *Ahl as-Sunnah* pun tidak pernah membicarakan perihal penggantian kedudukan dalam mewaris. Semua itu dilakukan dengan tujuan agar cucu dapat menikmati harta warisan kakeknya apabila ayahnya telah meninggal dunia lebih dahulu.

KHI merupakan hasil konsensus (*ijma'*) ulama Indonesia dan berbagai golongan dari lapisan elemen masyarakat yang telah mendapat legitimasi dari kekuasaan Negara melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, yang telah di instruksikan kepada Menteri Agama agar disebarluaskan dan digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. KHI merupakan hukum materil dari salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia yang isinya diambil dari berbagai sumber berupa 13 kitab *fiqh*<sup>23</sup> dari

---

Konsensus (*ijma'*) dianggap sebagai sumber ketiga setelah al-Qur'an dan Sunnah, *ijma'* merepresentasikan otoritas terakhir yang menyetujui dan menjamin kebenaran dari peraturan-peraturan hukum positif dan prinsip-prinsip metodologis yang disepakati secara umum oleh ulama-ulama Sunni. Wael B Hallaq, *A History...*, Op.Cit. hlm. 110.

*Ijma'* sebagai salah satu dalil di antara dalil-dalil syara' yang lain ditunjukkan oleh berbagai alasan, di antaranya firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Lafaz *al-amri* pada ayat ini mengandung dua pengertian, yakni *al-amri* yang berhubungan dengan agama dan yang berhubungan dengan dunia. *Ulil amri* yang bersifat agama adalah para mujtahid dan ahli fatwa, *Ulil amri* yang bersifat duniawi adalah para kepala negara. Apabila telah sepakat ulil Amri atau para mujtahid tentang suatu hukum wajib mengikuti dan melaksanakannya. Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (PT.Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 80-81

<sup>23</sup> Kesemua kitab-kitab *fiqh* tersebut sebelumnya telah menjadi bahan rujukan para hakim Agama dengan dikeluarkannya Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958. Diantara kitab-kitab itu adalah *al-Ba>ju>ri<*, *Fath} al-Mu'in*, *Syarqawi< 'ala> Tah}ri<r*, *Qalyu>bi</Mahalli<*, *Fath} al-Wa>hab wa Syarh}ju>hu*, *Tuh}fah*, *Targhi<b al-Musytaq*, *Qawa>ni<n asy-Syari<'ah li Sayyid Usman ibn Yahya*, *Qawa>ni<n asy-Syari<'ah li Sayyid Sada>qah Dahlan*, *Syamsuri< fi< al-Fara>'id*, *Bughyah al-Musytarsyidi<n*, *al-Fiqh 'ala> Maz}a>hib al-Arba'ah*, dan *Mughni al-Muh}ta>j*. Ketika dalam perumusan KHI, ke-13 kitab *fiqh* tersebut ditambah, kurang lebih kesemuanya 38 kitab dari berbagai maz'hab, sebagai bahan pertimbangan yang nantinya akan dilokakaryakan dengan berbagai elemen masyarakat. Lihat Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Akademik Pressindo, 2007), hlm. 22.

berbagai maz\hab, kitab-kitab yurisprudensi, wawancara dengan berbagai ulama dan melakukan studi komparatif ke negara-negara Islam lainnya.

Secara formil KHI yang lahir atas dasar tujuan mulia pejabat-pejabat pada Mahkamah Agung RI dan Departemen Agama RI (sekarang Kementerian Agama RI) serta Tokoh Ulama terkemuka di Indonesia tersebut, yaitu guna keseragaman rujukan hakim-hakim pada peradilan agama dan telah diberi landasan pemberlakuan dan penyebarluasannya dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 diakui sebagai karya agung dan luhur. Dalam konsideran menimbang antara lain dinyatakan bahwa Alim Ulama Indonesia dalam loka karya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988 telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam.

Adapun konsep mengenai penggantian kedudukan dalam mewaris menurut hukum waris Islam yang diterapkan di Indonesia merupakan suatu hal yang baru dan merupakan hasil *ijtiha>d* para ulama terhadap ketentuan waris dalam Al Qur'an dan Hadis. Dalam sejarah hukum waris Islam sendiri sebelumnya, belum pernah dikenal adanya penggantian kedudukan dalam mewaris, dan *Ahl as-Sunnah* pun tidak pernah membicarakan perihal penggantian kedudukan dalam mewaris. Semua itu dilakukan dengan tujuan agar cucu dapat menikmati harta warisan kakeknya apabila ayahnya telah meninggal dunia lebih dahulu. Akan tetapi ketentuan tersebut masih berbentuk Instruksi Presiden dan bukan berbentuk undang-undang.

Dalam pembentukan kitab undang-undang manapun secara resmi biasanya melalui suatu prosedur yang bersifat khusus dan selalu mengacu

dalam bentuk formal yang sudah tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Hal ini menunjukkan perbedaan dengan kompilasi yang mempunyai makna hampir sama, namun mencakup bahan hukum yang beraneka macam dan tidak dibuat dengan maksud mengacu pada satu bentuk tertentu dari produk hukum, misalnya seperti di Indonesia ia dapat berbentuk Undang-undang. Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden bahkan juga dapat dibuat secara tidak resmi dalam artian tidak ditetapkan oleh pemerintah.<sup>24</sup>

Penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam Pengadilan Agama maupun dalam perundang-undangan menurut Rachmat Djatnika mengandung masalah ijtihad yang diselesaikan dengan *ijtiha>d* (ulama Indonesia) dengan menggunakan metode-metode *al-isti<sla>h*, *al-isti<hsa>n*, *al-‘urf*, dan metode-metode *isti<dla>l* lainnya dengan tujuan *jalbal mas}a>lih wa dar’u al-mafa>sid*. Kalau ada yang tidak sependapat dengan hasil *ijtiha>d* tersebut sedangkan hakim memutuskan dengan ketentuan yang tersebut dalam perundang-undangan, maka *ijtiha>d* hakim tidak dapat dibatalkan dengan *ijtiha>d* yang lain (*al-ijtiha>d la>yuns}had}u bil ijtihad>d*).<sup>25</sup>

c. Kewarisan *Z\awi> al-arh}a>m* Menurut Mazhab Shahabi

*Z\awi< al-arh}a>m* (kerabat) berhak mendapat waris, bila tidak ada *as}h}a>b al-furu>d*, ataupun *as}a>bah* yang menerima harta pewaris. *Z\awi< al-arh}a>m* adalah lebih berhak untuk menerima harta waris dibandingkan lainnya, sebab mereka memiliki kekerabatan dengan pewaris.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>25</sup> Rahmad Djatnika, *Sosialisasi Hukum Islam di Indonesia*, dalam Abdurrahman Wahid, ed. al, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), hlm. 254.



Karena itu mereka lebih diutamakan untuk menerima harta tersebut daripada *bait al-ma>l*. Pendapat ini merupakan jumhur sahabat<sup>26</sup>, di antaranya ‘Umar bin Khatha>b, Ibnu Mas'u>d,<sup>27</sup> (dalam salah satu riwayatnya yang termasyur), Syuraih al-Qa>d}i, Ibnu Sirrin, ‘Atha, Muja>hid<sup>28</sup> dan sahabat lainnya seperti: ‘Ali< bin Abi< Tho>lib. Abu> Bakar, dan ‘Us\man,<sup>29</sup>

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kewarisan *z\awi< al-arh}a>m* merupakan pendapat jumhur sahabat dan lebih rajih (kuat dan akurat), karena memang merupakan pendapat mayoritas sahabat, dan juga diikuti oleh *ta>bi'i>n*, dan *Ima>m mujtahidi>n*. Di samping dalil

---

<sup>26</sup> Sebagian ulama menyebutnya dengan *qaul shahabi* atau *mazhab shahabi*. Setelah Rasulullah Saw. wafat, tampillah para sahabat yang telah memiliki ilmu yang dalam dan mengenal *fiqh* untuk memberi fatwa kepada umat Islam dan membentuk hukum. Hal itu karena merekalah yang paling lama bergaul dengan Rasul Saw. dan telah memahami al-Qur'an dan hukum-hukumnya. Dari mereka pulalah keluar fatwa mengenai peristiwa yang bermacam-macam. Para mufti dari kalangan *tabi'in* dan *tabi'it tabi'in* telah memperhatikan periwayatan dan pentakwilan fatwa-fatwa mereka. Di antara mereka ada yang mengkodifikasikannya bersama Sunnah Rasul, sehingga fatwa-fatwa mereka dianggap sumber-sumber pembentukan hukum yang disamakan dengan *nash*. Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet ke-3 (Bandung: Pustaka Setia, 2007). hlm. 141, lihat juga, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. (Semarang: Toha Putra Group, 1994) hlm. 134

Para ulama sepakat bahwa perkataan sahabat yang bukan berdasarkan berdasarkan pikiran mereka semata adalah *hujjah* (dasar hukum) bagi kaum muslimin, karena apa yang dikatakan oleh para sahabat itu tentu saja berasal dari apa yang telah didengar dari Rasul. Persoalan yang menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan para ulama adalah pendapat para sahabat yang berdasarkan *ijtihad* semata, apakah menjadi *hujjah* bagi generasi sesudahnya?

Ulama Hanafiyah, Imam Malik, *qaul qadim* Imam al-Syafi'i dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad ibn Hanbal, menyatakan bahwa pendapat sahabat itu menjadi *hujjah* dan apabila pendapat para sahabat bertentangan dengan *qiyas* (analogi) maka pendapat sahabat didahulukan. Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan bahwa apa yang dilakukan dan dikatakan sahabat sangatlah mungkin berasal dari Rasulullah Saw. dan didasarkan kepada petunjuk Rasulullah Saw. Disisi lain, apabila orang awam dibolehkan mengikuti pendapat para Mujtahid, maka mengikuti pendapat para sahabat tentu akan lebih boleh lagi. Lebih lengkap lihat Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh...Loc. Cit.* hlm. 114

<sup>27</sup> Muhammad ‘Ali< as-S{a>bu>ni<, *al-Mawa>ri<s\fi<...*, *Op. Cit.* hlm. 178

<sup>28</sup> Muhammad Yu>suf Mu>sa, *Al-Tirkah wa...*, *Op.cit.*, hlm. 278. Lihat Komite Fakultas Syari'ah Universitas Mesir, *Ah}ka>m al-Mawa>ris fi<\ al-fiqih al-Isla>mi> (Hukum Waris\)*, penerjemah Addys Aldizal dan Fathurrahman, (Jakarta: Senayan Abadi Fublising, 2004), hlm. 343

<sup>29</sup> Sayi>d Sa>biq, *Fiqh al-Sunnah Juz III*, (Beirut : Da>r el-Fikr, 2008M 1429H), hlm. 1017 Lihat Muhammad ‘Ali hami>d as-S{a>bu>ni, (penerjemah Abdulhamid Zahwa), *Hukum Waris*, (Jakarta: Pusta Mantiq, 1994) hlm. 145. Lihat M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 164

yang mereka kemukakan lebih kuat dan akurat, juga tampak lebih adil apalagi jika dihubungkan dengan kondisi kehidupan dewasa ini.

d. Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan  $Z\backslash awi < al-arh\}a > m$  Menurut 'Urf

Merupakan 'urf<sup>30</sup> di Indoensia bahwa tidak dibedakan antara kerabat laki-laki dan perempuan, demikian juga cucu dari anak laki dan anak perempuan. Pembedaanya dalam konsep kewarisan  $z\backslash awi < al-arh\}a > m$  akan mendatangkan mafsadat dengan putusnya kekerabatan dan timbulnya rasa ketidakadilan. Untuk itulah KHI menganut prinsip bilateral. Prinsip bilateral disamping tidak bertentangan nash-nash yang, juga merupakan 'urf Indonesia yang patut dijaga, terutama dalam penetapan hukum<sup>31</sup>.

Di Indonesia, pembagian warisan selain menggunakan hukum kewarisan Islam (*faraid*), juga menggunakan hukum perdata dan hukum adat, bahkan berdasarkan tradisi yang melekat dengan masyarakat. Pembagian warisan lebih ditekankan dengan pendekatan kekeluargaan, yaitu dibagi secara merata. Ketetapan KHI tentang kewarisan Ahli Waris Pengganti di antaranya merupakan upaya mengakomodir tradisi masyarakat Indonesia tersebut.

e. Kemaslahataan Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan  $Z\backslash awi < al-arh\}a > m$

*Mas\lah\ah* (مصلحة) berasal dari kata *s\alah\}a* (صالح) dengan penambahan "alif" diawalnya yang secara arti kata berarti "baik" lawan dari kata "buruk" atau "rusak". Ia adalah mashdar dengan arti kata *s\ala>h\}* (صلاح), yaitu

<sup>30</sup> Kata 'urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminology, seperti dikemukakan 'Abdul Karim Zaidan istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 153.

<sup>31</sup> Bahkan menurut Munawir Sazali, pembagian warisan secara merata merupakan 'urf Indonesia.

“manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”. Pengertian *mas\lah\ah* dalam bahasa Arab berarti “Perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”.<sup>32</sup>

Adapun dalil logikanya seperti berikut: sesungguhnya para kerabat jauh lebih berhak untuk menerima harta warisan daripada *bait al-ma>l*. Alasannya, karena ikatan antara *bait al-ma>l* dan pewaris hanya dari satu arah, yaitu ikatan Islam karena pewaris seorang muslim. Berbeda halnya dengan seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris, dalam hal ini ia mempunyai dua ikatan: ikatan Islam dan ikatan rahim. Oleh sebab itu, ikatan dari dua arah sudah barang tentu akan lebih kuat dibandingkan ikatan satu arah.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kewarisan *z\awi< al-arh\ja>m* merupakan pendapat jumhur sahabat dan lebih rajih (kuat dan akurat), karena memang merupakan pendapat mayoritas sahabat, *ta>bi'i>n*, dan *Ima>m mujtahidi>n*. Di samping dalil yang mereka kemukakan lebih kuat dan akurat, juga tampak lebih adil apalagi jika dihubungkan dengan kondisi kehidupan dewasa ini.

Sebagai contoh, kelompok yang berpendapat lebih mengutamakan *bait al-ma>l* ketimbang kerabat, di sisi lain mereka mensyaratkan keberadaan *bait al-ma>l* dengan persyaratan khusus. Di antaranya, *bait al-ma>l* harus terjamin pengelolaannya, adil, dan amanah; adil dalam memberi kepada setiap yang berhak, dan tepat guna dalam menyalurkan harta *bait al-ma>l*.<sup>33</sup> Melihat kenyataan demikian, para ulama dari maz\hab Ma>liki dan maz\hab Sya>fi'i

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Op. Cit, hlm. 354.

<sup>33</sup> Muhammad 'Ali< as-S{a>bu>ni<, *al-Mawa>ri<s\fi<...*, Op. Cit, hlm. 179-182

mutakhir memberikan fatwa dengan mendahulukan para kerabat ketimbang *bait al-ma>l*, khususnya setelah abad ketiga Hijriah, ketika pengelolaan *bait al-ma>l* tidak lagi teratur sehingga terjadi penyalahgunaan. Perlu dikemukakan di sini, bahwa pada perkembangan selanjutnya, karena kurang berfungsinya *bait al-ma>l*, para pengikut Ima>m Sya>fi'i memberikan hak waris kepada *z\awi< al-arh}a>m*. Hal ini sebagaimana dikemukakan Husnain Muhammad Makhlu>f:

إِنَّ أَصْحَابَ الشَّافِعِيِّ يَفْتُونَ الْيَوْمَ بِتَوْرِيثِهِمْ لِفَسَادِ بَيْتِ الْمَالِ

“Sesungguhnya para pengikut *al-Sya>fi'i*, pada masa kini, memberikan fatwa untuk memberikan hak waris kepada mereka (*z\awi< al-arh}a>m* pen) karena rusaknya *bait al-ma>l*”.<sup>34</sup>

Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa kedua kelompok ulama tersebut pada akhirnya bersepakat untuk lebih mengutamakan pemberian harta waris kepada *z\awi< al-arh}a>m* ketimbang *bait al-ma>l*. Hal ini dapat terlihat tentunya dengan melihat dan mempertimbangkan kemaslahatan yang ada, dari mulai akhir abad ketiga Hijriah hingga masa kita dewasa ini.<sup>35</sup>

Apabila *z\awi< al-arh}a>m* (baik laki-laki maupun perempuan) seorang diri menjadi ahli waris, maka ia akan menerima seluruh harta waris. Sedangkan jika dia berbarengan dengan salah satu dari suami atau istri, maka ia akan menerima sisanya.

Sehubungan dengan keadaan pewaris bila meninggal tanpa meninggalkan anak, maka kewajiban hukum adalah melindungi hak milik

<sup>34</sup> H{usnain Muhammad Makhlu>f, *Al-Mawa>ris\fi< al...*, *Op.Cit*, hlm. 132.

<sup>35</sup> Muhammad ‘Ali< as-S{a>bu>ni<, *al-Mawa>ris\fi< al...*, *Op. Cit*, hlm. 183

tersebut, dan di dalam Ilmu Fiqh termasuk langkah *ri'a>yatul maslah}ah* (pengurusan demi manfaat dan kebaikan).<sup>36</sup> Kaidah *fiqhiyyah* sebagai kerangka praktis untuk mencapai kemaslahatan adalah sebagai berikut :

37

Dan dalam fiqh ada kaedah yang mengatakan bahwa “Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan”. Keadaan masyarakat itu sendiri selalu berkembang karena menggunakan metode-metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

Dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam, kemaslahatan menjadi pertimbangan yang amat diperhatikan, terutama mengenai hal-hal yang termasuk kategori ijtihadi. Dengan begitu selain akan dapat memelihara dan menampung aspirasi hukum serta keadilan masyarakat, Kompilasi juga akan mampu berperan sebagai perekayasa masyarakat Muslim Indonesia.<sup>38</sup>

Hukum waris Islam di Indonesia baru mengenal adanya penggantian tempat baru setelah dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Hal tersebut dapat dipahami karena di dalam Al Qur'an sendiri tidak secara tegas mengatur mengenai ketentuan ahli waris pengganti. Dengan sifat keumumannya, Al Qur'an bisa mengimbangi setiap kepentingan, keadaan dan memberikan ketentuan hukum terhadap semua peristiwa dengan cara yang tidak keluar dari dasar-dasar syari'at dan tujuan-tujuannya.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Achmad kuzari, *Sistem Ashabah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 173

<sup>37</sup> Ahmad Nazawi, *al-Qawa>'id al-Fiqhiyyah*, cet. ke-1 (Damaskus: Da>r al-Qala>m, 1986/1406 H), hlm. 145.

<sup>38</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada 1997) hlm. 297

<sup>39</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 56

Atas dasar itu pula Al Qur'an memberi kesempatan bagi yang memenuhi syarat untuk berijtihad terhadap suatu peristiwa hukum, baik yang sudah ada ketentuan nashnya yang bersifat *z}anny* (samar-samar) maupun yang belum ada *nas}s}nya* sama sekali, sepanjang itu dilakukan semata-mata dengan tujuan kemaslahatan umat. Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Kompilasi Hukum Islam mengenai penggantian kedudukan dalam mewaris bagi umat beragama Islam boleh dilakukan dan tidak menyimpang dari nash selama hal tersebut dilakukan dengan tujuan kemaslahatan umat. Karena didalam ayat Surat An-Nisa>' ayat 8 Allah menyebutkan mengenai kehadiran kerabat, anak yatim dan fakir miskin pada saat pembagian warisan. Dan cucu dalam hal ini bisa dimasukkan ke dalam kerabat pewaris yang berasal dari anak pewaris.

Atau dapat pula dikatakan bahwa dengan diaturnya ketentuan mengenai penggantian kedudukan oleh cucu didalam Pasal 185 KHI merupakan suatu ikhtiar dari umat Islam khususnya para ulama di Indonesia untuk memberi jalan tengah dalam menyelesaikan masalah pembagian warisan dalam keadaan yang khusus, dimana seorang cucu bisa bertindak sebagai ahli waris pengganti, meskipun tidak diatur dalam Al Qur'an, akan tetapi bisa memberikan rasa keadilan dan kemaslahatan bagi umat Islam.

Padahal paham yang dinut sebelum KHI, Hukum Islam (Kitab Fiqih) tidak membenarkan kedudukan ahli waris pengganti dari keturunan anak perempuan, bahkan ahli waris Pengganti dari keturunan anak laki-laki jika diantara Ahli Waris tersebut terdapat anak laki-laki maka cucu dari keturunan anak laki-laki yang meninggal terlebih dahulu dari Pewaris menjadi terlindungi (terhijab). Apa alasan perumus KHI mencantumkan Pasal 185 tersebut ? .

Menurut M.Yahya Harahap,SH<sup>40</sup>, barangkali didasarkan atas berbagai pemikiran, antara lain; bertitik tolak dari alasan Sosial Ekonomi pada satu sisi dikaitkan dengan larangan monopolistik atas harta warisan serta alasan kepatutan dan kemanusiaan pada sisi lain. Bukankah pada umumnya anak yatim yang ditinggal oleh ayah atau ibunya, lebih lemah dan lebih sengsara dibanding saudara ayahnya atau ibunya? Apabila pada saat kakek atau nenek meninggal dunia, saudara ayah atau ibu hidup lebih mapan ekonominya, sedang mereka sebagai anak yatim, hidup terlantar. Pantaskah, layakkah, dan manusiawikah menyingkirkan mereka untuk mewarisi harta kakek/nenek sebagai pengganti ayah atau ibunya? berbudayakah dalam hal seperti itu, saudara-saudara mendiang ayah atau ibunya memonopoli harta warisan kakek/neneknya, meskipun keadaan kehidupan sosial ekonominya sudah kuat dan mapan?.

Berdasarkan pasal 185 ayat (2) KHI, tentang porsi ahli waris Pengganti dinyatakan bahwa “Bagian bagi ahli waris waris Pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.

---

<sup>40</sup> M.Yahya Harahap,SH, *Kedudukan wanita dalam Hukum Kewarisan*, Majalah Mimbar Hukum, No.10, 1995, hlm.999

## 2. Faktor Sosiologis Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan $Z\backslash awi < al-arh\}a > m$ .

### a. Hubungan Kekerabatan Lebih Utama Mendapatkan Warisan

Di dalam Al Qur'an keturunan dari anak pewaris (cucu) tidak ditentukan bagaimana kedudukannya dan berapa besar bagiannya untuk mewarisi harta peninggalan kakeknya. Menurut beberapa ahli fiqh, cucu dikategorikan ke dalam ahli waris  $z\backslash awi < al-arh\}a > m$ , dimana ahli waris  $z\backslash awi < al-arh\}a > m$  tersebut baru bisa mewaris apabila ahli waris  $z\backslash awi < al-Furu > d$  dan  $as\}a > bah$  sudah tidak ada pada saat pewaris meninggal dunia. Jadi, bisa dikatakan bahwa cucu baru bisa mendapatkan warisan apabila tidak ada lagi ahli waris yang berhak atas bagian tertentu maupun ahli waris yang berhak atas sisa dari hasil pembagian warisan.

Adapun Imam Abu Hanifah dan Imam Ah}mad bin H{\ambal, menyatakan bahwa  $z\backslash awi < al-arh\}a > m$  atau para kerabat berhak mendapatkan waris, mereka mendasari pendapatnya itu dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan logika. Dalil Al-Qur'an yang dimaksud ialah:



*"... Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah.*

*Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."* (Q.S. al-Anfa>l: 75)<sup>41</sup>

$Z\backslash awi < al-arh\}a > m$  juga mempunyai kesamaan dan kelebihan dengan umat Islam pada umumnya. Adapun kesamaannya terletak pada ketundukkan

<sup>41</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op.Cit, hlm. 274



kedua belah pihak pada umumnya, dan kelebihananya terletak pada adanya hubungan kekerabatan dengan orang yang meninggal dunia.

Jadi *z\awi< al-arh\}a>m* lebih mempunyai sisi kelebihan dibandingkan dengan *bait al-ma>l*, yang mana *bait al-ma>l* dengan orang yang meninggal dunia hanya mempunyai satu hubungan yaitu agama Islam sedangkan *z\awi< al-arh\}a>m* dengan orang yang meninggal dunia mempunyai dua hubungan yaitu agama islam dan kekerabatan.<sup>42</sup>

Makna yang mendasar dari dalil ini ialah bahwa Allah SWT telah menyatakan atau bahkan menegaskan dalam Kitab-Nya bahwa para kerabat lebih berhak untuk mendapatkan atau menerima hak waris daripada yang lain. Di sini, lafazh *arh\}a>m* yang berarti kerabat adalah umum, termasuk *as\h\}a>b al-furu>d*, para *as\}a>bah*, serta selain keduanya. Pendek kata, makna kata itu mencakup kerabat yang mempunyai hubungan rahim atau lebih umumnya hubungan darah.

Ayat tersebut seolah-olah menyatakan bahwa yang disebut kerabat siapa pun mereka, baik *as\h\}a>b al-furu>d*, para *as\}a>bah*, atau selain dari keduanya merekalah yang lebih berhak untuk menerima hak waris ketimbang yang bukan kerabat. Bila pewaris mempunyai kerabat dan kebetulan ia meninggalkan harta waris, maka berikanlah harta waris itu kepada kerabatnya dan janganlah mendahulukan yang lain. Jadi, atas dasar inilah maka para kerabat pewaris lebih berhak untuk menerima hak waris ketimbang *bait al-ma>l*.

Hal ini juga berdasarkan firman-Nya yang lain:

---

<sup>42</sup> Ibn Rusyd dan Abu> al-Wa>lid Muhammad bin Ahmad, *Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yatul Muqtasid*, (Beirut: Da>rul Fikr, t.t) Juz II, hlm. 254-255

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan  
 bagi wanita ada hak bagian (pula) dan harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya,  
 baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (Q.S. An-Nisa>':  
 7)<sup>43</sup>

Melalui ayat ini Allah SWT menyatakan bahwa kaum laki-laki dan wanita mempunyai hak untuk menerima warisan yang ditinggalkan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak. Seperti yang disepakati oleh jumhur ulama bahwa yang dimaksud dengan  $z\backslash awi < al\text{-}arh\}a > m$  adalah para kerabat. Dengan demikian, mereka ( $z\backslash awi < al\text{-}arh\}a > m$ ) berhak untuk menerima warisan.

Kemudian sebagaimana dinyatakan oleh mayoritas ulama bahwa ayat di atas *me-mansukh* (menghapus) kebiasaan pada awal munculnya Islam, pada masa itu kaum muslimin saling mewarisi disebabkan menolong dan hijrah. Dengan turunnya ayat ini, maka yang dapat saling mewarisi hanyalah antara sesama kerabat ( $z\backslash awi < al\text{-}arh\}a > m$ ). Oleh karena itu, para kerabatlah yang paling berhak untuk menerima harta peninggalan seorang pewaris.

Adapun dalil dari Sunnah Nabawiyah adalah seperti yang diberitakan dalam sebuah riwayat masyhur, dalam riwayat ini dikisahkan; Ketika S|a>bit bin ad-Dah}da>h} meninggal dunia, maka Rasulullah saw. bertanya kepada Qais bin 'A<s}im, "Apakah engkau mengetahui nasab orang ini?" Qais menjawab, "Yang kami ketahui orang itu dikenal sebagai asing nasabnya, dan kami tidak mengetahui

<sup>43</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op.Cit, hlm. 116

kerabatnya, kecuali hanya anak laki-laki dari saudara perempuannya, yaitu Abu>Lubana>h bin ‘Abdul Mundz\ir. Kemudian Rasul pun memberikan harta warisan peninggalan S|a>bit kepada Abu>Lubana>h bin ‘Abdul Mundzir.<sup>44</sup>

Keponakan laki-laki dari anak saudara perempuan tidak lain hanyalah merupakan kerabat, yang bukan dari *as}h}a>b al-furu>d* dan bukan pula termasuk *as}a>bah*. Dengan pemberian Rasulullah saw. akan hak waris kepada *z\awi< al-arh}a>m* menunjukkan dengan tegas dan pasti bahwa para kerabat berhak menerima harta waris bila ternyata pewaris tidak mempunyai *as}h}a>b al-furu>d* yang berhak untuk menerimanya atau para *as}a>bah*.

Sebenarnya, di kalangan ulama maz\hab ini banyak dijumpai perbedaan tentang cara pembagian masing-masing kelompok tadi. Untuk itu bagi yang menghendaki pengetahuan lebih luas dalam masalah ini dapat merujuknya pada kitab-kitab fiqih. Selain itu, pada prinsipnya yang banyak diamalkan adalah pandangan maz\hab *Ahl at-Tanzi>l* sebagai maz\hab Ima>m Ahmad, yang kemudian dianut oleh ulama *muta'akhiri>n* maz\hab Ma>liki dan Sya>fi'i karena dari segi pengamalannya memang lebih mudah.<sup>45</sup>

Untuk lebih jelasnya penulis kutipkan bunyi Pasal 185 KHI, sebagai berikut :  
Ayat (1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut pada

<sup>44</sup> Imam al-Baihaqi. *Al-Sunan al-Kubra*, Juz 6, (Haider Abad: Majlis Dairah al-Ma'arif al-Nizhamiah, 1344 H), hlm. 215. Selengkapnya, hadits tersebut menjelaskan;  
أَبْنَانَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الْأَرْدُسْتَانِي، حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرِ الْعِرَاقِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الدُّخْدَاحِ، وَكَانَ رَجُلًا أَتِيًّا فِي بَنِي أَنْيَفٍ، أَوْ فِي بَنِي عَجْلَانَ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ لَهُ وَارِثٌ؟ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا، فَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ إِلَى ابْنِ أُخْتِهِ، وَهُوَ أَبُو ثُبَابَةَ بْنِ الْمُنْدَرِ.

<sup>45</sup> Muhammad ‘Ali< as-S{a>bu>ni<, *al-Mawa>ri< s\fi<... Op. Cit*, hlm. 191-193

Pasal 173. Ayat (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat yang diganti.

Ketentuan Pasal 185 KHI ayat (1), menjelaskan bahwa seorang cucu dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti untuk menggantikan kedudukan ayah/ibunya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris. Dari kalimat “dapat menggantikan kedudukan” tersebut penulis berpendapat bahwa cucu juga berhak atas bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya apabila masih hidup.

Dari ketentuan tersebut akan menimbulkan permasalahan lain. Permasalahan tersebut adalah pada ketentuan ayat (2) yang menegaskan bahwa bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat yang diganti. Misalnya saja ahli waris yang digantikan adalah laki-laki dan ahli waris yang sederajat dengannya adalah perempuan. Apabila ahli waris laki-laki tersebut meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka menurut ketentuan ayat (1) anaknya berhak menggantikan kedudukannya dan menerima bagian yang seharusnya dia terima yaitu dengan ketentuan 2 : 1.

Seperti diketahui bahwa bagian ahli waris laki-laki adalah 2 kali bagian ahli waris perempuan. Dan dalam hal ini cucu dari anak laki-laki tersebut karena dia bertindak sebagai ahli waris pengganti menggantikan kedudukan orang tuanya (ayahnya), maka dia akan mendapatkan bagian lebih banyak dari bagian bibinya (ahli waris sederajat dengan ayahnya).

b. *Bait al-Ma'at* dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Kesejahteraan Rakyat

Menurut kalangan Syafi'iyah mutakhirin pemberian warisan kepada  $z\backslash awi < al-arh\}a > m$  karena *bait al-ma > l* tidak berfungsi sebagaimana mestinya. *Bait al-ma > l* pada masa Sahabat berfungsi sebagai “Lembaga Penjamin Sosial” bagi kaum muslimin yang membutuhkan, bahkan *ahl al-zimmah* pada masa Umar ibn al-Khattab pun dijamin kesejahteraannya melalui harta *bait al-ma > l*. Artinya, pada saat *bait al-ma > l* menjalankan fungsinya dengan baik,  $z\backslash awi < al-arh\}a > m$  dianggap tidak lebih berhak dari *bait al-ma > l*.

*Takaful al-Ijtima'i* dijalankan oleh pemerintahan Islam melalui *bait al-ma > l*. Untuk menjalankan fungsinya, maka pada masa sahabat, zakat harta harus diserahkan ke *bait al-ma > l*, *kharaj* (pajak) dan *jizyah* dikumpulkan ke *bait al-ma > l*, sebagian hasil rampasan perang juga dikembalikan ke *bait al-ma > l*, termasuk kelebihan harta waris yang telah dibagikan kepada  $z\backslash awi < al-Furu > d$  dan *as\}a > bah*.

Dewasa ini, *bait al-ma > l* tidak berfungsi sebagaimana fungsinya di masa sahabat sebagai penjamin kesejahteraan sosial. Kemiskinan merupakan persoalan yang cukup kompleks untuk diselesaikan. Menafikan kewarisan ahli waris pengganti dan  $z\backslash awi < al-arh\}a > m$  akan menimbulkan persoalan baru, yaitu; semakin melebarnya kesenjangan ekonomi di kalangan ahli waris. Di satu sisi, paman dan bibi sang cucu dan keponakan telah hidup “mapan”, sedangkan di sisi lain, cucu dan keponakan yang telah kehilangan orang tuanya tidak mendapatkan warisan. Padahal, dalam pendekatan ini, Ahli waris pengganti dan  $z\backslash awi < al-Furu > d$  lebih patut menerima warisan.

Penetapan Ahli Waris Pengganti sebagai pelengkap hukum kewarisan *zawl al-arh}a>m* dan penjagaan kemaslahatan mereka sejalan dengan tugas dan fungsi mereka untuk menjaga kemaslahatan umum bagi rakyatnya. Kaidah Fiqhiyah menjelaskan:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Perlakuan pemimpin terhadap rakyat disesuaikan dengan kemaslahatan”<sup>46</sup>.

Selama ketetapan tersebut dibutuhkan untuk menjaga kemaslahatan rakyat, maka langkah pemerintah untuk menegaskan kewarisan Ahli Waris Pengganti adalah sah, dan wajib dipatuhi.

c. Ketetapan pemerintah menyelesaikan perbedaan pendapat

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, K.H. Hasan Basry (Ketua Umum MUI) menyebutkan Kompilasi Hukum Islam ini sebagai keberhasilan besar umat Islam Indonesia pada Pemerintahan Orde Baru ini. Sebab dengan demikian, nantinya umat Islam di Indonesia akan mempunyai pedoman fiqh yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan ini dapat diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran keputusan dalam lembaga-lembaga Peradilan Agama dan sebab-sebab *khilaf* yang disebabkan oleh masalah *fiqh* akan dapat diakhiri.<sup>47</sup> Dari penegasan ini tampak bahwa latar belakang pertama dari diadakannya penyusunan kompilasi adalah karena adanya kesimpangsiuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah-masalah Islam.

<sup>46</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman. *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hlm. 572.

<sup>47</sup> K.H. Hasan Basry, *Perlunya Kompilasi Hukum Islam*, *Mimbar Ulama*, No. 104 Th. X April 1986. hlm. 60

Di antara perbedaan pendapat dalam hukum kewarisan Islam adalah apakah *zawl al-arh* dapat memperoleh warisan dari kerabatnya yang meninggal dunia?. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa seorang anak dapat mewarisi warisan orang tuanya baik laki-laki atau pun perempuan, inilah yang disebut dengan ahli waris pengganti.

Sekalipun dalam hal ini belum terjawab, apakah ayah dari ayah (kakek), ayah dari ibu, ibu dari ayah, ibu dari ibu dan seterusnya dapat mewarisi warisan cucunya yang meninggal, ketika orang tuanya meninggal lebih dahulu dari sang anak (cucu)?. Namun agaknya sebagian persoalan *zawl al-arh* terselesaikan dengan adanya Kompilasi Hukum Islam.

Ketetapan pemerintah dapat dijadikan penyelesai khilafiah yang ada. Kewajiban rakyat mematuhi ketetapan pemerintah demi kemaslahatan yang lebih umum (*mashlahah ammah*). Artinya, khilafiah di sekitar persoalan pembagian warisan bagi *zawl al-arh* perlu diselesaikan secara tegas oleh pemerintah. Bahkan dalam hal ini, pemerintah Indonesia lebih maju selangkah, yaitu dengan menetapkan kewarisan Ahli Waris Pengganti. Kaidah Fiqhiyah menjelaskan;

حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف

“Keputusan hakim dalam ijtihad dapat menghilangkan persengketaan”<sup>48</sup>.

Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan merupakan peraturan pemerintah bagi para hakim dalam menetapkan perkara-perkara mengenai sengketa waris. Perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang

---

<sup>48</sup> Muchlis Usman. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah : Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.191.

pembagian warisan bagi  $z\backslash awi < al-arh\}a > m$  dapat dihilangkan, sebab pembagian hak waris kepada Ahli Waris Pengganti juga berarti penegasan hak waris  $z\backslash awi < al-arh\}a > m$ . Sementara di sisi lain, keluar dari perselisihan merupakan hal terpuji

49.

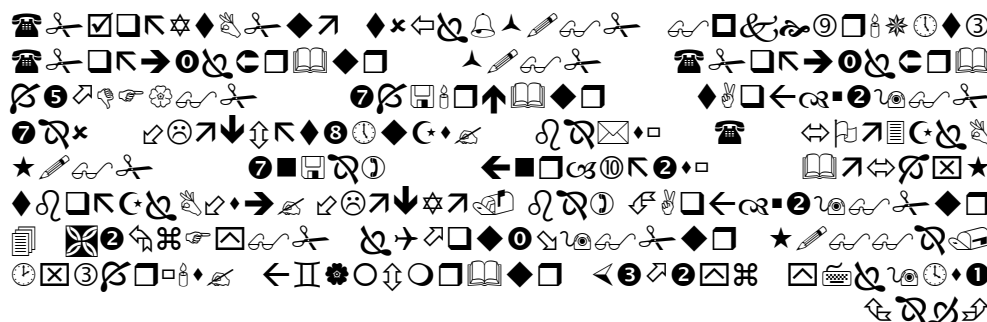
d. Ketetapan Pemerintah adalah hukum.

Dasar hukum Islam adalah berasal dari al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad.

Demikian juga dengan kewarisan, didasarkan pada ketiga hukum tersebut.

Penggunaan ketiga sumber hukum ini didasarkan pada ayat al-Qur'an dan hadis

Nabi. Salah satu ayat yang menyinggung tentang hal ini adalah surat An-nisa : 59



*"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*<sup>50</sup>

Ayat ini memberikan pengertian bahwa orang mukmin diharuskan untuk taat kepada Allah, Rasul, dan Uli al-Amri. Hal ini dapat diberi pengertian bahwa seorang mukmin dalam memecahkan berbagai persoalan harus mendasarkan pada tiga sumber tersebut. Karena itu pengertian taat kepada Allah dimaknakan dengan mentaati apa-apa yang ada dalam al-Qur'an, sedangkan taat kepada Rasul diartikan sebagai taat kepada Sunnah Nabi, dan taat kepada Uli al-Amri diartikan dengan

<sup>49</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman. *Op. Cit*, hlm. 528.

<sup>50</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *Op.Cit*, hlm. 128



mentaati hasil ijtihad ulama.<sup>51</sup> Dalam konteks Indonesia, Kompilasi Hukum Islam adalah hasil ijtihad ulama Indonesia yang dikuatkan dengan peraturan pemerintah.

Dari Ibnu Umar diceritakan, bahwa suatu ketika terjadi dialog antara Rasulullah dengan Mu'adz:

*"Nabi Bertanya: apa yang kamu perbuat jika dihadapanmu ada perkara yang harus diselesaikan?". Jawab mu'adz: "saya akan memutuskan atas dasar kitab Allah (Al-Qur'an)". Nabi bertanya lagi: "jika dalam kitab Allah tidak kamu jumpai?". Saya akan memutuskan dengan sunnah Rasulullah". Nabi bertanya lagi: "jika tidak kamu jumpai dalam sunnah Rasul?". Jawab Mu'adz: "saya akan berijtihad dengan menggunakan akalku, dan aku tidak akan membiarkan perkara tanpa putusan".<sup>52</sup> (HR. Abu Dawud)*

Dari ayat dan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber dari ajaran Islam hanya ada tiga, adapun operasionalnya dapat melihat kepada situasi dan kondisi yang berkembang. Ketiga sumber ajaran Islam tersebut membentuk hubungan sirkular dan saling berdialog untuk kemudian menemukan makna dan pengertian yang terkandung dalam ayat al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan Ijtihad.

<sup>51</sup> Munawir Chalil. *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Hal. 20

<sup>52</sup> Abu Daud. *Op. Cit.*, Juz 3, hlm. 330. Selengkapnya hadits tersebut berbunyi;

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمَصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ « كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ». قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ « فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ». قَالَ فَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. قَالَ « فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ». قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَدْرَهُ وَقَالَ « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ »



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1.  $Z_{\text{awi} < \text{al-Arh}} a > m$  adalah setiap kerabat yang bukan (tidak termasuk)  $as \text{ } h \text{ } a > b \text{ } \text{al-Furu} > d$  dan bukan (tidak termasuk) golongan  $as \text{ } a > bah$ . Ahli Waris  $Z_{\text{awi} < \text{al-Arh}} a > m$  merupakan ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui anggota keluarga dari pihak perempuan, yakni mencakup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal. misalnya cucu dari anak perempuan, anak saudara perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan paman, paman seibu, saudara laki-laki ibu dan saudara perempuan ibu/bibi.
2. Keberadaan ahli waris  $z_{\text{awi} > l \text{ } arh} a > m$  tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam. Upaya untuk menerobos konsep  $z_{\text{awi} < \text{al-arh}} a > m$  ini maka KHI menawarkan satu konsep ahli waris pengganti, dimana kedudukan  $z_{\text{awi} < \text{al-arh}} a > m$  bisa menggantikan orang tuanya, apabila orang tuanya telah terlebih dahulu meninggal dunia dibandingkan si pewaris. Yang terpenting adalah bahwa ahli waris pengganti dan yang digantikan haruslah mempunyai hubungan nasab (pertalian darah) yang sah juga kepada pewarisnya.
3. Kesamaan Ahli Waris Pengganti dengan  $Z_{\text{awi} < \text{al-Arh}} a > m$  terletak pada bahwa keduanya tidak golongan ahli waris  $z_{\text{awi} < \text{al-Furu}} > d$  dan  $as \text{ } a > bah$ . Mereka dianggap sebagai keluarga “jauh” dari pewaris. Namun posisi Ahli Waris Pengganti dengan  $Z_{\text{awi} < \text{al-Arh}} a > m$  lebih dekat kepada pewaris, bila dibandingkan dengan seorang tuan dengan maulanya dan  $bait \text{ } al-ma > l$ . Pada kondisi, pewaris

tidak meninggalkan ahli waris  $z\backslash awi < al-Furu > d$  dan  $as\backslash a > bah$  atau harta yang diwariskan masih bersisa setelah dibagikan kepada ahli waris  $z\backslash awi < al-Furu > d$  dan  $as\backslash a > bah$ , maka posisi ahli waris berikutnya adalah  $z\backslash awi < al-arh\backslash a > m$ , *mawali*, dan *bait al-ma > l*.

4. Perbedaan Ahli Waris Pengganti dengan  $Z\backslash awi < al-Arh\backslash a > m$  adalah; *pertama*, Ahli Waris Pengganti meliputi pihak kerabat dari jalur laki-laki dan perempuan. Sedangkan  $z\backslash awi < al-arh\backslash a > m$  hanya diperuntukkan bagi kerabat dari jalur perempuan, baik itu laki-laki maupun perempuan. *Kedua*, Ahli Waris Pengganti yang ditetapkan oleh KHI menganut prinsip *bilateral*. Sedangkan  $z\backslash awi < al-arh\backslash a > m$  yang ditetapkan oleh Fiqh Mawarits menganut prinsip *patrilineal*. *Ketiga*, kewarisan Ahli waris pengganti dalam KHI bukanlah alternatif bila harta warisan masih tersisa, namun ditetapkan sebagai pengganti bagi ahli waris yang meninggal sebelum pewaris, sedangkan kewarisan  $z\backslash awi < al-arh\backslash a > m$  bisa jadi mendapatkan warisan yang tersisa setelah dibagikan kepada ahli waris  $z\backslash awi < al-Furu > d$  dan  $as\backslash a > bah$ . Berikut dikemukakan daftar persamaan dan perbedaan Ahli Waris Pengganti dengan  $Z\backslash awi < al-Arh\backslash a > m$ ;

## B. Saran

1. Ahli waris  $z\backslash awi > l\ arh\backslash a > m$  atau ahli waris pengganti sudah diformulasikan dalam Kompilasi Hukum Islam namun untuk memperkuat kedudukannya perlu ditingkatkan menjadi sebuah Undang-Undang yaitu Undang-Undang tentang Hukum Kewarisan Nasional.

2. Supaya di masa-masa mendatang dapat dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai hukum kewarisan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia dalam rangka mewujudkan unifikasi Hukum Kewarisan Nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Chalim Muhammad, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Sebagai Pranata Hukum Nasional*, Pesantren, No. 2/vol.VII/1990

Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. ke-2

Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, cet. ke-12 (Kuwait: Daar al-Qalam, 1978/1398)

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), Cet. ke-5

Abdurrahman Wahid, *Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan*, dalam (ed) Tjun Surjaman, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Rosda Karya, 1991)

Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (ttp : Daar al-Fikr al-‘Arabi, t.t.)

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2001)

Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PP. IKAHI, 2008)

Ahmad Nazawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, cet. ke-1 (Damaskus: Daar al-Qalam, 1986/1406 H)

Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, cet ke-4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

-----, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1998)

-----, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2001)

Ahmad Warson munawir Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)

Akhmad Kuzari, *Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)

Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (PT.Raja Grafindo Persada, 2009)

- A. Hamid S. Attanimi, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), Cet. I
- A. Masa'id Ghufuran, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)
- A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Hukum Perdata Belanda*, terjemah M. Isa Arief, (Jakarta: Intermasa, 1979)
- A. Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999)
- A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah(Syariah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an; Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial; dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1994)
- Al-Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertailan Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Imam Mazhab* (Jakarta: INIS, 1998)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2004)
- , *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), Cet. ke-1
- , *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta : Kencana, 2009)
- Amrullah Ahmad, et. Al., *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: PP. IKAHA Jakarta, 1994)
- Bustanul Arifin, *Kompilasi : Fiqh Dalam Bahasa Undang-undang*, Pesantren, No. 2 Vo. II/1985
- , *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- , *Pemahaman Hukum Islam dalam Konteks Perundang-Undangan*, Wahyu, No. 108 Th. VII Mei 1985

Oik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos wacana Ilmu)

-----, *Peradilan Islam Dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997)

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989)

-----, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum, 2004)

Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), Cet. II

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag 1991/1992 , *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Bandung: Humaniora- Anggota Ikapi, 1993)

Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa M. Ahsin, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka, 1994)

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. ke-2 (Bandung: al-Ma'arif, 1994), Cet ke-3

Firdaus Muhammad Arwan, "Silang Pendapat Tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya" dalam *Mimbar Hukum*, No.23 (Jakarta: al Hikmah dan Depag RI, 1995), Vol. IV, No. 2, Desember 2007

Hajar M, "Dimensi Hak Kewarisan Ahli Waris Zul Arham dalam Perspektif Ulama," *Jurnal An-Nida'*, No CXXIV Thn XXII (Agustus-September, 1998)

Husnain Muhammad Makhluf, *Al-Mawaris fi al-Syari'at al-Islamiyyah*, (Kairo : Lajnah al-Bayyan al-Araby, 1958)

Hasbiyallah, *Belajar mudah Ilmu Mawaris*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)

Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1987)

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tinta Mas, 1982)

H{usnain Muhammad Makhluf, *al-Mawa>ri<s\ fi< asy-Syari<'ah al-Isla>miyyah*, cet. ke-4 (ttp: Mat}ba'ah al-Madany, 1976/1396)

Ibnu Rusyd, *Analisa Fiqih Para Mujtahid* (Terjemahan Bidayatul Mujtahid) Juz.III, (Jakarta: Pustaka Imami, 2002)



Ibn Rusyd dan Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut: Darul Fikr, t.t) Juz II,

Ichtiarto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia*, (Jakarta: Ind Hill Co, 1990)

Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995)

Imam al-Baihaqi. *Al-Sunan al-Kubra*, Juz 6, (Haidar Abad: Majlis Dairah al-Ma'arif al-Nizhamiah, 1344 H)

Ismail Suny, *Hukum Islam Ditinjau dari Sudut Pertumbuhan Teori Hukum di Indonesia*, Suara Muhammadiyah No. 16 Th. 76 Agustus 1991.

-----, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam Eddi Rudiana Arief, *et. al Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan pembentukan*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991)

Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978)

J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein, cet.ke-1(Yogyakarta, Tiara wacana, 1994)

K.H. Hasan Basry, *Perlunya Kompilasi Hukum Islam*, *Mimbar Ulama*, No. 104 Th. X April 1986.

Komite Fakultas Syari'ah Universitas Mesir, *Al-Hakam al-Mawaris fi al-fiqih al-Islami* (*Hukum Waris*), penerjemah Addys Aldizal dan Fathurrahman, (Jakarta: Senayan Abadi Publisng, 2004)

Masrani Basran, *Kompilasi Hukum Islam*, *Mimbar Ulama*, No. 104 Th X April 1986

Moch. Koesnoe, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Indah Grafika, 1995), Dikutip oleh Majalah Varia Peradilan Nomor 122, November 1995.

Moh. Anwar, *Faraidl (Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-masalahnya)*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981)

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000)

-----, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002)

-----, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990)

- Mohammad Mahfud MD et al, *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Pers, 1993)
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Muchlis Usman. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah : Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002)
- Muchtar Adam, "Perbandingan Mazhab dalam Islam dan Permasalahannya", dalam *Hukum Islam di Indonesia; Pemikiran dan Praktek*, Eddi Rudiana Arief dkk (peny), cet. ke-2, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994).
- Muchtar Zarkasy, *Hukum Islam dan Putusan-putusan Pengadilan agama*. Makalah pada Seminar Hukum Islam Indonesia, IAIN Imam Bonjol, Padang, 1985
- Muhammad Abu> Zahrah, *Us}u>l al-Fiqh*, (Bairut : Da>r al-Fikr al-'Ara>bi, t.t.)
- Muhammad 'Ali< as-S{a>bu>ni<, *al-Mawa>ri<s\ fi< asy-Syari<'ah al-Isla>miyyah fi< D{au' al-Kita>b wa as-Sunnah*, (Makkah: Da>r al-H{adi<s\, 1388 H)
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Muh}ammad bin S|alih} bin al-'Us\aimi>n, *Tas-hi>lul Fara>'id*, (Riyad: Da>r T{aibah, 1404H/1983M)
- Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, Jilid III, (Jakarta: Cahaya, 2007)
- Muhammad Muhyiddin Abd al Hami<d, *Ah}ka>m al-Mawa>ri<s\ fi< asy-Syari<'ah al-Isla>miyyah 'ala> Maz\ a>hib li A'immati al-Arba'ah*, cet. ke-1 (Bairut: Da>r al-Kutub, 1984/1404)
- Muhammad Said al-Asymawi, *Us}u>l asy-Syari<'ah*, alih bahasa Lutfi Thomafi, dengan judul "Nalar Kritik Syari'ah", cet. ke-1 (Yogyakarta: LkiS, 2004)
- Muhammad Yusuf Musa, *Al-Tirkah wa al-Mirats fi al-Islam*, (Mesir: Daar al-kitab al-Araby, 1959)
- Munawir Chalil. *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*
- Muslim Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Mujahidin, 1989)
- M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000)

M. Ali hamid Ash-Shabuni, (penerjemah Abdulhamid Zahwa), *Hukum Waris*, (Jakarta: Pustaka Mantiq, 1994)

M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, (IND HILL & Co, 1984)

-----, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan hukum Kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)

M. Yahya Harahap, "*Materi Kompilasi Hukum Islam*", dalam *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Moh. Mahfud Md (ed), cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 1993)

-----, *Tujuan Kompilasi Hukum Islam*, dalam IAIN Syarif Hidayatullah, *Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Hikmat Syahid Indah, 1988)

-----, *Kedudukan wanita dalam Hukum Kewarisan*, *Majalah Mimbar Hukum*, No.10, 1995

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)

Otje Salman. S, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2006)

Panitia penyusunan Biografi, *Prof. K.H. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Harapan, 1990)

Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994)

Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999)

Rahmad Djatnika, *Sosialisasi Hukum Islam di Indonesia*, dalam Abdurrahman Wahid, ed. al, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990)

Ranuhandoko, I.P.M, *Terminologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), cet. ke-2

Saekan Emiati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arloka, 1997)

Sayid Sa'biq, *Fiqh al-Sunnah Juz III*, (Beirut : Dar el-Fikr, 2008M/ 1429H)

Suhrawardi K. Lubis dan Kornis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam; Lengkap dan Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993)

Satria Effendi Zein, *Hukum Islam; Perkembangan dan Pelaksanaanya di Indonesia*, dalam Ari Anshori dan Slamet Warsidi (ed) *Fiqh Indonesia dalam Tantangan*, (Surakarta: FIAI UMS, 1991)

Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008)

Siti Patimah Yunus, *Wanita dan Hak Waris serta Pemilikan Menurut Hukum Positif di Indonesia, Hukum Pembangunan*, Nomor 5 Tahun XVIII, (Oktober, 1998)

Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1991)

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, Cet. Ke-12, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002)

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), Cet. ke-12

S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1981)

S. Wojowasito, dan WJS Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia – Indonesia Inggris*, (Jakarta: Hasta, 1982)

Taufiq, *Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris*, Red Top Panitia Seminar Nasional, 2010,

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010)

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1991) Edisi kedua

-----, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Ttp: Gita Media Press, tt)

Weber seperti dikutip oleh Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1995), Cet. XI